

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI INDONESIA
PERIODE 1990-2015

**ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI INDONESIA
PERIODE 1990-2015**

Isnaini Harahap, M. Ag



ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI INDONESIA
PERIODE 1990-2015

Isnaini Harahap, M. Ag

Desain Cover : Bayu Nugroho

Desain Layout : Fauzi Ispana

Diterbitkan Oleh:

FEBI UIN-SU Press

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Telp./HP. 0813 6116 8084

Email: febiuinsupress@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2015

ISBN : 978-602-73510-7-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kepada Allah swt yang atas izin dan keridhaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku Analisis Kausalitas Variabel Makro Ekonomi Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Indonesia Periode 1990-2015. Sebuah buku yang disusun berdasarkan penelitian mendalam tentang bagaimana hubungan timbal balik antara variable makro ekonomi dengan APBN di Indonesia dengan perspektif ekonomi integrative yakni memadukan ekonomi konvensional dan Islam. Shalawat dan salam atas Rasulullah saw, allahumma shalli 'ala Muhammad, wa 'ala ali Muhammad, qudwah hasanah yang telah memberi jalan pencerahan bagi pengembangan ekonomi melalui nilai-nilai dasar dalam Alqur'an dan Hadis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang disusun sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual. Dalam APBN pemerintah, sumber utama yang diharapkan menjadi sumber pendapatan dan belanja negara adalah pajak. Padahal sumber-sumber fiskal sangat banyak, dan Islam memberikan beberapa contoh sumber pendapatan negara yang potensial untuk dikembangkan dalam konteks keIndonesiaan, seperti zakat, wakaf dan pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam yang profesional serta amanah.

Penulisan buku ini tidak akan terlaksana dengan baik, tanpa dukungan dari berbagai pihak, antara lain Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Azhari Akmal Tarigan, MAG, Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Yafiz, MA, Wakil Dekan II, Dr. Chuzaimah Batubara, MA, dan Wakil Dekan III, Dr. M. Ridwan, MA, yang telah memberikan jalan awal bagi penulisan buku ini. Marliyah, MA, Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, yang telah membantu mengelola jurusan dengan baik sehingga penulis memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan buku ini, serta teman-teman di program studi Ekonomi Islam yang selalu memberi masukan terhadap penyusunan buku ini. Kepada mereka semua penulis mengucapkan terima kasih, semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal kebajikan. Terima kasih teristimewa untuk keluarga penulis, suami penulis Abdul Rahin, SH, M.Si yang tidak pernah complain ketika penulis masih menggunakan waktu kebersamaan di rumah untuk mengerjakan buku ini. Ketiga anak penulis, Sayyidatur Rahmah, Muhammad Risyad 'Azami dan Muhammad Faqih Arraisi yang kadang-kadang sering protes karena bundanya asyik dengan laptop dibandingkan bermain dengan mereka. Buku ini penulis persembahkan untuk mereka, semoga menjadi motivasi bagi ketiganya untuk menulis lebih baik dari bundanya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, baik dari sisi konten maupun metodologis, karenanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan buku ini di masa selanjutnya

Medan, Oktober 2015

Isnaini Harahap, M.Ag

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	11
B. Kebijakan Fiskal	63
C. Variabel-Variabel Makro Ekonomi dalam APBN.....	75
D. Penelitian Sebelumnya	85

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	87
B. Populasi dan Sampel.....	88
C. Data Penelitian	88
D. Metode Analisis Data	89

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian	93
B. Analisis Data	105

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	127
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi merupakan salah satu ancaman serius bagi perekonomian Indonesia. Beberapa indikator ekonomi seperti gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mencapai 27.000 orang menurut Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) atau 100.000 orang menurut Institute for Development of Economics and Finance, pelemahan nilai tukar rupiah sebesar Rp.14.695 peningkatan jumlah orang miskin sebanyak 860.000 orang sehingga jumlah penduduk miskin mencapai 28.59 juta orang yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta tarif listrik, lonjakan harga di tingkat eceran, seperti beras, makanan pokok, deficit neraca pembayaran karena adanya arus modal keluar dan kondisi makro ekonomi yang memburuk, merupakan beberapa indikator yang menunjukkan perekonomian Indonesia sedang tertekan.¹

Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Anwar Nasution menyatakan Indonesia saat ini sedang dilanda empat krisis dalam waktu bersamaan, bahkan kondisi tersebut disebut-sebut lebih

¹ <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2690/1/ancaman.krisis.ekonomi>

parah dari krisis 1997-1998.² Pertama, krisis harga komoditas primer yang sudah jatuh sejak 2011 pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedua, krisis tingkat suku bunga utang luar negeri meningkat, sehingga aliran modal asing keluar secara besar-besaran. “Krisis ketiga, musim kering berkepanjangan dan keempat krisis ada perubahan kecil di mata uang Yuan China. Menurutnya, Indonesia saat ini jelas sudah memasuki fase krisis, pelemahan nilai tukar rupiah sampai ke level 14.000 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sehingga berdampak pada kenaikan inflasi, pelemahan kurs rupiah juga akan menyebabkan dunia usaha untuk membayar utang luar negeri, terutama bagi pengusaha yang berutang dalam bentuk valuta asing, seperti perusahaan pertambangan, perkebunan sampai para pengembang yang membangun gedung pencakar langit dan proyek real estate. Dari sisi perbankan, tekanan pada kurs rupiah mempengaruhi kinerja bank karena anjloknya harga komoditas primer, naiknya tingkat bunga sehingga banyak nasabah tidak sanggup membayar kredit, sehingga menyebabkan kredit macet atau meningkatnya Non Performing Loan (NPL), dan tergerusnya modal.”³

Ancaman krisis ekonomi Indonesia di atas seharusnya menyadarkan umat Islam di Indonesia akan perlunya ekonomi Islam sebagai system ekonomi baru, dan tidak terlalu mendewakan system kapitalisme yang telah menciptakan berbagai krisis ekonomi.⁴ Krisis ekonomi tahun 1997-1998, krisis ekonomi Amerika tahun 2008 yang disebabkan macetnya kredit perumahan (*Subprime Mortgage*) sehingga mengguncang bursa saham di seluruh dunia seperti Jepang, Hongkong, China, Australia, Singapura, India, Taiwan dan Korea Selatan, termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika

² <http://bisnis.tempo.co/read/news>

³ <http://bisnis.liputan6.com/read/2301983/ri-kini-tengah-dilanda-4-krisis-lebih-parah-dari-1998>

⁴ Lihat ulasan Stiglitz mengenai kapitalisme Amerika yang telah menyebabkan tingginya kesenjangan pendapatan dan kekayaan pada masyarakat selama lebih dari 40 tahun terakhir dalam Joseph Stiglitz. *Phony Capitalism* dalam *Harpers Magazine* dapat diunduh di <http://harpers.org/> diterbitkan pada September 2014 dan didownload pada tanggal 3 Agustus 2015

Selatan dan Amerika Utara.⁵ Krisis ekonomi Amerika tahun 2011 yang menyebabkan Amerika tidak mampu membayar hutang kepada Rusia, Jepang, dan China sebesar US\$ 14.3 trilyun sehingga memaksa negara Amerika untuk menggunakan utang lagi, yaitu sebesar US\$ 2.1 trilyun sehingga menyebabkan perekonomian Amerika tidak stabil. Krisis Yunani tahun 2013 yang berimbas pada negara-negara Spanyol, Italia, dan Portugal yang menyebabkan Uni Eropa mengalami krisis ekonomi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia,⁶ seharusnya menjadi pelajaran bagi Indonesia. Berbagai krisis ekonomi tersebut mengajarkan bahwa pilihan kapitalisme bukan hanya menyebabkan kegagalan ekonomi di negara-negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara maju yang menjadi pengusung ideologi utama sistem ekonomi kapitalis seperti Amerika Serikat,⁷ dan pilihan pemerintah untuk tetap mempertahankan kapitalisme sebagai sistem perekonomian adalah pilihan yang salah.

Agar krisis ekonomi tidak benar-benar terjadi, pemerintah idealnya segera melakukan berbagai kebijakan baik fiskal maupun moneter. Pengalaman krisis ekonomi tahun 1997-1998 telah mengajarkan bagaimana krisis tersebut melemahkan perekonomian masyarakat. Setidaknya krisis ekonomi akan memunculkan 2 persoalan mendasar *pertama*; bertambahnya angka kemiskinan akibat ketidakmampuan negara dalam melahirkan kebijakan atau program-program yang tepat dalam arti program yang mampu memberikan

⁵ Floriana Ferro. Responsibility and Capitalism. A Phenomenological Way to Approach the Economic Crisis Nordicum-Mediterraneum ISSN: 1670-6242 (Online) Publisher by University of Akureyri. Lihat juga Cristiana Tudor. Understanding the Roots of the US Subprime Crisis and its Subsequent Effects. The Romanian Economic Journal. 2009;XII(31), h.115-148. Tara Ninta Ikrima, Harjum Muharam Co-Integration Dan Contagion Effect Antara Pasar Saham Syariah Di Indonesia, Malaysia, Eropa, Dan Amerika Saat Terjadinya Krisis Yunani dalam Jurnal Dinamika Manajemen. 2015

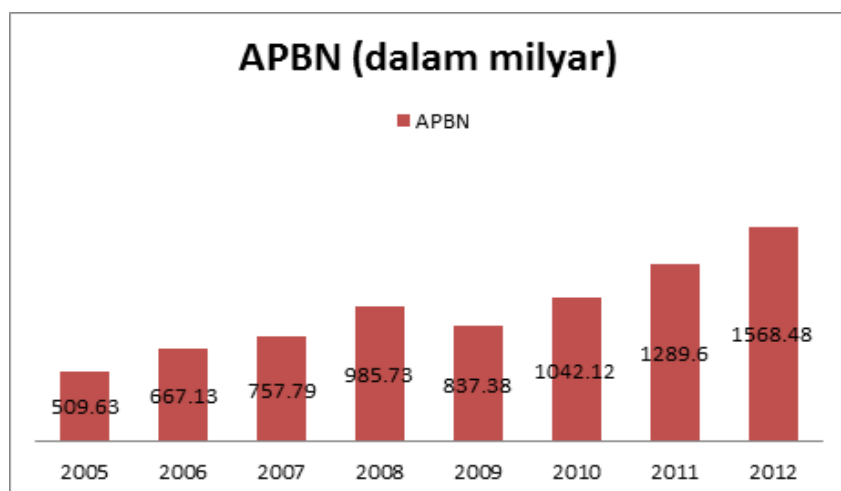
⁶ Iulia Monica Oehler-Sincai. **Financial contagion reloaded: the case of Cyprus.** *Global Economic Observer*. 2013;1(1):66-74. Baca juga *Ettah B. Essien*. The Current Global Economic Crisis: Gleaning from History. *Current Research Journal of Economic Theory* ISSN: 2042-4841 (Print); 2042-485X (Online) Publisher: Maxwell Science Publication

⁷ Lihat Samuel Huntington, *The Clash of Civilization*, Foreign Affairs; Summer 1993; 72, 3; ABI/INFORM Global, h. 25

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

perbaikan hidup rakyat, disamping ketidakmampuannya juga dalam mengelola dan menjaga kekayaan yang dimiliki dalam memajukan kesejahteraan rakyat. *Kedua*, peningkatan angka pengangguran akibat dari pemutusan hubungan kerja disamping sempitnya lapangan kerja di Indonesia (lapangan kerja tidak mampu menampung tingginya angkatan kerja).

Karenanya untuk menghindari kedua dampak di atas, salah satu kebijakannya adalah dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Keberadaan infrastruktur diperkirakan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi (khususnya ekonomi daerah yang selama ini belum optimal), menyerap tenaga kerja dan pemerataan pembangunan kota dan daerah. Keseluruhan anggaran tersaebut dituangkan dalam anggaran pembelanjaan dan belanja negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.



ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

Keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program ini mengingat penyediaan infrastruktur membutuhkan modal yang sangat besar. Persoalan APBN tentu tidak hanya pada masalah belanja modal saja, perubahan asumsi makro seperti terdepresiasi nilai rupiah, naiknya harga minyak mentah, turunnya *lifting* produksi minyak mentah dalam negeri, kurang perform-nya BUMN, dan tingginya harga barang kebutuhan dapat menekan APBN sehingga sewaktu-waktu kesinambungan APBN terancam. Ancaman terhadap kesinambungan ini merupakan risiko APBN di masa datang baik yang muncul karena perubahan kebijakan maupun disebabkan oleh faktor pasar.

Rancangan APBN 2016, merupakan salah satu contoh bagaimana belanja pemerintah pada tahun 2016. Dapat dilihat bahwa dalam RAPBN 2016 sebagian besar bertumpu pada penerimaan pajak, yakni diusulkan Rp 1.565,8 T (triliun), atau 84,7% dari total penerimaan Rp 1.848,1. Angka itu naik Rp 86,5 T dari APBNP 2015. Kenaikan penerimaan pajak itu disandarkan pada kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Nonmigas dan penerimaan cukai. PPh Nonmigas diusulkan Rp 715,01 T, naik Rp 85,175 T dari Rp 629,835 T di APBNP 2015. Penerimaan cukai diusulkan Rp 155,52 T naik Rp 9,7 T dari 145,74 T di APBNP 2015. Adapun penerimaan PPN diusulkan Rp 573,69 T, turun Rp 2,78 T dari Rp 576,47 T di APBNP 2015. Penurunan target PPN ini logis. Sebabnya, PPN dipungut melalui konsumsi, sedangkan konsumsi swasta dan masyarakat saat ini turun drastis dan belum akan meningkat dalam waktu dekat. Belajar dari kegagalan menaikkan PPN secara drastis, maka dalam RAPBN 2016 peningkatan penerimaan pajak lebih disandarkan pada PPh Nonmigas. PPh Nonmigas akan bertumpu pada PPh Orang Pribadi dan PPh Badan. Masalahnya saat ini ekonomi sedang lesu, konsumsi menurun, permintaan produk perusahaan juga banyak yang turun, penjualan lesu dan kenaikan biaya produksi akibat pelemahan kurs rupiah. Semua itu membuat penghasilan sektor industri cenderung menurun. bagaimana meningkatkan PPh badan jika penghasilan badan yang akan dipajaki cenderung turun?

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

STRUKTUR APBN 2016

(dalam milyar rupiah)

URAIAN	APBNP 2015	RAPBN 2016
A. PENDAPATAN NEGARA	1.761.642,8	1.848.107,2
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.758.330,9	1.846.075,5
1. Penerimaan Perpajakan	1.489.255,5	1.565.784,1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	269.075,4	280.291,4
II. PENERIMAAN HIBAH	3.311,9	2.031,8
B. BELANJA NEGARA	1.984.149,7	2.121.286,1
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.319.549,0	1.339.084,4
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga	795.480,4	780.377,9
2. Belanja Non-Kementerian Negara/ Lembaga	524.068,6	558.706,5
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	664.600,7	782.201,8
1. Transfer ke Daerah	643.834,5	735.219,7
2. Dana Desa	20.766,2	46.982,1
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(66.776,0)	(89.750,0)
D. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(222.506,9)	(273.178,9)
% Defisit terhadap PDB	(1,9)	(2,1)
E. PEMBIAYAAN (I+II)	222.506,9	273.178,9
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	242.515,0	271.980,3
1. Perbankan Dalam Negeri	4.785,4	5.450,7
2. Non Perbankan Dalam Negeri	237.729,6	266.529,6
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(20.008,1)	1.198,6
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	48.647,0	72.836,9
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(4.471,9)	(5.909,7)
3. Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	(64.183,2)	(65.728,6)

Sumber: Kementerian Keuangan

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

Penyusunan APBN didasarkan pada asumsi-asumsi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, suku bunga SBI, harga minyak internasional dan produksi minyak Indonesia. Namun dalam perjalanannya, ternyata ada indikasi bahwa APBN yang dirumuskan oleh pemerintah justru bisa berpengaruh terhadap asumsinya itu sendiri. APBN bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, suku bunga SBI, harga minyak internasional dan produksi minyak Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil *output* yang dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi sehingga dapat menggambarkan bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor ekonomi tersebut pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Inflasi merupakan salah satu variable makro ekonomi yang dapat mempengaruhi perekonomian secara luas, sehingga sering menjadi target kebijakan pemerintah. Inflasi yang tinggi akan cenderung menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat, karena kenaikan harga akan mengurangi paritas daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, menurunkan investasi dan potensial meningkatkan pengangguran karena pengusaha kesulitan untuk membayar gaji karyawan dan menutupi biaya produksi. Karenanya pemerintah berupaya untuk mengendalikan inflasi agar tidak terlalu tinggi sehingga tidak memperburuk kinerja perekonomian.

Tingkat suku bunga merupakan variabel yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih bentuk kekayaan yang ingin dimilikinya, apakah dalam bentuk uang, *financial asset*, atau benda-benda riil seperti tanah, rumah, mesin, barang dagangan dan lain-lain. Bagi para investor, penurunan tingkat suku bunga, akan mengurangi

tingkat keuntungan yang diperoleh bila dana diinvestasikan dalam bentuk deposito. Penurunan suku bunga juga akan memperkecil biaya modal, memudahkan perusahaan untuk memperoleh dana sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas akan mendorong peningkatan laba, hal ini menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di pasar modal.

Nilai tukar merupakan variabel dalam perekonomian terbuka. Dalam penentuan nilai APBN selalu berdasarkan pada asumsi nilai tukar. Nilai tukar mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap mata uang negara tertentu. Variabel ini juga dijadikan asumsi karena dalam APBN terdapat komponen belanja pembayaran bunga hutang luar negeri yang harus dibayarkan dalam mata uang asing, yang mau tidak mau akan disesuaikan dengan kurs yang berlaku. Selain itu ada beberapa jenis penerimaan yang diterima dalam bentuk mata uang asing misalnya hibah maupun bantuan hutang luar negeri.

Harga minyak internasional jika naik memberikan dampak terhadap anggaran (APBN) adalah negatif, yaitu beban subsidi BBM dan listrik jauh lebih tinggi dari kenaikan penerimaan negara dari kenaikan harga minyak. Hal ini akan menyebabkan pemerintah harus memotong anggaran-anggaran lainnya, agar anggaran pemerintah (APBN) tetap dapat sehat dan tidak kolaps, yang akan menyebabkan krisis ekonomi yang lebih besar, karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Jika hal ini terjadi, maka investor akan memindahkan investasi dan uangnya keluar negeri. Arus modal keluar akan mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah. Nilai tukar rupiah yang melemah akan mengakibatkan harga-harga komoditas naik lebih tinggi lagi. Harga-harga yang naik akan semakin memberatkan perekonomian rakyat. Situasi tersebut akan mengakibatkan: pertumbuhan ekonomi melemah, terjadi pengangguran meningkat dan kemiskinan semakin tinggi.

Variabel-variabel tersebut merupakan asumsi/indikator utama yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN. Namun dalam keberlanjutannya ternyata APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah

dapat berpengaruh terhadap besaran-besaran asumsinya itu sendiri.⁸ APBN diarahkan untuk mendapatkan dana dan mengarahkan perekonomian nasional pada kondisi yang lebih baik dengan mengatur penerimaan (pajak dan non pajak) dan pengeluaran (belanja negara). Kebijakan seperti ini selain berdampak positif tetapi juga dapat menimbulkan risiko fiskal. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan 1997 merupakan contoh yang sangat baik untuk menjelaskan terjadinya risiko fiskal yang berpeluang mengganggu kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut berhati-hati dalam mengasumsikan variable-variabel makro tersebut sebagai dasar perumusan APBN, rumuskan kebijakan dan juga cermat dalam mengelola risiko fiskal yang mungkin akan terjadi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengeksplorasi secara lebih mendalam hubungan antara asumsi APBN (pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI, harga minyak internasional) dengan APBN.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI, harga minyak internasional berkontribusi terhadap APBN di Indonesia?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI, dan APBN berkontribusi terhadap harga minyak internasional?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga minyak internasional, dan APBN berkontribusi terhadap suku bunga SBI di Indonesia?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi, inflasi, APBN, suku bunga SBI, dan harga minyak internasional berkontribusi terhadap nilai tukar di Indonesia?

⁸ Lihat asumsi-asumsi makro ekonomi dalam penyusunan APBN dalam Nota Keuangan RAPBN 2016 di <http://www.kemenkeu.go.id>

5. Apakah pertumbuhan ekonomi, APBN, nilai tukar, suku bunga SBI, dan harga minyak internasional berkontribusi terhadap inflasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan kausalitas antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan variable makro ekonomi inflasi, kurs, suku bunga Bank Indonesia dan Harga Minyak dunia. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan:

1. Kontribusi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI, harga minyak internasional berkontribusi terhadap APBN di Indonesia
2. Kontribusi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI, dan APBN berkontribusi terhadap harga minyak internasional?
3. Kontribusi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga minyak internasional, dan APBN berkontribusi terhadap suku bunga SBI di Indonesia
4. Kontribusi pertumbuhan ekonomi, inflasi, APBN, suku bunga SBI, dan harga minyak internasional berkontribusi terhadap nilai tukar di Indonesia
5. Kontribusi pertumbuhan ekonomi, APBN, nilai tukar, suku bunga SBI, dan harga minyak internasional berkontribusi terhadap inflasi di Indonesia

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Landasan hukum serta tata cara penyusunan APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3. Pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pada pasal 23 ayat 3 disebutkan apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran,

APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

APBN disusun sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi dasar dalam penggunaan biaya dalam pelaksanaan program-program negara disusun melalui berbagai indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro tersebut dijadikan tolak ukur sebelum menyusun anggaran yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh negara. Adapun indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI, harga minyak internasional, dan produksi minyak Indonesia.

Kebijakan ekonomi makro Indonesia pada dasarnya merupakan kesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat bahwa konsistensi kebijakan sangat diperlukan dalam mencapai sasaran pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu kebijakan ekonomi makro tersebut ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi yang sudah membaik dan mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul. Tantangan dan sasaran kebijakan ekonomi makro tersebut adalah menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas peningkatan kualitas dan kinerja perekonomian.

Asumsi-asumsi ekonomi makro tersebut seharusnya tidak menjadi satu-satunya asumsi yang dipergunakan dalam penyusunan APBN.

Dalam pengelolaan keuangan publik islami sejatinya terdapat nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam penetapan asumsi makro APBN yaitu:

- a. **Prinsip Keadilan, tujuan dasar dari kebijakan fiskal Islam adalah distribusi pendapatan.** Hal ini dicerminkan dalam kebijakan zakat. Oleh karena itu sebenarnya hal tersebut dapat ditransformasikan ke dalam ukuran-ukuran keadilan dalam kebijakan fiskal misalnya menjadikan indek gini ratio sebagai asumsi makro APBN. Dengan alat ini pemerintah ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan atas hasil – hasil pembangunan. Adalah tidak logis sebenarnya negara yang berdasarkan Pancasila ini seratus lima puluh orangnya memiliki kekayaan yang lebih tinggi dari belanja seluruh APBN pusat. Laporan terakhir menyebutkan kekayaan 150 orang di Indonesia saat ini sebesar 550 triliun rupiah jauh di atas belanja seluruh kementerian/lembaga termasuk seluruh anggaran untuk membangun seluruh jalan, belanja persenjataan, biaya aparatur, biaya pendidikan yang tahun 2010 ini seluruhnya (belanja kementerian/lembaga) hanya sebesar 300 triliun. Terus dalam kondisi ini bagaimana sebenarnya dengan pengamalan sila kelima dari Pancasila. Bukankah dalam tujuan negara yang didengungkan oleh pendiri bangsa yaitu 'masyarakat adil dan makmur', dimana kata adil didahulukan daripada makmur.
- b. **Penetapan tingkat pengentasan kemiskinan sebagai target makro ekonomi hakekatnya sejalan dengan ekonomi syariah.** Hal ini sejalan dengan nilai ajaran zakat yang mengamanatkan minimal 25% penerimaan zakat untuk pengentasan kemiskinan sehingga dua asnaf yang mewakili kepentingan tersebut yaitu fakir dan miskin dialokasikan secara langsung dari 25% dari penerimaan zakat. Penetapan penurunan angka kemiskinan sebagai asumsi APBN adalah sangat positif dengan ketentuan angka tingkat capaian pengentasan kemiskinan tersebut dalam pelaksanaannya benar- benar dapat diyakini kevalidannya serta dengan kejelasan kriteria pengukurannya.

- c. **Penurunan tingkat pengangguran sebagai target makro capaian APBN.** Dalam hal tertentu angka pengentasan kemiskinan tidak sejalan dengan tingkat pengangguran. Oleh karena itu tingkat pengangguran kiranya perlu juga dijadikan target asumsi makro dan kontrak kinerja pemerintah. Karena bekerja bagi seseorang adalah sebuah penghargaan, identitas diri dsb. Maka hal ini harus diprioritaskan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan penekanan nilai zakat terhadap orang – orang yang berusaha sehingga terhadap orang yang berhutang karena untuk usaha/bekerja dibantu oleh negara.
- d. **Penetapan nilai rupiah terhadap emas sebagai pengganti dolar yang selama ini menjadi bench mark dalam penyusunan APBN.** Ini mungkin akan sangat mendasar dan kontroversial karena terkait dengan berbagai implikasi kebijakan moneter namun hal tersebut harus mulai diwacanakan karena untuk menuju pengelolaan kebijakan fiskal yang benar-benar berbasis nilai-nilai islami. Disamping itu perlu penetapan nilai tukar rupiah tidak ke dalam dolar semata namun dapat didiversifikasikan ke dalam Uero dan Cina. Karena sadar atau tidak untuk membuat dunia yang lebih berkeadilan maka dominasi dolar harus mulai dikurangi dengan tidak menjadikannya satu-satunya benchmark mata uang rupiah.
- e. **Maksimal dana yang boleh mengendap di perbankan misalnya sekian persen dari uang yang ada.** Asumsi ini untuk menjamin agar dana diperbankan benar- benar dapat bergerak ke sektor riil. Yang mendesak saat ini sebenarnya disamping hal – hal tersebut adalah kebijakan yang dapat ditargetkan oleh pemeirntah dalam APBN adalah bagaimana agar pemerintah dan BI ditekan untuk membuat kebijakan yang mampu menggelontorkan dana perbankan yang saat ini enggan bergerak ke sektor riil. Ini barangkali juga mendesak untuk menjadikan target kebijakan fiskal sekaligus kalau memungkinkan sebagai asumsi APBN.

Dengan menambah asumsi-asumsi ini ke dalam penyusunan APBN, maka APBN akan lebih rasional dan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat lebih mudah untuk dicapai.

1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan pembiayaan

a. Pendapatan Negara dan Hibah.

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber, namun secara umum diperoleh melalui pajak. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah, dimana masyarakat tidak memperoleh imbalan langsung dari pembayaran pajak tersebut.⁹ Tax rasio Indonesia masih tergolong cukup kecil, yaitu hanya berada dikisaran 12%. Meskipun demikian, jumlah penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan setiap tahun jfika melihat komposisi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sejak tahun 2006 s.d 2014, sektor pajak dan bea cukai memberi sumbangsih rata-rata sebesar 70% dari total pendapatan negara. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri bahwa sektor pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara. Indonesia belum siap untuk mengandalkan sektor lain selain sektor pajak.

Indonesia adalah negeri kaya yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kekayaan alam tesebut tidak mampu menjadi sumber utama pembiayaan negara. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa pajak tetap menjadi prioritas utama bagi penerimaan negara, yaitu:

- 1) Faktor geografis dan demografi Indonesia, dimana indonesia memiliki wilayah luas yang terdiri dari 17.000 pulau dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia yang populasinya mencapai 240 juta jiwa. Dengan kondisi

⁹ Iskandar Putong, *Economics...*, h. 320-321

tersebut, pembangunan secara merata diseluruh wilayah dan upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan dukungan finansial yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut. Hasil kekayaan alam yang kita miliki ternyata belum cukup mampu membiayai program tersebut, sehingga peranan pajak masih sangat diperlukan.

- 2) Meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber alam yang melimpah, semua akan menjadi sia-sia jika tidak mampu dikelola dengan baik. Pembangunan infrastruktur tentunya menjadi faktor penunjang utama untuk memaksimalkan pengolahan kekayaan alam. Namun, pembangunan infrastruktur merupakan investasi yang sangat besar dan penerimaan pajak tetap menjadi sumber utama untuk membiayai investasi tersebut.
- 3) Pertimbangan bahwa suatu saat kekayaan alam yang kita miliki akan habis, menjadikan pajak sebagai prioritas dan solusi utama sumber pembiayaan negara.¹⁰

Diandalkannya pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam kajian ekonomi Islam menjadi perdebatan. Juhur ulama Madzhab Syafi'i, seperti Imam al-Ghazali, menyatakan bahwa memungut **uang (pajak) selain zakat pada rakyat diperbolehkan** jika memang diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara baik untuk perang atau keperluan negara lainnya, namun jika masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh. Juhur sepakat bahwa **pajak tidak dapat serta merta di-qiyas-kan** (di-analogi-kan) sebagai *mucus (pungutan yang menzalimi)*. Juhur ulama sepakat bahwa pajak yang dipungut/dipotong oleh pemerintah guna mendanai dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas seperti: membiayai tersedianya fasilitas-fasilitas jalan, jembatan, transportasi publik, listrik dengan harga

¹⁰ Nur Arianto. *Siapakah Membangun Negeri ini Tanpa Pajak?* dalam <http://www.pajak.go.id/content/article/siapakah-membangun-negeri-ini-tanpa-pajak>

terjangkau, rumah sakit murah pemerintah, obat-obat generik, keamanan oleh TNI dan POLRI, sekolah-sekolah murah negeri hingga ke pedesaan dan daerah terpencil, dan fasilitas-fasilitas layanan publik lainnya **adalah bukan mukus** sehingga **halal** untuk dipungut sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat juga.¹¹

Adapun jenis-jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan dalam APBN meliputi penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaananggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya Berbeda dengan sistem penganggaran sebelum tahun anggaran 2000, pada system penganggaran saat ini sumber-sumber pembiayaan (pinjaman) tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penerimaan. Dalam pengadministrasian penerimaan negara, departemen/lembaga tidak boleh menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk membiayai kebutuhannya. Beberapa pengecualian dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

b. Belanja Negara

Belanja Negara adalah kewajiban **pemerintah pusat** yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Negara terdiri atas **Belanja Pemerintah Pusat**, dan **Transfer ke Daerah**. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:

11 Wiyoso Hadi. *Apakah Agama Mengharamkan Pajak* dalam <http://www.pajak.go.id/content/article/apakah-agama-mengharamkan-pajak>

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

- 1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- 3) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.
- 4) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- 5) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan atau lembaga penerima subsidi.
- 6) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- 7) Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana) digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya
- 8) Belanja Lainnya merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup¹²

Sedangkan Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:

- Dana Bagi Hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

- Dana Alokasi Umum yaitu sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBN. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
- Dana Alokasi Khusus yaitu adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU)¹³

Dalam Islam, belanja pemerintah didasarkan pada kaidah-kaidah tertentu

c. Pembiayaan

Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan APBN antara lain adalah pembiayaan dalam negeri (perbankan dan non perbankan) serta pembiayaan luar negeri (netto) yang merupakan selisih antara penarikan utang luar negeri (bruto) dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Struktur Belanja Negara ialah sebagai berikut

¹³ UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

- 1) Pembiayaan dalam negeri, meliputi pembiayaan perbankan, privatisasi, surat utang negara, serta penyertaan modal negara.
- 2) Pembiayaan luar negeri, meliputi penarikan pinjaman luar negeri, terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek.
- 3) Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, terdiri atas jatuh tempo dan monatorium.

Hal yang mungkin harus menjadi catatan adalah model pembiayaan deficit APBN Indonesia, yang mau tidak mau harus ditutupi dengan utang. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Pada masa krisis ekonomi, utang luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, telah meningkat drastis dalam hitungan rupiah. Sehingga, menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui APBN RI dengan cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga jelas akan membebani masyarakat, khususnya para wajib pajak di Indonesia. Kata kunci: utang luar negeri, sumberdaya modal.¹⁴

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan

¹⁴ Adwin Surya Atmadja. Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. ISSN: 1411-0288 (Print) Publisher: Universitas Kristen Petra

kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

- 1) Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- 2) Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
- 3) Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
- 4) Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pem-

borosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

- 5) Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- 6) Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.¹⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan dari APBN yang merupakan kebijakan fiskal pemerintah adalah untuk mengatur jalannya perekonomian, sehingga berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Pengaturan tersebut dilakukan dengan cara memperbesar atau memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

2. Paradigma Penyusunan APBN dalam Islam

Secara historis, sejarah ekonomi Islam tidak mengenal istilah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), akan tetapi dalam Islam ada sebuah konsep yang mewujudkan dalam bentuk lembaga yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara yang disebut dengan baitul mal. Baitul mal merupakan satu lembaga keuangan negara yang dapat disamakan dengan kas negara yang ada dewasa ini. Lembaga ini sudah ada sejak Rasulullah saw dan merupakan salah satu pembaharuan yang dibawa Islam dibidang ekonomi karena sebelum diperkenalkan oleh Rasulullah tidak ada konsep yang jelas bagaimana mengurus keuangan dan kekayaan negara. Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan dan keuangan negara. Maka ketika pemerintah

¹⁵ Suminto, Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara. Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen Anggaran, Depkeu) dapat diakses di www.iei.or.id

berniat mengeksploitasi, maka sasaran dari peraturan yang dibuat adalah mengambil sebanyak-banyaknya yang ia mampu.¹⁶

Dalam Islam, pemerintahan dijalankan berlandaskan kepada prinsip kepercayaan. Ciri penting ini oleh Rasulullah saw dilaksanakan dengan benar. Rasulullah tidak menganggap dirinya raja atau pemerintah dari satu negara tetapi sebagai seorang yang dipercaya dan diamanahkan untuk mengatur urusan negara dengan semangat yang sama. Berdasarkan prinsip kepercayaan itu Rasulullah saw memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara dimana semua hasil kekayaan dan keuangan negara dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan tersebut menjadi milik negara dan bukan milik individu walaupun pemimpin negara dapat menggunakannya untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan tersebut dikenal dengan istilah baitul mal (rumah harta).¹⁷ Dengan demikian baitul mal dapat dikatakan sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur semua keuangan dan kekayaan negara baik dari segi pemasukan maupun pengeluaran. Lebih luas lagi baitul mal dapat dikatakan sebagai pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin.¹⁸

Sebagai lembaga yang mengurus harta kaum muslimin, segala properti baitul mal dianggap sebagai harta kepunyaan Allah atau

¹⁶ M. A. Sabzwari, "Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Pemerintahan Rasulullah saw," dalam Adiwarmanto Karim (ed), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: IIIT, 2002), h. 37.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nizām al-Iqtisād fi al-Islām*, terj. Mohd. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 253. Menurut Nabhani, baitul mal mencerminkan sebuah pos bukan sebuah tempat karena setiap harta yang menjadi hak kaum muslimin dan telah diambil oleh baitul mal menjadi properti baitul mal baik harta tersebut masuk ke dalam kas baitul mal atau tidak. Oleh karena itu tiap hak yang wajib diberikan untuk kepentingan kaum muslimin, maka hak tersebut berlaku untuk baitul mal. Apabila diberikan dalam salah satu pos baitul mal, maka harta tersebut telah menjadi bagian dari baitul mal, baik kasnya dikeluarkan atau tidak. Sebab harta yang telah diserahkan kepada penguasa kaum muslimin beserta pembantu-pembantu mereka, atau dikeluarkan melalui tangan-tangan mereka, maka hukum baitul mal berlaku untuk harta tersebut, baik terkait dengan pemasukan maupun pengeluaran.

harta kaum muslimin. Konsep ini berimplikasi pada pendapatan dan penggunaan properti baitul mal, bahwa pendapatan yang boleh dimasukkan ke dalam baitul mal adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan syariat dan pendapatan baitul mal hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan agama Allah dan kepentingan kaum muslimin.¹⁹ Dengan demikian baitul mal sebagai lembaga keuangan kaum muslimin mempunyai peranan yang cukup signifikan sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan dan hak kaum muslimin.

Pada masa Rasulullah saw pendapatan baitul mal selain benda bergerak disimpan di Mesjid Nabawi, tetapi berapapun pendapatan yang masuk langsung didistribusikan pada saat itu juga.²⁰ Pendapatan baitul mal yang ada dibelanjakan secara permanen (*permanent spending*) untuk biaya pertahanan, penyaluran zakat dan *'usyr*, pembayaran gaji, pembayaran upah sukarelawan, pembayaran hutang negara, dan membantu musafir. Sedangkan untuk belanja yang sifatnya temporer dana baitul mal dikeluarkan untuk beberapa pembiayaan seperti bantuan belajar, biaya akomodasi duta negara, pembebasan budak, hadiah untuk negara lain, pembayaran denda, pembayaran hutang orang yang meninggal dalam keadaan miskin, pemberian tunjangan untuk orang miskin, tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah saw, pengeluaran rumah tangga Rasulullah saw (80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap isterinya), dan untuk persediaan darurat.²¹

¹⁹ Hasanuzzaman, *Economic Functions of an Islamic State, The Early Experience*. (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), h. 138.

²⁰ Pencatatan menyeluruh tentang penerimaan negara pada masa Rasulullah saw tidak ada, tetapi menurut Sabzwari, sumber penerimaan pada masa Rasulullah saw diperoleh dari tiga kelompok masyarakat yaitu dari masyarakat muslim (zakat, *'usyr*, zakat fitrah, wakaf, *amwāl fadlā*, *nawāib*, sedekah, dan *khums*); masyarakat non muslim (*jizyah*, *kharāj*, dan *'usyr*); serta dari masyarakat umum (*ganīmah*, *fai*, uang tebusan, pinjaman, dan hadiah dari pemerintah negara lain). Sabzwari, "Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Pemerintahan Rasulullah saw," h. 35

²¹ *Ibid.*, h. 36

Keterangan ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan Islam baitul mal berfungsi untuk :

- a. Memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal semisal untuk fakir miskin, Ibnu Sabil, serta melaksanakan kewajiban jihad
- b. Memenuhi kompensasi semisal pengeluaran-pengeluaran untuk gaji para pegawai dan tentara, dan sebagainya.
- c. Memenuhi keperluan dan kemanfaatan tertentu selain kompensasi semisal pembukaan jalan-jalan, penggalian air, pembangunan mesjid dan sekolah, rumah sakit, serta keperluan-keperluan lain yang dianggap urgen dimana umat akan menderita jika tidak ada.
- d. Memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal karena satu keterpaksaan semisal ada paceklik, bencana alam, serangan musuh, atau apa saja yang menimpa kaum muslimin
- e. Melunasi hutang-hutang negara dalam rangka melaksanakan kewajiban negara terhadap kaum muslimin, serta keadaan apapun yang diwajibkan oleh *syara'* atas kaum muslimin.²²

Pada masa *Khulafaurrasyidîn*, lembaga ini dikelola secara intensif serta dan berhati-hati. Abu Bakar (11-13 H/632-634 M) sebagai khalifah pertama sesudah Nabi Saw yang sebelumnya berprofesi sebagai pengusaha membawa barang-barang dagangannya untuk dijual. Di tengah perjalanan Abu Bakar bertemu dengan Umar. Umar menanyakan kepada Abu Bakar tentang perilakunya tersebut. Abu Bakar menjelaskan bahwa ia membawa barang dagangannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Umar lantas meminta Abu Bakar untuk menemui Abu Ubaidah (pemegang kunci baitul mal). Abu Bakar dan Umar pergi menemui Abu Ubaidah yang segera menetapkan gaji yang cukup untuk khalifah, sesuai dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, yaitu 4.000 dirham setahun yang diambil dari baitul mal. Menjelang ajalnya tiba, karena khawatir terhadap gaji yang

²² Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nizām al-Iqtisād*, h. 254-255

diterimanya dari baitul mal, Abu Bakar berpesan kepada keluarganya agar mengembalikan gaji yang diterimanya dari baitul mal sejumlah 8.000 dirham.²³

Selama memerintah Umar bin Khattab (13-23 H/ 634-644 M) tetap memelihara baitul mal secara berhati-hati dan diadministrasikan dengan baik, ia menerima pemasukan dari sesuatu yang halal menurut syariat dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya Umar mengatakan: “tidak dihalkkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk keperluan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin”.²⁴

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Usman bin Affan (23–35 H/644-656M). Namun, karena pengaruh yang besar dari kaum keluarganya, Usman tidak begitu jauh memperhatikan tindakan bawahannya dalam mengelola baitul mal sehingga sering keluar dari ketentuan yang sebenarnya. Usman mengangkat anggota keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir masa pemerintahannya. Usman memberikan *khumus* kepada Marwan (kelak menjadi khalifah Umayyah ke-4) dari penghasilan Mesir dan memberikan harta yang banyak kepada kerabatnya.²⁵

Usman tidak menerima gaji dari baitul mal, sebaliknya ia meringankan beban negara dengan menyimpan uang pribadinya ke dalam baitul mal. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara Usman dengan pejabat keuangan baitul mal. Pada perkembangan selanjutnya keadaan ini bertambah rumit bersamaan dengan munculnya pernyataan lain yang menimbulkan kontroversial mengenai pengeluaran uang baitul mal dengan tidak hati-hati

²³ Abdul Azis Dahlan (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 187

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

sedangkan itu merupakan pendapatan pribadinya.²⁶

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib (35-40 H/ 656-661 M), kondisi baitul mal dikembalikan fungsinya seperti pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Ali juga mendapat gaji dari baitul mal dan mendapatkan jatah pakaian yang hanya mampu menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Ketika terjadi peperangan Ali dengan Muawiyah, pengikut Ali menyarankan agar ia mengambil dana dari baitul mal sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tapi Ali menolak permintaan tersebut dan bersumpah bahwa selama matahari masih terbit dan masih ada bintang di langit, dia tidak akan melakukan hal tersebut, karena hal tersebut sama dengan melakukan kezaliman.²⁷

Dengan demikian selama masa pemerintahan khulafa al-rasyidin, lembaga baitul mal menjalankan fungsi sosial untuk mencapai masalah ammah. Properti baitul mal dianggap sebagai harta kaum muslimin sedangkan khalifah dan amil-amilnya hanya pemegang kepercayaan. Dengan konsep bahwa properti baitul mal dengan harta kaum muslimin, negara menyediakan tunjangan berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin, membayar hutang orang yang bangkrut, membiayai diyat untuk kasus-kasus tertentu dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersil telah terbukti membawa berkah bagi kaum miskin selama masa pemerintahan *Khulafāur rāsyidīn*.

Pada masa pemerintahan Umayyah, baitul mal mengalami pergeseran. Jika baitul mal sebelumnya dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanah Allah dan amanah rakyat (kaum muslimin), maka pada masa pemerintahan Umayyah, baitul mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan oleh rakyat. Rakyat hanya wajib menyetor pajak kepada khalifah tanpa memiliki hak untuk bertanya atau membuat perhitungan dengan

²⁶ Sabzwari, "Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Pemerintahan Rasulullah saw," h. 57

²⁷ Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.), h. 187

khalifah. Khalifah menjadikan baitul mal sebagai haknya secara penuh dan mutlak.

Muawiyah sebagai khalifah pertama dinasti Umayyah misalnya, menginterpretasi makna baitul mal. Menurut pandangannya jika properti baitul mal dianggap sebagai harta Allah, maka kaum muslimin tidak memiliki hak terhadap harta tersebut. Oleh karena itu agar harta tersebut dapat dipergunakan kaum muslimin properti baitul mal harus dianggap sebagai harta kaum muslimin. Interpretasi ini dimaksudkan Muawiyah sebagai jalan baginya untuk dapat mempergunakan dana baitul mal guna mendukung kebijakan politik yang dilakukannya. Ibn Umar yang memahami maksud interpretasi tersebut menentang pendapat Muawiyah dan menegaskan properti baitul mal adalah milik Allah swt dan hal itu berimplikasi pada penggunaannya yang harus didasarkan pada kebenaran dan kepercayaan.²⁸

Pergeseran makna baitul mal ini ternyata berimplikasi negatif. Properti baitul mal mulai digunakan untuk kepentingan pribadi dan akhirnya fungsinya berubah total. Lembaga ini tidak memisahkan dana-dana yang ada dalam baitul mal. Pendapatan negara yang dikumpulkan dari rakyat menjadi kekayaan kalangan kerajaan yang dapat dibelanjakan sekehendaknya. Hal ini terlihat misalnya pada masa pemerintahan Walid. Walid menggunakan dana baitul mal untuk membangun kembali (mempercantik) mesjid Damaskus. Ketika dikritik karena telah mengeluarkan dana yang sangat besar dari baitul mal, Walid mengatakan bahwa baitul mal mengalami surplus sampai untuk tiga tahun berikutnya.²⁹

Pada masa ini, sekalipun terdapat pejabat *sāhibul kharāj* (semacam pejabat keuangan) namun tugasnya sekedar mengumpulkan sumber-sumber pendapatan demi kepentingan khalifah. Ketetapan sehubungan dengan keuangan, sepenuhnya menjadi wewenang raja termasuk juga dalam hal mengangkat dan memecat petugas keuangan. Pendapatan negara khususnya dari sektor pajak dikumpulkan petugas pajak propinsi yang selanjutnya dikirim ke bendahara pusat di

²⁸ Hasanuzzaman, *Economic Functions of an Islamic State*, h. 139-140

²⁹ *Ibid*

Damaskus. Karena belum ada aturan konstitusi pergantian penguasa selalu membawa perubahan kebijakan. Hal ini sangat mencolok dalam hal penetapan pajak terhadap *mawālī*.³⁰

Pergeseran yang terjadi pada masa Umayyah mulai ditertibkan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz berupaya membersihkan baitul mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berupaya mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Ia membagi properti-properti baitul mal dalam beberapa departemen yang berbeda. *Khumus* dibedakan dari zakat, pendapatan zakat dipisahkan dari *ganīmah*, dan lain-lain.³¹ Tidak diketemukan alasan yang jelas mengapa Umar bin Abdul Aziz membeda-bedakan pos pemasukan baitul mal. Tetapi alasan yang sepertinya masuk akal adalah karena dalam negara Islam sumber-sumber pemasukan tersebut biasanya dikeluarkan sesuai dengan karakteristiknya. Harta atau pendapatan yang diperoleh dari zakat umumnya didistribusikan dalam tingkat lokal dan dibagikan kepada kedelapan kelompok yang disebutkan secara jelas dalam Alqur'an. Pendapatan dari *ganīmah* diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi. Pendapatan yang diperoleh dari *kharāj*, *jizyah*, *'usyr*, dan *fai* digunakan membayar gaji pegawai, dana pensiun dan dana subsidi, dana operasional administrasi, kebutuhan militer dan pertahanan, serta pembangunan. Sedangkan pendapatan yang diperoleh melalui segala macam sumber dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.³²

Pemisahan pos-pos pendapatan tersebut juga merupakan satu usaha penertiban. Dengan dipisahkannya pendapatan tiap sumber, akan diketahui dengan jelas berapa persen kenaikan atau penurunan pendapatan keuangan negara. Hal ini penting karena ketika dana baitul mal telah disalurkan tetapi baitul mal mengalami surplus, surplus

³⁰ K. Ali, *A Study Of Islamic History*, (India: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1980), h.223

³¹ Hasanuzzaman, *Economic Functions of an Islamic State*, h. 190

³² Sabzwari, "Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Pemerintahan Rasulullah saw," h. 53

tersebut diteliti. Jika surplus terjadi pada *fai* maka surplus tersebut diberikan kepada orang-orang dalam bentuk pemberian. Apabila surplus terjadi dalam hal *kharāj* dan *jizyah*, maka surplus tersebut didepositkan untuk kemudian disalurkan jika terjadi peristiwa-peristiwa yang menimpa kaum muslimin. Dalam hal surplus *kharāj* dan *jizyah*, baitul mal dapat saja membebaskan masyarakat untuk membayar pajak tersebut. Jika surplus terjadi pada pos zakat, maka zakat tersebut disimpan untuk kemudian diberikan jika ditemukan asnaf yang berhak menerimanya³³

3. Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Penyusunan APBN oleh pemerintah Indonesia sesungguhnya dibangun dari sebuah paradigma tertentu. Penyusunan APBN yang dilakukan pemerintah direncanakan dan dibuat dalam rangka untuk mencapai tujuan politik ekonomi. Dalam teori ekonomi konvensional, kebijakan politik ekonomi ini dikenal dengan istilah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat didefinisikan sebagai kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (APBN). Kebijakan fiskal yang dapat diambil pemerintah dapat dikelompokkan dalam 3 pilihan kebijakan:

- a. Anggaran Defisit (Defisit Budget)/Kebijakan Fiskal Ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Kebijakan ini umumnya digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian, meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.

³³ An-Nabhani, *An-Nizām al-Iqtisād*, h. 255.

- b. Anggaran Surplus (Surplus Budget)/Kebijakan Fiskal Kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan anggaran surplus biasanya dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi ekspansif yang mulai memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan. Pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak ini dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.
- c. Anggaran Berimbang (Balanced Budget). Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan kebijakan anggaran berimbang ini adalah untuk mendapatkan kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin anggaran.³⁴

Melihat profil APBN yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, dari sisi penerimaan sesungguhnya APBN Indonesia selalu lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah dalam setiap periode anggaran. Dengan demikian APBN Indonesia sebenarnya tidak bisa dikatakan menganut anggaran berimbang (*balanced budgeted*), tetapi menganut kebijakan anggaran defisit (*defisit budget*). Ketidakharmonisan antara besarnya pendapatan dan pengeluaran pemerintah berimplikasi terhadap tidak adanya kesinambungan fiskal dimana terjadi ketidakseimbangan antara rasio penerimaan dan aset (atau utang) pemerintah untuk membiayai total pengeluaran pemerintah. Kondisi ini bisa mengakibatkan *budget deficit* atau kondisi dimana penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran serta mampu mengakibatkan gejolak ekonomi dalam masyarakat. Pemerintah biasanya mengatasi *budget deficit* dengan memaksa penerimaan negara melalui menaikkan pajak atau melakukan pinjaman dana baik kepada masyarakat melalui obligasi atau keluar negeri atau dengan mencetak uang.

³⁴ Iskandar Putong, *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h.318

Penerimaan APBN di Indonesia umumnya diperoleh dari penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN. Kenaikan target penerimaan pajak baik PPh orang pribadi, PPh badan, PPN, cukai dan pajak lainnya pada akhirnya akan kembali menjadi beban rakyat. Pasalnya, rakyat nanti harus bayar lebih banyak lagi. Di sisi lain penerimaan dari sumberdaya alam (SDA) diusulkan hanya Rp 130,95 T. Penerimaan SDA ini relative sangat kecil, karena Indonesia sesungguhnya sangat kaya dengan SDA. Sayangnya sistem pengelolaan SDA yang diserahkan kepada swasta bahkan asing sehingga negara hanya menerima pendapatan dalam bentuk PPh dan pajak lainnya, royalti serta bagi hasil akhir yang kecil akibat rekayasa cost recovery yang tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan.

Dalam Islam, pemerintah dilarang menarik pajak dari masyarakat. Islam memang membolehkan pemungutan *dharibah* (pajak) namun hanya diwajibkan ketika baitul mal tidak memiliki uang untuk membiayai pengeluaran yang mendesak yang jika tidak dibiayai dapat menimbulkan kemudharatan seperti pembiayaan jihad, pembiayaan industri militer, pembiayaan para fuqara, orang - orang miskin dan ibnu sabil, pembiayaan gaji, para pegawai yang bekerja untuk kemaslahatan kaum Muslim, pembiayaan untuk kemshlahatan umat, serta untuk keadaan darurat seperti bencana, maka kewajiban pembiayaan itu akan beralih kepada kaum Muslim. Konsep ini tentu berbeda dengan konsep pajak saat ini yang merupakan penerimaan utama, bersifat tetap, kontinu (terus-menerus), dipungut dari siapa saja tanpa membedakan kaya dan miskin.

Sebaliknya, *dharibah* dalam Islam hanya pelengkap, bukan pemasukan utama. *Dharibah* juga dipungut sewaktu-waktu (temporer), tidak kontinu dan tidak tetap. Pajak hanya diwajibkan berdasarkan pada besarnya kebutuhan dan kemampuan memenuhi pembelanjaan negara. Dalam keadaan normal, pajak (*dharibah*) sesungguhnya

tidak diperlukan. Pajak tidak boleh dipaksakan pengambilannya melebihi kesanggupan, atau melebihi kadar harta orang-orang kaya atau berusaha menambah pemasukan Baitul Mal. Negara tidak boleh mewajibkan pajak tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Demikian pula negara tidak boleh mewajibkan pajak dalam bentuk keputusan pengadilan, atau untuk pungutan biaya di muka (dalam urusan administrasi) negara. Negara juga tidak boleh mewajibkan pajak atas transaksi jual beli tanah, pengurusan surat – suratnya, gedung – gedung, atau timbangan atas barang dagangan. Dengan mewajibkan berarti telah berlaku zhalim dan ini dilarang.

Dalam Islam, baitul mal sebagai lembaga keuangan negara memiliki sumber-sumber pemasukan atau pendapatan. Pada masa-masa awal Islam khususnya pada masa khalifah Umar bin Khattab, pendapatan baitul mal diperoleh melalui zakat, *ganīmah*, *kharāj*, *jizyah*, dan *‘usyr*. Hanya saja di antara pendapatan tersebut zakat diletakkan dalam kas khusus baitul mal, serta tidak didistribusikan kepada selain delapan asnaf yang telah disebutkan dalam QS 9:60. Sumber pendapatan baitul mal pada masa Umar bin Khattab tersebut terus berlanjut sampai dengan masa kemunduran Islam.³⁵

Sumber-sumber penerimaan dalam APBN Islam sangat berbeda dengan APBN konvensional. Sebab, sumber penerimaan dalam Islam tidak mengandalkan sektor **pajak** dan utang, namun bersumber dari: (1) *sektor kepemilikan individu*, seperti sedekah, hibah, zakat dan sebagainya. (2) *Sektor kepemilikan umum* seperti pertambangan, minyak bumi, gas, kehutanan dan (3) *Sektor kepemilikan negara*, seperti: *jizyah*, *kharaj*, *ghanimah*, *fa’i*, dan *‘usyur*. Ketiga sumber penerimaan negara tersebut selanjutnya dapat dikelompokkan lagi ke dalam seksi-seksi. Misal: dari kepemilikan individu dibagi ke dalam seksi zakat perdagangan; seksi zakat pertanian dan buah-buahan; seksi zakat ternak unta, sapi dan kambing. Dari kepemilikan umum: seksi minyak dan gas; seksi listrik;

³⁵ K. Ali, *A Study Of Islamic History*, h. 220. Lihat juga Surtahman Kastin Hasan, *Ekonomi Islam* (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1990), h. 72. Ulasan lebih lanjut tentang kebijakan ekonomi Umar bin Khattab baca Qutb Ibrahim Muhammad, *As-Siyāsah al-Māliyah Li ‘Umar bin Khattab*, terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000)

seksi pertambangan; seksi sungai; laut, perairan dan mata air; seksi hutan dan padang rumput; seksi tempat khusus. Dari kepemilikan negara: seksi *ghanimah*; seksi *kharaj*; seksi tanah; seksi *jizyah*; seksi *fa'i*; seksi *dharibah* (**pajak**). Apabila sumber penerimaannya sudah mencukupi, negara tidak perlu memungut **pajak** (*dharibah*) dari rakyat. Pemungutan **pajak** hanya dilakukan apabila anggaran negara dalam kondisi defisit. Pemungutan **pajak** tersebut hanya bersifat sementara (temporal) dan hanya dibebankan atas warga negara yang mampu saja.

Menurut Hasanuzaman, pendapatan baitul mal secara umum terbagi dua yaitu sumber-sumber pendapatan yang sifatnya permanen dan sumber pendapatan yang bersifat temporer. Sumber pendapatan permanen yaitu pendapatan baitul mal yang dikumpulkan pada masa-masa tertentu dalam setahun yang terdiri dari zakat, *kharāj*, *jizyah*, dan '*usyr*, sedangkan sumber pendapatan temporer adalah pendapatan baitul mal yang diperoleh tidak berdasarkan masa-masa tertentu tetapi tergantung pada keberadaan sumber pendapatan tersebut seperti *ganīmah*, wakaf, hadiah, kafarat, dan sedekah. Tetapi karena sumber utama baitul mal berasal dari zakat, *ganīmah*, *kharāj*, *jizyah*, dan '*usyr*, maka dalam tulisan ini pendapatan baitul mal penulis kategorikan menjadi sumber pendapatan primer yang terdiri dari zakat, *ganīmah*, *kharāj*, *jizyah*, dan '*usyr*, dan sumber pendapatan sekunder yang terdiri dari wakaf, hadiah, kafarat, sedekah, dan sumber-sumber lainnya

1. Sumber Pendapatan Primer

a. Zakat

Zakat merupakan sumber pendapatan utama dalam struktur keuangan negara Islam. Secara harfiah, zakat berarti: tumbuh; berkembang; subur atau bertambah. Sedangkan menurut pengertian syara', zakat berarti mengeluarkan kadar tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.³⁶

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), Juz II, h. 729. Secara teknis, para fuqaha memberikan definisi yang berbeda. Tetapi secara umum, definisi-definisi tersebut mengacu pada definisi seperti di atas. Lihat misalnya Ibn Qudamah, *Al-Mugni* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), Jilid II, h. 427.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan alat atau tindakan pentransferan sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan orang yang membutuhkan.³⁷ Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomi, misalnya seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk konsumsi maupun produksi. Dengan demikian zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa pula mempunyai arti ekonomi.

Laksanakan salat dan tunaikan zakat merupakan tema yang kerap kali muncul dalam Alqur'an. Setidaknya ada 27 kali pesan Alqur'an yang menyebutkan salat dan zakat secara berpasangan.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa zakat ibadah *māliyah ijtīmā'iyah* yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat yang dikenakan kepada umat Islam yang tidak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan apapun. Secara moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan dan melatih sikap zuhud, yaitu kesadaran sepenuhnya bahwa manusia pada hakikatnya tidak mempunyai apa-apa, karena apa pun yang diperoleh sesungguhnya merupakan amanat Allah SWT. Secara sosial, zakat merupakan alat untuk mengikis dan menghapus kemiskinan masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab yang mereka miliki. Sedangkan secara ekonomi, zakat mencegah penumpukan modal dalam tangan segelintir orang.

Tidak semua orang muslim dikenakan zakat, hanya orang-orang yang memenuhi kriteria yang dikenakan kewajiban tersebut. Adapun kriteria para wajib zakat adalah:

Bandingkan dengan Ibn Abidin, *Hāsyiyah Radd al-Mukhtār* (Kairo: Al-Halabi, 1966), Juz II, h. 256-57.

³⁷ M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam* (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995), h. 6

³⁸ *Ibid*

- 1) Merdeka. Menurut ijmak, zakat tidak diwajibkan atas hamba karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya.
- 2) Islam. Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- 3) Balig dan berakal. Balig dan berakal, keduanya dianggap sebagai syarat wajib zakat dalam pandangan mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah salat dan puasa. Berbeda dengan mazhab Hanafi, jumhur ulama tidak menjadikan balig dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, yang dikeluarkan oleh walinya.³⁹

Seperti halnya orang yang dikenakan zakat, tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya. Alqur'an tidak memberikan ketegasan tentang jenis harta yang wajib zakatnya dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besaryang harus dizakatkan. Persoalan tersebut diserahkan kepada Rasulullah saw, yang kemudian dijabarkan oleh para fukaha. Menurut pendapat para fukaha, syarat-syarat agar harta dapat dijadikan sebagai objek zakat adalah:

- 1) Milik penuh.

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki dan dikuasai secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan syariat Islam seperti usaha, warisan, pemberian, dan cara-cara lain yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara

yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya.

2) Berkembang

Yang dimaksud dengan berkembang adalah harta yang menjadi objek zakat dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan atau kalau berupa binatang, ditenakkan. Atas dasar ini, zakat tidak wajib dikeluarkan dari mutiara, intan, barang tambang selain emas dan perak, barang-barang yang dipakai, harta milik pokok, tempat tinggal, kuda, keledai, khimar, anjing, madu, perabot-perabot kerja, buku-buku ilmu pengetahuan, kecuali jika diperdagangkan.

3) Mencapai nisab.

Nisab merupakan garis pemisah yang memisahkan kebutuhan dasar hidup dengan kemewahan, yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain dan berubah setiap waktu. Nisab ditetapkan sebagai standar hidup yang dapat diterima, yang meliputi semua kebutuhan hidup yang layak dalam masyarakat tertentu dan pada periode ekonomi tertentu pula. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Suatu harta/kekayaan telah dikatakan melebihi nisab jika: melebihi dari kebutuhan pokok dan bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi nisab yang harus dibayar pada waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat.

4) Mencapai *haul* (satu tahun)

Yang dimaksud dengan *haul* adalah harta-harta yang menjadi objek zakat sudah berada dalam kepemilikan seseorang selama satu tahun. Namun, *haul* hanya disyaratkan pada emas, perak, harta perdagangan, dan binatang ternak,

sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak disyaratkan *haul*.

- 5) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁰

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta-harta yang digolongkan dalam kategori berikut:

- a) *Nuqūd* (emas, perak, dan uang). Emas dan perak merupakan harta yang memiliki nilai jual sangat tinggi sehingga dapat menjadi sumber modal untuk pembangunan. Emas dan perak yang disimpan wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2,5%. Nisab untuk emas adalah 20 dinar, lebih kurang 96 gram sedangkan untuk perak 200 dirham, kurang lebih sama dengan 672 gram.⁴¹ Sedangkan uang yang dizakatkan harus disesuaikan dengan harga emas karena emas merupakan benda yang pertama sekali dijadikan sebagai alat tukar.
- b) Tanaman, termasuk dalam hal ini adalah buah-buahan dan biji-bijian. Tanaman yang dikeluarkan zakatnya menurut jumhur ulama adalah tanaman yang mengenyangkan, bisa ditakar, dan tahan lama. Zakatnya bervariasi yaitu 5%-10%. Untuk tanaman yang diairi dengan menggunakan irigasi, zakatnya sebesar 5% sedangkan untuk tanaman yang tadah hujan, besarnya 10%. Adapun nisab zakat tanaman adalah 700 kg yang dikeluarkan setiap kali melaksanakan panen.
- c) Binatang ternak. Zakat binatang ternak hanya diwajibkan atas unta, lembu/kerbau, dan kambing. Nisab unta 5 ekor, lembu/kerbau 30 ekor dan nisab

⁴⁰ *Ibid.*, h. 740-750.

⁴¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 45.

kambing 40 ekor. Selain telah mencapai jumlah nisab tersebut, bagi binatang ternak diwajibkan adanya haul (telah satu tahun dipelihara). Binatang-binatang lain menurut jumhur ulama tidak dikenakan zakat, tetapi apabila binatang-binatang tersebut diperdagangkan maka pemilik ternak wajib mengeluarkan zakatnya sebagai zakat perniagaan.

- d) Harta Perdagangan. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan adalah 2,5%, sedangkan nisabnya menurut jumhur ulama bisa disesuaikan dengan nisab emas atau perak. Ketika perdagangan telah berjalan selama setahun (*haul*), uang dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah tersebut jika jumlah uang dan barang yang ada mencapai nisab perak tetapi tidak mencapai nisab emas maka harta perdagangan tersebut dihitung sesuai dengan nisab perak, dan ketika harta perdagangan telah mencapai nisab emas, maka zakat harta perdagangan harus disesuaikan dengan nisab emas.
- e) Harta temuan (*rikaz*). Harta temuan (selain emas dan perak) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%, tanpa melihat apakah harta temuan itu telah mencapai nisab atau haul.⁴²

Selain kelima komoditas di atas, dalam wacana fikih kontemporer juga dikenal zakat profesi. Zakat Profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti: upah kerja rutin, profesi dokter, gaji pegawai negeri, pengacara, arsitek, dan lain-lain.⁴³ Penghasilan yang diperoleh wiraswastawan atau profesional tersebut dikenal dalam fikih dengan istilah *al-māl*

⁴² Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*, h. 759-801. Lihat juga Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 73 – 146

⁴³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 58 – 59.

al-mustafād.⁴⁴

Al-māl al-mustafād seperti disebutkan di atas wajib dikeluarkan zakatnya begitu diterima, meskipun kepemilikannya belum mencapai setahun, berdasarkan pendapat sebagian sahabat (Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan Mu'awiyah), sebagian tabi'in (az-Zuhri, Hasan al-Basri, dan Makhul), serta pendapat Umar bin Abdul Aziz, Baqir, Sadiq, Nasir, dan Dawud Zahiri.⁴⁵ Besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah seperempat puluh. Jika seorang Muslim mengeluarkan zakat atas pendapatan profesi atau pekerjaannya ketika dia menerimanya, dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun. Dengan begitu, akan terjadi kesamaan antara pendapatan yang diperoleh melalui profesi-profesi seperti itu dan penghasilan para petani yang diharuskan mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan ketika mereka memetik dan memanen tanamannya.⁴⁶

Selain zakat terhadap harta-harta yang disebutkan di atas yang dalam istilah fikih disebut dengan zakat harta, dalam Islam juga dikenal zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Setiap muslim yang mempunyai kelebihan nafkah pada malam idul fitri, wajib mengeluarkan zakat fitrahnya sebagai tanda telah selesai melaksanakan ibadah puasa. Zakat fitrah, selain untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari idul fitri, juga dimaksudkan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadan. Adapun besarnya zakat yang dikeluarkan adalah 1 *sa'*, dan harus dibayarkan sebelum pelaksanaan salat idul fitri dimulai.⁴⁷

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan QS 9: 60 adalah fakir, miskin, 'amil, muallaf, orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan musafir.

⁴⁴ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 865.

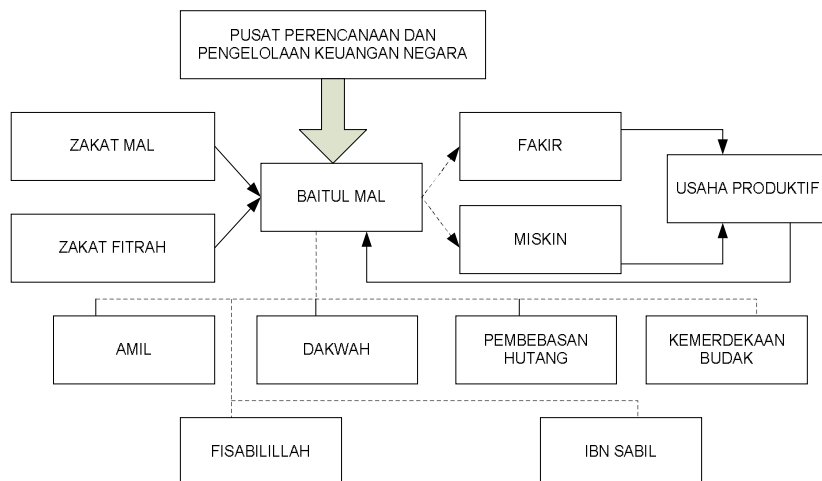
⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid.*, h. 900-901. Menurut Daud Ali, 1 *sa'* sama dengan 2,5 kilogram. Lihat Muhammad Daud Ali, *Ekonomi Islam*, h. 49.

Empat di antara delapan kategori penerima zakat (santunan terhadap orang-orang fakir, miskin, berhutang, dan musafir) disalurkan dalam hubungannya dengan jaminan sosio-ekonomik. Kategori kelima (*fisabilillah*) bersifat umum, yaitu mencakup semua kegiatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan baik atau menguntungkan untuk Islam. Kategori keenam (*muallaf*) dimaksudkan untuk meningkatkan moral dan perilaku individu-individu yang lemah yang mempunyai kecendrungan agresif. Kategori ketujuh (budak yang dijanjikan kemerdekaannya) merupakan penterjemahan ke dalam tindakan nyata dari pemahaman dan kebebasan pribadi yaitu menggunakan zakat untuk membebaskan budak. Sedangkan kategori kedelapan (*amil*) adalah pendanaan kegiatan penyelenggaraan zakat dan para penyelenggaranya.⁴⁸

Pola pendistribusian zakat seperti di atas menunjukkan bahwa zakat mengandung aspek sistematis dan lestari dalam pengalihan modal dan keterampilan. Jika digambarkan, struktur proses distribusi tersebut adalah sebagai berikut:



⁴⁸ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnun Husein, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 83

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa distribusi zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan dalam QS 9: 60. Sekalipun ada delapan kelompok penerima zakat, baitul mal sebagai lembaga pengumpul dan penyalur zakat dapat mendistribusikan zakat pada satu atau beberapa kelompok penerima zakat saja yang dipandang sangat membutuhkan. Baitul mal juga dapat menggunakan dana zakat untuk kemaslahatan yang berhubungan dengan kelompok penerima zakat, dan memiliki kewenangan untuk menentukan skala prioritas pendistribusian zakat. Jika pemerintah pusat memerlukan dana yang cukup besar untuk memperbaiki taraf kehidupan orang-orang fakir dan miskin yang berada di pusat, zakat yang dikumpulkan dari wilayah dapat ditarik ke pusat, atau sebaliknya.⁴⁹

b. *Kharāj (Land-Tax)*

Kharāj adalah pajak atas tanah pertanian atau pajak hasil bumi. Yaitu merupakan pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Menurut Mannan, *kharāj* adalah sejenis pajak yang dikenakan atas tanah, terutama tanah-tanah yang diperoleh melalui penaklukan, terlepas dari apakah si pemilik seorang yang di bawah umur, dewasa, merdeka, atau budak.⁵⁰

Dalam penaklukan, jika tanah yang dikelola dan kebun yang dimiliki non muslim jatuh ke tangan orang muslim akibat kalah dalam pertempuran aset tersebut menjadi milik orang muslim. Oleh karena itu siapapun yang ingin mengelola aset tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharāj*. Tetapi jika konfrontasi antara muslim dan

⁴⁹ Kebolehan untuk memberikan zakat pada satu atau beberapa kelompok penerima zakat saja ini dikemukakan oleh jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, bahkan menurut mereka memprioritaskan pemberian zakat kepada kelompok yang membutuhkan sangat dianjurkan dalam Islam. Lihat al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*, h. 866

⁵⁰ M. A. Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice A Comparative Study* (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I, 1980), h. 277

non muslim berakhir dengan damai, maka mereka membuat perjanjian damai untuk menentukan apakah lahan yang diolah tetap menjadi milik orang kafir atau diserahkan kepada orang muslim. Jika orang kafir memilih untuk tetap mempertahankan asetnya maka mereka membayar *kharāj* yang memiliki karakteristik pajak dan bukan sewa, karena tanah tersebut tetap menjadi miliknya, sedangkan apabila tanah tersebut diserahkan kepada orang muslim, pajak tanah yang ditarik dipandang sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.⁵¹

Jika tanah atau kebun buah jatuh ke tangan pasukan muslim tanpa melalui konfrontasi ataupun pertempuran maka tanah tersebut dianggap sebagai barang rampasan dan berada dalam kepemilikan Rasulullah saw. Jika Rasulullah saw wafat, tanah tersebut kepemilikannya jatuh ke tangan ahli waris Rasulullah saw, tetapi apabila pemerintah memandang tanah tersebut sangat diperlukan untuk membangun negara, pemerintah dapat menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan kaum muslimin.⁵²

Kharāj dapat dipungut melalui dua cara yaitu menurut perbandingan (*muqasimah*) dan *kharāj* tetap (*wazifah*). *Kharāj* menurut perbandingan adalah pajak yang diambil dari hasil panen, misalnya dengan mengambil separuh, sepertiga, atau seperempat bagian dari seluruh hasil panen. Rasulullah pernah menetapkan pajak perbandingan ini atas tanah Fadak yang jatuh ke tangan Rasulullah saw dalam pertempuran di Khaibar. Saat itu, ketika pemilik lahan menyaksikan kekalahan orang-orang Yahudi, mereka menyerah tanpa perlawanan dan meninggalkan tanah mereka. Tetapi seperti kaum Yahudi lainnya di Khaibar, mereka meminta izin agar mereka dapat tetap tinggal di tanah mereka, dan sebagai imbalannya, mereka setuju menyerahkan sebagian hasil kebun mereka kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw kemudian mengambil sepersepuluh dari hasil panen tanaman yang dianggap

⁵¹ Karim Sadr, "Uang dan Kebijakan Moneter Pada Periode Awal Islam," h. 79

⁵² Ibn Hakam, *Sīrah 'Umar bin 'Abdul 'Azīz 'alā mā Rawāh al-Imām Mālik bin Anas wa Ashābih*. (Mesir: Maktabah Rabi', t.t), h. 56.

sebagai pembayaran pajak atas tanah tersebut. Sedangkan *kharāj* tetap adalah pajak yang wajib dikeluarkan atas tanah, baik tanah itu dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Umar bin Khattablah yang pertama sekali berinisiatif mewajibkan pajak jenis ini. Umar mewajibkan pajak sebesar satu dirham atas tanah yang layak tanam yang luasnya sekitar 60 hasta.⁵³ *Kharāj* menurut perbandingan biasanya dipungut pada setiap kali panen, sedangkan *kharāj* tetap wajib setelah berlalu satu tahun.⁵⁴

Penetapan *kharāj* harus memperhatikan kandungan tanah, sebab ada 3 hal berbeda yang sangat berpengaruh, yaitu

- 1) Jenis tanah. Jika tanahnya bagus maka tanamannya akan subur dan hasilnya lebih baik dari tanah yang buruk
- 2) Jenis tanaman. Tanaman ada yang harganya tinggi dan ada juga yang rendah, jadi tanaman juga menentukan harga. Dalam hal ini yang juga tidak boleh untuk diabaikan adalah hasil panen akhir sebab kadang-kadang terkena hama atau dimakan binatang.
- 3) Jenis irigasi. Tanah yang diirigasi dengan sistem irigasi air yang dipikul hewan atau dengan kincir (pengelolaan dengan biaya tinggi) tidak dapat disamakan dengan tanah yang disirami air hujan dikelola dengan biaya rendah.⁵⁵

Selama kualitas tanah tetap sama dengan cara pengairan (irigasi) dan keuntungannya, maka pajaknya tidak bertambah atau berkurang. Tetapi bila gangguan pada cara irigasi disebabkan faktor alam dan merugikan pengolah, maka negara harus megusahakan perbaikan dan pemilik tanah tidak dikenai kewajiban *kharāj* selama tanah tidak dapat ditanami. Bila sistem irigasi tetap sama tetapi panen musnah karena beberapa faktor di luar kemampuan pemilik, maka ia tidak dikenakan *kharāj*. Tetapi

⁵³ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*, h. 823.

⁵⁴ Mannan, *Islamic Economics*, h. 277.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 277.

jika pemilik tidak memiliki itikad baik untuk membayar *kharāj*, maka ia harus dipaksa untuk membayar pajak.⁵⁶

Selain tanah yang dikenakan *kharāj*, ada juga tanah yang dikenakan '*usyr*' yang disebut dengan tanah '*usyūriyah*' yaitu tanah-tanah yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh. Abu Yusuf menjelaskan tentang perbedaan tanah yang dikenakan *kharāj* dengan tanah yang dikenakan '*usyūr*'. Menurutinya, setiap tanah yang pemiliknya masuk Islam adalah tanah '*usyūr*', seperti tanah Madinah ketika mereka masuk Islam, juga tanah penyembah berhala dari orang-orang Arab, dan setiap tanah yang tidak diterima *jizyah*-nya dengan tanah '*usyūr*'. Sedangkan tanah *kharāj* adalah tanah yang tetap dibiarkan pada pemiliknya, tetapi jika tanah tersebut dibagi-bagikan kepada orang yang berhasil mendapatkannya pada saat terjadi pertempuran, maka tanah tersebut menjadi tanah '*usyūr*'.⁵⁷

Menurut Umar bin Abdul Aziz '*usyr*' tidak dipungut kecuali dari *ahl hars* yaitu orang-orang yang memiliki hasil bumi dari berladang karena *ahl hars* memang diambil zakatnya. Menurutinya orang yang diambil *jizyah*-nya ada tiga macam: pemilik bumi memberikan *jizyah* dari hasil buminya; pekerja mengeluarkan *jizyah* dari hasil kerjanya; sedangkan pedagang mengeluarkan *jizyah* dari profit perdagangannya. Hukum untuk mereka adalah satu, sedangkan kaum muslimin, wajib mengeluarkan zakat hartanya. Jika kaum muslimin telah memberikan zakat itu kepada baitul mal, maka mereka dibebaskan dari '*usyūr*' yang telah ditetapkan⁵⁸

⁵⁶ Hasanuzzaman, *Economic Functions of an Islamic State*, h. 161

⁵⁷ Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim, *Kitāb al-Kharāj* (Raudah: Matba'ah as-Salafiyah, t.t), h. 69.

⁵⁸ Ibn Hakam, *Sīrah 'Umar bin 'Abdul 'Azīz*, h. 100.

c. Jizyah (Poll-tax)

Sumber keuangan negara Islam yang lainnya adalah *jizyah*. *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan atas orang-orang *zimmi* atau orang-orang non muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam tetapi tidak mau masuk Islam. Pajak yang dikenakan atas mereka merupakan kompensasi atas fasilitas ekonomi, sosial, dan layanan kesejahteraan yang mereka terima dari pemerintahan Islam juga sebagai jaminan dan keamanan hidup dan harta mereka.⁵⁹ *Jizyah* juga sebagai alat penyeimbang kewajiban mengeluarkan zakat yang dikenakan kepada orang Islam. *Jizyah* disebut juga dengan pajak kepala (*poll-tax*)⁶⁰ *Jizyah* diwajibkan berdasarkan QS 9 : 29 yang menyatakan:

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*⁶¹

Berdasarkan ayat ini, ada yang berpendapat bahwa *jizyah* dibebankan sebagai sewa untuk tinggal di negara muslim dan

⁵⁹ Karim Sadr, "Uang dan Kebijakan Moneter Pada Periode Awal Islam," h. 95. Lihat juga Mannan, *Islamic Economics*, h. 275. Pernyataan yang sama mengenai *jizyah* juga dikemukakan H.A.R. Gibb dalam *The Fiscal Rescript of Umar II*, Arabica 2 (1955) sebagaimana yang dikutip oleh Cori, *Natives of the conquered lands were given the choice of whether or not to submit to Allah, and many chose not to. Those who chose to remain their own faith (Christian, Jewish, etc.) became known as the dhimmi, or "protected ones". The dhimmi were forced to pay a jizya, or poll tax. If one chose to convert to Islam, the tax was waived. Therefore, submission to Allah's will was the deciding factor in how taxes were imposed. By paying the tax, the dhimmi were treated as everyday citizens. "Whether Christian or Jew or Magian, of those who are now subject to the jizya...shall enjoy all the privileges of the Muslims and shall be subject to all duties laid upon them."* (p. 3) *The dhimmi were protected by the jizya, and were able to remain whatever faith they chose..*" (p. 6). Lihat Cori, *The Fiscal Rescript of Umar II*, dalam <http://www.gotessays.com>

⁶⁰ Surtahman Kastin Hasan, *Ekonomi Islam*. (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1990), h. 74.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), h. 282.

hukuman atas keyakinan mereka.⁶² Tetapi menurut Mannan asumsi tersebut kurang tepat karena *jizyah* hanya diwajibkan kepada laki-laki yang telah balig (dewasa) karena kaum laki-lakilah yang biasanya berperang.. Sedangkan wanita, anak-anak, orang miskin, orang tua, orang sakit yang tidak sembuh, orang cacat serta lemah, orang buta, gila, pendeta, perempuan, anak-anak, dan hamba, anggapan ini dapat ditepis. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya *jizyah* adalah kesejahteraan rakyat yang ada dalam negara Islam.⁶³

Adapun besarnya standar *jizyah* yang harus tidak ada ketetapan yang baku, terserah kepada kebijakan kepala pemerintahan dan kemampuan membayar dari orang *zimmī*. Rasulullah misalnya menetapkan jumlah *jizyah* untuk penduduk Yaman sebesar 1 dinar, sedangkan Umar bin Khattab menetapkan 2 dinar untuk setiap laki-laki dewasa di Mesir. Tetapi setelah kemenangan kaum muslimin diberbagai negara, Umar bin Khattab kemudian menetapkan standar *jizyah* yaitu:

- 1) 48 dirham pertahun atau 4 dirham perbulan untuk orang-orang kaya yaitu orang-orang yang berpenghasilan tinggi seperti dokter, pengusaha, dan kolektor barang antik.
- 2) 24 dirham pertahun atau 2 dirham perbulan untuk orang-orang yang berpenghasilan menengah
- 3) 12 dirham pertahun atau 1 dirham perbulan untuk orang-orang miskin yang bekerja, yaitu yang berpenghasilan minim seperti penjahit, penenun, penjual minuman, dan semacamnya⁶⁴

⁶² Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nizām al-Iqtisād*, h. 259

⁶³ Mannan, *Islamic Economics*, h. 275. Lebih lanjut Mannan mengatakan bahwa memandang *jizyah* sebagai hukuman tidak tepat karena kepatuhan (tunduk) yang disebutkan pada akhir ayat tersebut adalah bentuk kepatuhan orang kafir terhadap aturan hukum Islam, sehingga orang tidak dapat digolongkan *zimmī* kecuali dengan syarat tunduk kepada hukum Islam. Di samping itu penggunaan kekerasan untuk memaksa keyakinan beragama kepada orang lain jelas dilarang oleh Alqur'an.

⁶⁴ Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharāj*, (Raudah: Matba'ah as-Salafiyah, t.t), h. 122. Lihat juga Hasan, *Ekonomi Islam*, h. 74–75, juga Mannan, *Islamic Economics*, h. 275.

Disamping itu ada satu lagi bentuk *jizyah* yang dikenakan kepada orang kafir yaitu *jizya as-sulhu* atau pajak perlindungan. Tingkatnya berbeda sesuai dengan persetujuan dan perjanjian yang dilakukan. *Jizyah* ini berbentuk upeti. Negara Islam bertanggungjawab memberi perlindungan terhadap negara dan rakyat yang membayar *jizyah* model ini.⁶⁵ *Jizyah* wajib diambil dari orang-orang *zimmi* selama mereka tetap dalam kekafirannya, namun apabila mereka memutuskan untuk memeluk Islam, kewajiban membayar *jizyah* tersebut gugur.

d. 'Usyr (bea cukai)

'*Usyr* atau bea cukai adalah pajak atas barang-barang komoditas yang masuk ke negara Islam. Pajak ini belum dikenal pada masa Nabi saw dan Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattablah yang pertama sekali memperkenalkan pajak ini dalam sistem keuangan Islam.⁶⁶

Umar bin Khattab menetapkan '*usyr* atas barang-barang komoditas yang dibawa oleh pedagang non muslim dikarenakan para pengusaha muslim ketika masuk ke tanah musuh dikenakan bea cukai ('*usyr*) atas barang-barang mereka, maka dalam rangka penerapan perlakuan yang sama, Umar bin Khattab mengenakan pajak atas barang dagangan yang dibawa masuk pengusaha non muslim ke negara Islam.

Penetapan '*usyr* diberlakukan oleh Umar bin Khattab dilatarbelakangi surat Abu Musa al-Asy'ari yang menulis, para pedagang muslim dari kami, ketika masuk ke tanah musuh dikenakan '*usyr* atas barang-barang mereka. Lalu Umar menulis surat jawaban, "ambillah dari mereka sebagaimana mereka telah mengambilnya dari kaum muslimin. Ambillah dari orang-orang *zimmi* setengahnya dari 1/10. Sedangkan untuk kaum muslimin

⁶⁵ Hasan, *Ekonomi Islam*, h. 75.

⁶⁶ Qutb Ibrahim Muhammad. *As-Siyāsah al-Māliyah Li 'Umar bin Khattab*. Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 99

pada setiap 40 sampai 200 dirham, tidak dikenakan apa-apa. Tetapi kalau mencapai 200 dirham dikenakan 5 dirham. Adapun yang lebih dari jumlah itu, maka dihitung menurut hitungan yang telah ditetapkan.⁶⁷

'*Usyr*' dikenakan atas harta perdagangan sedangkan selain barang dagangan tidak dikenakan pajak '*usyr*'. '*Usyr*' juga hanya dikenakan kepada pedagang non muslim baik, harbi atau pun *zimmī*. Walaupun demikian ada perbedaan jumlah pajak yang dikenakan terhadap *harbi* dan *zimmī*. Untuk kafir harbi, dikenakan 10% dari barang yang dagangan yang dia bawa untuk diperdagangkan, cukai impor bagi kafir *zimmī* adalah 5% sedangkan bagi pedagang muslim dikenakan zakat sebesar 2,5% jika komoditas perdagangannya mencapai nisab zakat yaitu 200 dirham, tetapi jika tidak sampai 200 dirham tidak dikenakan pajak apapun, sekalipun dia datang dengan membawa komoditas perdagangan yang sama. Sedangkan komoditas yang diperdagangkan oleh pengusaha muslim dari satu negara Islam ke negara Islam lainnya haram dipungut bea cukainya.⁶⁸

e. Harta Rampasan Perang (*Ganimah* dan *Fai*)

Harta rampasan perang merupakan salah satu pendapatan negara Islam yang terus berkurang. Pendapatan ini terus bertambah selama masa ekspansionis Islam, karena itu secara teknis, barang rampasan perang adalah harta benda yang diambil dengan kekerasan selama masa perang. Sebelum Islam, tentara yang menang atau kepala suku biasanya menyimpan seluruh barang rampasan dalam perang, tetapi berangsur-angsur Islam merubah sikap mental tentara muslim. Islam membatasi tuntutan tentara penakluk pada empat perlima dari seluruh hasil rampasan perang dengan menahan seperlima bagian untuk kesejahteraan

⁶⁷ Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharāj*, h. 135.

⁶⁸ Qutb Ibrahim Muhammad, *As-Siyāsah al-Mālīyah*, h. 102. Lihat juga Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharāj*, h. 132-133

masyarakat. Hal ini berdasarkan QS 8 : 4 yang menyatakan: “ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah swt, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir.”

Harta rampasan perang terdiri dari empat jenis yaitu:

- 1) Tentara yang ditawan
- 2) Perempuan dan anak-anak yang ditawan
- 3) Tanah
- 4) *Salb* atau harta yang diperoleh seorang tentara Islam dalam pertempuran, baik berupa pakaian, senjata, maupun kuda yang ditungganginya.⁶⁹

Perempuan dan anak-anak boleh dibagikan tetapi tidak harus dibunuh, tanah yang ditinggalkan menjadi milik negara, sedangkan tanah yang tuannya terbunuh 4/5 dari tanah tersebut menjadi milik pejuang Islam atau milik pembunuh, atau boleh menjadi milik negara sedangkan 1/5 menjadi milik baitul mal. Sedangkan barang-barang lain seperti senjata menjadi milik pejuang Islam.⁷⁰

Adapun metode pembagian harta rampasan perang adalah 4/5 untuk pasukan atau tentara Islam yang dirinci menjadi 2 bagian untuk pasukan berkuda, 1 bagian untuk pasukan yang berjalan kaki, dan 1 bagian untuk penunjuk jalan, perawat, dan kaum wanita yang ikut membantu di medan perang. 1/5 bagian Rasul sesuai dengan ketentuan QS 8:4 dikeluarkan untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir. Namun, setelah Rasul wafat, Umar bin Khattab memasukkan bagian Rasul ke dalam baitul mal, demikian juga bagian untuk kerabat Rasul dengan pertimbangan bahwa Rasulullah ketika wafat tidak memberikan warisan untuk kerabat-kerabatnya. Walaupun

⁶⁹ *Ibid*, h. 120. Lihat juga Hasan, *Ekonomi Islam*, h. 75

⁷⁰ *Ibid*.

demikian, kerabat Rasul masih berhak mendapatkan warisan jika mereka tergolong kepada anak yatim, orang miskin, dan musafir.⁷¹ *Fai* adalah harta yang diperoleh dengan jalan damai. Untuk harta-harta yang tidak bergerak seperti tanah pembagiannya fleksibel seperti halnya *ganīmah*. Tetapi untuk barang-barang bergerak harta tersebut hendaknya diwakafkan dan hasilnya dibelanjakan untuk kepentingan orang Islam.⁷²

Distribusi *ganīmah* seperti yang dilakukan Umar bin Khattab, terus berlanjut sampai kepada masa Ali bin Abi Talib. Tetapi pada masa Umayyah, distribusi *ganīmah* mengalami pergeseran dan sering sekali dipengaruhi oleh keinginan untuk menyenangkan gubernur atau khalifah yang memimpin. Gubernur Ziyad misalnya memerintahkan komandannya di Khurasan untuk mengambil seluruh emas dan perak yang diperoleh melalui *ganīmah*. Demikian juga Musa bin Nusair mengambil sebagian besar harta *ganīmah* untuk menyenangkan khalifah dari pada mendistribusikannya kepada para tentara yang berperang.⁷³

Umar bin Abdul Aziz kemudian meluruskan praktek distribusi *ganīmah* seperti masa *khulafaurrasyidin*. Ia mendistribusikan *ganīmah* untuk orang yang berperang dan orang-orang yang ikut membantu perang, pembawa pesan, tukang pos, dan agen (*wakil*) yang dikirim dari pasukan dan memberikan 1/5 bagian untuk kerabat Rasul kepada Bani Hasyim yang telah dihentikan oleh Muawiyah.⁷⁴

Sedangkan distribusi *fai*, menurut Umar bin Abdul Aziz mirip dengan distribusi *ganīmah*. Dengan merujuk pada QS 59 : 7 yang menyatakan bahwa harta rampasan perang (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah swt, Rasul, kerabat Rasul, anak-

⁷¹ Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharāj*, h. 18 – 19.

⁷² *Ibid*

⁷³ Hasanuzzaman, *Economic Functions of an Islamic State*, h. 159.

⁷⁴ *Ibid*. Lihat juga Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharāj*, h. 19.

anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan,⁷⁵ dan pendapat Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa harta *fai* harus disalurkan kepada rakyat karena dalam *fai* terdapat hak anak yatim, fakir miskin, dan ibn sabil. Adapun besarnya harta yang dikeluarkan untuk mereka sebesar seperlima. Karena kesamaan *fai* dengan *ganimah*, Umar bin Abdul Aziz menyatukan harta *ganimah* dan *fai* menjadi satu rekening, dan tidak dipisah-pisahkan dan dijadikan sebagai harta *fai*. Tujuan tindakan ini menurutnya adalah agar tidak terjadi akumulasi modal pada kelompok borjuis saja.⁷⁶

2. Sumber Pendapatan Sekunder

Sumber-sumber sekunder pendapatan baitul mal sangat banyak dan mencakup segala sumber pendapatan yang halal yang dibenarkan oleh *syara'*. Beberapa di antara sumber pendapatan sekunder baitul mal adalah sebagai berikut:

a. Wakaf

Wakaf yaitu aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya dinikmati oleh masyarakat.⁷⁷ Wakaf sebagai sumber pendapatan baitul mal memiliki sejumlah keunggulan seperti manfaatnya yang dapat dinikmati oleh publik; substansinya tidak habis dikonsumsi karena yang dapat digunakan oleh *beneficiary* adalah *profit* dari hasil pengelolaan substansi wakaf; dan *profit* dari

⁷⁵ Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 916.

⁷⁶ Ibn Hakam, *Sirah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz*, h. 97

⁷⁷ Secara terminologi, para fuqaha memberikan definisi yang berbeda, namun menunjukkan kepada makna yang sama seperti di atas. Lihat misalnya Ibn Qudamah dari mazhab Hanabilah yang mendefinisikan wakaf dengan menahan suatu aset dan menyumbangkan manfaatnya. Ibn Qudamah, *Al-Mugni* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), Juz IV, h. 680; Syafi'iyah mendefinisikan wakaf dengan menahan suatu aset yang mungkin digunakan atau diambil manfaatnya tetapi aset itu tetap, lihat Syarbaini al-Khatib, *Mugni al-Muhtāj* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), Juz II, h. 376; sementara ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf dengan menahan aset yang dimiliki seseorang dari kepemilikan orang lain, lihat Syamsuddin as-Sarkhasi, *Al-Mabsut* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t), Juz 12, h. 27

harta wakaf dapat dinikmati siapapun sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah dan diizinkan oleh *wakif* (pemberi wakaf).

Sejarah Islam memiliki banyak bukti tentang keberhasilan wakaf. Rasulullah saw berhasil memanfaatkan tanah yang diwakafkan oleh bani Najjar untuk membangun mesjid di Madinah; Umar bin Khattab dengan tanah wakafnya di Khaibar berhasil membebaskan budak, fisabilillah, dan menolong keluarganya. Usman bin Affan mewakafkan sebidang tanah untuk tempat pengembalaan unta dan tempat untuk minum para musafir. Bahkan Ibn Batutah (w.1377) melaporkan ketika ia mengunjungi Damaskus, ia menemukan beberapa jenis dan tujuan wakaf yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Ada wakaf yang diberikan untuk orang-orang yang tidak mampu naik haji, ada wakaf yang digunakan untuk tempat ibadah, pertahanan/militer, pembangunan jalan umum, makanan untuk orang miskin, sumber air, pendidikan, dakwah, rumah sakit, perayaan, membantu pernikahan orang yang miskin, dan lain-lain.⁷⁸

b. Nazar

Nazar adalah perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan kekayaan dalam jumlah tertentu demi mendapatkan rida Allah jika tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Walaupun nazar bukan satu kewajiban, tetapi seorang muslim bebas untuk bernazar atau tidak, namun, jika nazar telah diucapkan dan apa yang diinginkan telah tercapai, maka wajib baginya untuk memenuhi nazar tersebut.⁷⁹

Nazar dinyatakan sah, apabila dimaksudkan sebagai bentuk pendekatan (taqarrub) kepada Allah. Nazar seperti itu wajib dipenuhi atau dilaksanakan. Sedangkan nazar dengan maksud melakukan maksiat kepada Allah, dinyatakan tidak sah untuk dilaksanakan, seperti bernazar meminum khamar, membunuh,

⁷⁸ Abdul Azim Islahi, *Provision of Public Goods: Role of Voluntary Sector (Waqf) in Islamic History*, makalah disampaikan pada *The 3rd International Conference on Islamic Economics* 26–30 January 1992 di Kualalumpur.

⁷⁹ Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1999), h. 65

meninggalkan shalat, atau menyakiti orang tua. Apabila bernazar seperti demikian, maka tidak wajib memenuhinya, bahkan haram melakukannya, dan tidak kafarat bagi pelanggarnya, karena nazar tersebut tidak sah.

Seseorang bernazar, akan tetapi ia melanggar atau membatalkannya, maka ia wajib membayar kafarat. Adapun kafaratnya

digolongkan sebagai kafarat sumpah yaitu:

- 1) Memberi makanan. Jumhur ulama mensyaratkan pemberian makanan mesti untuk sepuluh orang miskin muslim, menurut Abu Hanifah, dibolehkan memberikan makanan untuk satu orang saja selama sepuluh hari.
- 2) Memberi pakaian. Standar pakaian yang memadai atau layak adalah yang dikenakan oleh orang yang melakukan kafarat.
- 3) Memerdekakan budak. Menurut jumhur ulama budak yang dimerdekakan harus beragama Islam atas dasar analogi dengan kafarat pembunuhan dan zihar.

Dibolehkan untuk memilih melaksanakan kewajiban puasa selama tiga hari, bila tidak mampu melaksanakan salah satu dari hal di atas. Ketiga pilihan di atas dilaksanakan secara tertib dan tersusun, artinya berawal dari pilihan yang paling ringan hingga yang berat. Pertama memberi pakaian sebagai pilihan kedua, dan memerdekakan budak adalah pilihan terakhir (QS al-Maidah: 89)

c. Nawāib

Dalam Islam, negara mempunyai hak pada harta milik warganya dan milik rakyatnya dengan mewajibkan mereka mengambil bagian dalam pembelanjaan negara yang akan digunakan bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan tanah air seperti pembangunan sekoloh-sekolah, masjid-masjid, rumah-rumah sakit serta lain-lain lembaga yang mengurus kebutuhan orang banyak dan kepentingan umum, termasuk di dalamnya kebutuhan negara bagi kepentingan pertahanannya dan keamanan

wilayahnya, sebagaimana difirman Allah swt dalam QS at-Taubah ayat 41 yang memerintahkan manusia untuk berjihad baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dengan harta maupun jiwa.

Usaha manusia untuk memperoleh kekayaan merupakan hal yang fitri, bahkan merupakan suatu keharusan. Hanya saja dalam mencari kekayaan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada manusia sesukanya karena hal itu akan menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, cara memperoleh kekayaan tersebut harus dibatasi dengan mekanisme tertentu, yang mencerminkan kesederhanaan yang dapat dijangkau oleh semua orang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan fitrahnya. Dengan kata lain, kepemilikan harus ditentukan dengan mekanisme tertentu. Karena membatasi kepemilikan seseorang akan menyebabkan pelanggaran terhadap fitrah manusia.

Batasan kepemilikan ini nampak pada sebab-sebab kepemilikan yang telah disyariatkan. Ketika islam membatasi suatu kepemilikan Islam tidak membatasinya dengan cara perampasan, melainkan dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan fitrah. Adapun pembatasan kepemilikan dengan menggunakan mekanisme tertentu seperti: dengan cara membatasi kepemilikan dari segi cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik., menentukan mekanisme mengelolanya, menyerahkan kharafiyah sebagai milik negara, bukan sebagai individu, dan dengan menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa, dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya dengan menarik *nawaiib*.

Nawāib adalah pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada konglomerat muslim dalam rangka menutupi pengeluaran negara.⁸⁰ Kewajiban ini dilakukan karena adanya kondisi darurat dan didasarkan pada kaidah-kaidah umum hukum syara' yang memperbolehkan. Misalnya kaidah "Mashalih

⁸⁰ Sabzwari, "Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Pemerintahan Rasulullah saw," h. 33

Mursalah” (atas dasar kepentingan), atau kaidah ‘mencegah mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat’, atau kaidah ‘lebih memilih mudharat yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada mudharat yang menimpa manusia secara umum’. Kas Negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata, “Jika sekiranya seorang penguasa (pemerintahan muslim) hendak menyiapkan sebuah pasukan perang, maka sepantasnya dia menyiapkannya dengan harta yang diambil dari baitul mal kaum muslimin (kas negara) jika di dalamnya memang ada harta kekayaan yang mencukupinya, dan tidak boleh baginya mengambil harta sedikitpun dari rakyat. Akan tetapi jika di dalam baitul mal tidak ada harta yang mencukupi penyiapan pasukan perang, maka dibolehkan bagi penguasa/pemerintah muslim menetapkan kebijakan kepada mereka (orang-orang kaya agar membayar pajak, pent) sehingga pasukan perang yang akan berjihad menjadi kuat.”⁸¹

d. Amwāl fadla

Penyelesaian tentang pembagian harta warisan telah diatur sedemikian rinci oleh Alqur’an, karena warisan tersebut sangat rawan dari sengketa utamanya bagi ahli waris, dan agar harta tersebut dapat dibagikan secara adil menurut hukum Allah SWT. *Amwāl fadla* adalah harta benda kaum muslimin yang tidak memiliki pewaris atau mempunyai waris tetapi tidak dapat menghabiskan semua harta warisan, dan harta yang tidak mempunyai pemilik seperti barang-barang kaum muslimin yang meninggalkan negaranya. Termasuk juga dalam kategori ini

⁸¹ Muhammad Wasitho Abu Fawaz. Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam dalam <https://abufawaz.wordpress.com>

adalah harta *luqatah* (tercecer), barang-barang amanah, pinjaman, dan tanah yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Kekayaan seperti ini jika memang tidak diketahui pemiliknya, maka menjadi milik baitul mal.⁸²

Jumhur ulama sepakat bahwa harta yang ditinggalkan mayit sementara mayit tidak memiliki orang yang berhak mewarisi baik dengan warisan maupun wasiat maka diberikan ke baitul mal. Hanya saja menurut Hanafiyah dan Hanabilah bukan dengan cara warisan naming termasuk dalam penjagaan maslahat. Oleh karena itu dikelola dalam pengelolaan kemaslahatan umum untuk semua kaum muslimin. Hal ini sama statusnya dengan harta kafir zimmi yang tidak mempunyai ahli waris yang diberikan kepada baitul mal. Menurut Syafi'iyah harta tersebut termasuk warisan, sebab warisan adalh untuk umat Islam, imam adalah pengawas dan orang yang memenuhi kebutuhan umatnya⁸³

e. Kafarat

Kafarat merupakan salah satu sumber pendapatan baitul mal. Kafarat adalah denda atau tebusan atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim terhadap ketentuan syara'. Ada beberapa pelanggaran ketentuan syara' yang harus dibayar adalah cara ini, misalnya membatalkan puasa tanpa ada uzur, membunuh secara sengaja, melanggar nazar, berburu pada musim haji, bersumpah palsu, dan lain-lain.⁸⁴

Kafarat sumpah, para ulama membedakan sumpah tersebut dalam sumpah *lagw* (sia-sia) seperti ucapan seseorang yang dilontarkan tanpa tujuan untuk bersumpah. Sumpah seperti ini tidak dianggap sebagai sumpah yang harus dikenai denda kafarat. Ada pula sumpah *qumus* yakni sumpah dusta dan mengandung unsur pengkhianatan. Sumpah seperti ini tidak dikenakan kafarat menurut jumhur ulama karena hukumannya lebih besar

⁸² *Ibid*

⁸³ Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.all. Jilid 10 (Jakarta: Darul Fikir201), h. 471

⁸⁴ Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, h. 63

dan berat dari kafarat. Sumpah *mun'aqidah* yaitu sumpah yang dilakukan seseorang bahwa ia akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang atau tidak melakukan sesuatu, namun sumpah itu dilanggarnya. Bentuk sumpah ini dikenai kafarat sumpah sebagaimana difirmankan dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 89 yakni memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian mereka aatau memerdekakan budak. Jika si pelanggar sumpah tidak sanggup melaksanakan kafarat tersebut, ia harus berpuasa selama tiga hari.

Kafarat zihar, yaitu ucapan menyamakan punggung ibu dengan punggung istri. Hukumannya menurut QS Al-Mujahadah ayat 3 dan 4 adalah memerdekakan budak; jika tidak sanggup, berpuasa dua bulan berturut-turut dan jika tidak mampu juga, memberi makan 60 orang miskin. Jumhur ulama sepakat bahwa kafarat zihar ini dengan urutan seperti yang ada dalam ayat itu, tanpa ada kebolehan memilih atau mengganti-ganti urutan tersebut. Berbeda dengan jumhur ulama, ulama Mazhab Maliki berpendapat bentuk-bentuk hukuman tersebut merupakan tiga alternatif yang boleh dipilih tanpa terikat dengan tertib yang ada dalam ayat. Boleh saja yang dua didahulukan kalau kemaslahatan menghendaki demikian.

Kafarat bagi suami yang melakukan jimak (persetubuhan) pada saat ihram atau pada siang hari puasa Ramadhan. Kafaratnya adalah dengan memerdekakan budak, puasa berturut-turut selama dua bulan atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Dasar hukum dari kafarat jimak ini adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jemaah dari Abu Hurairah.

Tujuan kafarat adalah *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT, di samping juga memerdekakan budak, dalam arti bukan untuk menanggung resiko fisik sebagaimana yang terdapat dalam hukuman-hukuman hudud atau kisas. Dari sisi ekonomi, kafarat merupakan instrument redistribusi yang dapat mengurangi kemiskinan. Dengan adanya kafarat dapat mengurangi angka kemiskinan. Kafarat zihar misalnya, dilakukan dengan memerdekakan hamba sahaya atau minimak memberi makan 60

orang miskin dimana pembayarannya diukur dengan makanan yang berlaku dirumahnya. Hal ini akan mengurangi pengangguran dan peminta-minta. Bahkan jika kafarat tersebut dibayarkan dalam bentuk uang yang disetor ke baitul mal, maka uang tersebut dapat dipergunakan sebagai sumber modal untuk membantu orang miskin yang membutuhkan.

f. Wasiat

Alqur'an mengakui adanya wasiat sebagai sebuah institusi sukarela untuk pemindahan dan distribusi kekayaan (QS 4:11). Setiap orang memiliki hak dan wewenang untuk memberikan wasiat terhadap harta yang dia miliki terhadap siapa yang dia kehendaki atau pada lembaga dan institusi tertentu, dan untuk tujuan serta maksud-maksud yang halal. Namun, wasiat yang diberikan hendaknya tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan *syara'*, yaitu sepertiga dari kekayaan. Aturan sepertiga yang ketat ini adalah demi kepentingan ahli waris yang sah. Karena pembagian pada ahli waris juga sangat membantu pemdistribusian kekayaan.⁸⁵

g. Sumber-sumber lain

Sumber-sumber sekunder lainnya yang menjadi sumber pendapatan baitul mal antara lain adalah filantropi Islam. Filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta, tindakan seseorang yang dilandasi rasa cinta sesama sehingga mendorongnya untuk menyumbangkan atau mengorbankan sesuatu baik itu berupa waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain⁸⁶. Filantropi juga dapat diartikan sebagai upaya menolong sesama, kegiatan berderma, atau kebiasaan beramal dari seseorang yang dengan ikhlas

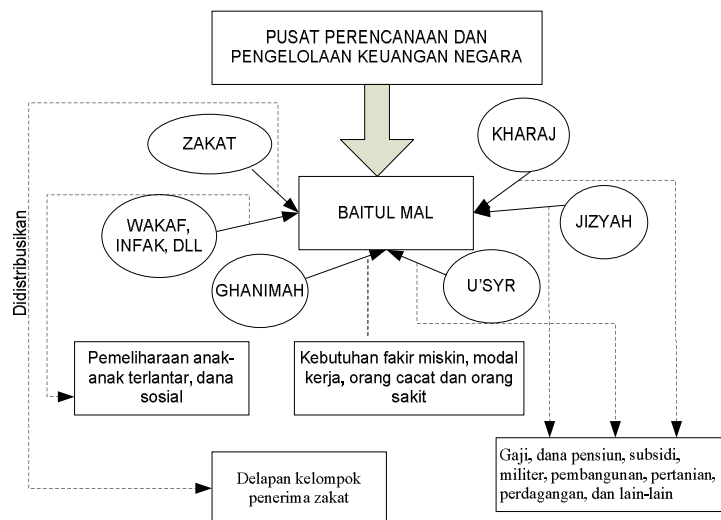
⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Widyawati. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Arsad Press, 2011), h.18

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

menyisihkan sebagian harta atau sumberdaya yang dimilikinya untuk disumbangkan kepada orang lain yang memerlukan, atau sebagai kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan baik, dengan menolong dan memberikan sebagian harta, tenaga maupun fikiran secara sukarela untuk kepentingan orang lain. Di antara filantropi Islam adalah sedekah, hadiah, dan *qard hasan* yaitu pemberian pinjaman bebas bunga. Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad dan bertujuan supaya harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

Sumber-sumber pendapatan baitul mal di atas baik sumber pendapatan primer maupun sekunder merupakan modal bagi negara dan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi distribusi baitul mal dalam membiayai berbagai pengeluaran primer seperti biaya pertahanan, pembayaran hutang negara, biaya pembangunan, subsidi untuk fakir miskin, dan membayar gaji pegawai, maupun pengeluaran-pengeluaran sekunder seperti bantuan belajar, hadiah dan biaya akomodasi untuk duta negara lain. Untuk lebih ringkasnya, sumber-sumber pendapatan baitul mal dan metode pendistribusiannya dalam dilihat dalam skema berikut:



Skema di atas menjelaskan bahwa pendapatan baitul mal baik yang berasal dari sumber-sumber primer maupun sumber-sumber sekunder, setelah dimasukkan ke dalam kas baitul mal sesuai dengan pos dan lajurnya masing-masing, didistribusikan kembali kepada masyarakat sesuai dengan karakteristik setiap pendapatan. Berdasarkan skema di atas, Islam juga telah memberikan ketentuan yang jelas, yang dapat dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk mengalokasikan pengeluarannya. Ada 6 kaidah utama dalam pengalokasian anggaran belanja dalam Islam, yaitu:

- 1) Khusus untuk harta di dalam Kas APBN Islam yang berasal dari zakat, maka pos pengeluarannya wajib hanya diperuntukkan bagi 8 ashnaf sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam al-Quran.
- 2) Pos pembelanjaan wajib dan bersifat tetap dari APBN untuk keperluan jihad dan menutup kebutuhan orang-orang fakir dan miskin.
- 3) Pos pembelanjaan wajib dan bersifat tetap dari APBN untuk membeikan gaji (kompensasi) atas jasa yang telah dicurahkan untuk kepentingan negara, yaitu: pegawai negeri, hakim, tentara, dan sebagainya.
- 4) Pos pembelanjaan untuk pembangunan sarana kemaslahatan rakyat yang bersifat wajib, dalam arti jika sarana tersebut tidak ada, maka akan menimbulkan kemudaaratan bagi rakyat, seperti: pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, masjid, dan air bersih.
- 5) Pos pembelanjaan wajib yang bersifat kondisional, yaitu untuk menanggulangi musibah atau bencana alam yang menimpa rakyat seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor.
- 6) Pos pembelanjaan untuk pembangunan sarana kemaslahatan rakyat yang bersifat tidak wajib, dalam arti sarana tersebut hanya bersifat penambahan dari sarana-sarana yang sudah ada. Jika sarana tambahan tersebut

tidak ada, tidak akan menimbulkan kemadaramatan bagi rakyatnya.⁸⁷

Dengan adanya prinsip-prinsip pengeluaran seperti di atas, maka system pengeluaran dana dari APBN menurut ekonomi Islam akan dapat berjalan dengan baik dan fungsinya untuk mensejahterakan rakyat akan lebih mudah untuk dicapai.

B. Kebijakan Fiskal

1. Peran dan Fungsi Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal merupakan sebuah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Menurut Islam, sistem ekonomi Islam pada dasarnya dibagi ke dalam tiga sektor yang utama, yaitu sektor public, sektor swasta dan juga sektor keadilan sosial. Fungsi daripada sektor fiskal menurut Islam:

- Memelihara terhadap hukum, keadilan dan juga pertahanan
- Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi
- Manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN
- Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan

Fungsi fiskal menurut konvensional adalah sebuah fungsi dalam tataran perekonomian yang sangat identik kemampuan yang ada pada pemerintah dalam masalah menghasilkan pendapatan untuk menutupi kebutuhannya dan lalu mengalokasikan anggarannya yang ada, atau bisa disebut dengan anggaran belanja Negara dan juga mendistribusikannya agar tercapai apa yang dinamakan dengan efisiensi anggaran. Sedangkan instrument fiskal yang bisa digunakan adalah

⁸⁷ Mustafa Edwin Nasution. et.al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Prenada, 2006), h. 223-225

pajak dan anggaran. Dalam pandangan ekonomi islam pendapatan dan anggaran merupakan alat yang efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan ekonomi.

Adapun tujuan dari kebijakan pemerintah menurut Sukirno, yaitu dilihat berdasarkan dua tujuan yakni tujuan yang berifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial dan politik. Ada tiga faktor yang menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah dalam mencapai tujuan yang bersifat ekonomi yaitu: menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat serta memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat serta mengurangi ketimpangan dalam masyarakat. Sedangkan tujuan yang bersifat sosial politik diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari masalah-masalah sosial, keamanan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan mewujudkan kesetabilan politik

Menurut Siddiq mengklasifikasikan fungsi negara islami dalam tiga kategori, yaitu: *pertama, fungsi syariah* meliputi: pertahanan, hukum dan ketertiban, keadilan, pemenuhan kebutuhan, dakwah, amar ma'ruf nahi mungksardan administrasi sipil, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial jika sektor swasta gagal memenuhinya. *Kedua, fungsi turunan syariah* yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, meliputi: perlindungan lingkungan, penyediaan sarana kepentingan umum, penelitian ilmiah, pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi, menyediakan subsidi pada kegiatan swasta tertentu dan pembelanjaan yang diperukan untuk stabilisasi kebijakan. *Ketifa, fungsi yang diamanahkan secara kontekstual* berdasarkan proses musyawarah, meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses musyawarah. Inilah yang menurut Siddiqi terbuka dan berbeda kepada setiap negara tergantung situasi dan kondisi negara masing-masing.

Pandangan berbeda tentang fungsi dan tanggungjawab negara disampaikan oleh Khaf Negara tidak bebas menentukan prioritas politik dan ekonomi, ataupun memaksakan pola pembelanjaan negara, politik dan ekonomi yang membatasi kebebasan dan hak individu yang diberikan Allah SWT. Sasaran utama negara Islami melindungi agama

dan supermasi kalimatullah. Negara harus membantu kaum muslimin melaksanakan kewajiban agamanya. Selanjutnya negara islam harus bertanggungjawab menyampaikan kebenaran Islam ke kalangan non muslim melalui kegiatan dakwah.

Dalam kajian makro ekonomi, sumber utama kebijakan fiskal adalah pajak yang dipungut dari rakyat, di samping pinjaman luar negeri, pendapatan dan lainnya, namun pajak adalah penyumbang terbesarnya. Berdasarkan jenisnya, kebijakan fiskal biasanya dibagi kepada dua yaitu:

a. Penstabil otomatis

Penstabil otomatis adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis berhubungan langsung dengan pajak, asuransi pengangguran dan kebijakan harga minimum. Dalam perekonomian modern, penstabil otomatis yang utama adalah :

1) Sistem perpajakan yang progresif dan proporsional

Sistem pajak progresif ialah suatu sistem perpajakan yang mengenakan persentase lebih tinggi seiring dengan semakin tingginya jumlah pendapatan, biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan individu dan dikongkretkan hampir disemua negara. Sementara pajak proporsional ialah suatu sistem perpajakan yang mengenakan persentase yang sama terhadap seluruh tingkat pendapatan. Sistem pajak proporsional biasanya digunakan untuk memungut pajak atas keuntungan perusahaan-perusahaan korporat. Kedua sistem perpajakan ini cenderung untuk mengurangi fruktuasi kegiatan perekonomian dari satu periode ke periode lainnya.

2) Kebijakan harga minimum

Kebijakan harga minimum merupakan suatu sistem pengendalian harga yang bertujuan menstabilkan pendapatan para petani dan pada waktu yang sama menjaga agar

pendapatannya cukup tinggi. Permintaan dan penawaran barang pertanian sifatnya inelastis. Sebagai akibatnya fruktuasi dalam penawaran akan menimbulkan fruktuasi harga yang cukup besar dan mempengaruhi kestabilan pendapatan petani. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga dan pendapatan serta membantu mengurangi fruktuasi kegiatan keseluruhan ekonomi.

3) Sistem asuransi pengangguran

Sistem ini adalah suatu bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada penganggur. Sistem ini pada dasarnya mengharuskan, (1) tenaga kerja yang sedang bekerja untuk membayar asuransi pendapatan, (2) menerima sejumlah pendapatan yang ditentukan pada saat menganggur.

b. Kebijakan fiskal diskresioner

Kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Secara umum kebijakan fiskal diskresioner dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu :

1) Kebijakan fiskal ekspansi (expansionary fiscal policy)

Pada kondisi perekonomian yang rendah ketika menghadapi masalah pengangguran, dibutuhkan suatu kebijakan yang mampu mendorong perekonomian agar mampu tumbuh dan mengurangi jumlah pengangguran. Bentuk kebijakan yang dilakukan adalah menambah pengeluaran pemerintah dan mengurangi tingkat presentase pengenaan pajak. Pertambahan pengeluaran pemerintah tersebut biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi lain, sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional. Penurunan presentase pajak akan mampu mengurangi

beban, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2) Kebijakan fiskal kontraksi (contractionary fiscal policy)

Kebijakan ini dilakukan ketika masalah inflasi yang dihadapi atau perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan tingkat pengangguran sangat rendah. Tujuan dari kebijakan mengatasi inflasi adalah menurunkan tingkat inflasi ke tingkatan yang normal dengan tetap menjamin agar kesempatan kerja penuh tercapai. Mengurangi pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan fiskal diskresioner yang paling efektif dalam menekan tingkat inflasi. Menentukan kebijakan fiskal untuk mengatasi masalah stagflasi jauh lebih rumit dari pada merumuskan kebijakan mengatasi inflasi yang biasanya dilakukan adalah kebijakan pengeluaran ketat terhadap anggaran pemerintah.⁸⁸

Kebijakan Fiskal memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Adanya jed waktu (time lag)
 - a. *Recognition lag*, yaitu periode di antara bermulanya masalah yang dihadapi dengan masanya disadari bahwa kebijakan perlu dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut.
 - b. *Decision lag* atau *inside lag*, yaitu perbedaan waktu di antara menyadari maslah yang dihadapi dengan waktu dimana kebijakan-kebijakan ekonomi mulai dilaksanakan atau berfungsi.
 - c. *Action lag* atau *outside lag*, yaitu perbedaan waktu di antara pelaksanaan kebijakan dan pengaruh sepenuhnya yang dirasakan dalam ekonomi.

⁸⁸ Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h.315

- d. Persaingan untuk memperoleh dana di antara pemerintah dan sektor swasta. Persaingan ini akan menimbulkan *crowding out* dan menyebabkan kenaikan suku bunga dan menurunkan investasi.
- e. Kebutuhan untuk membayar bunga dan mencicil pembayaran kembali pinjaman di masa yang akan datang. Bukan saja pinjaman pemerintah tersebut akan meninggalkan beban kepada generasi yang akan datang tetapi juga menyebabkan pengurangan dana pembangunan.

Adanya time lag akan menyebabkan kelambanan sehingga sering sekali sebuah guncangan ekonomi wujud sedangkan pemecahannya lamban dilakukan. Hal ini disebabkan para pembuat kebijakan membutuhkan waktu untuk menyadari bahwa sebuah guncangan telah terjadi dan kemudian mengeluarkan kebijakan yang tepat, sehingga kebijakan yang dibuat tidak segera mempengaruhi pengeluaran, pendapatan, dan kesempatan kerja.

2. Risiko Fiskal

Risiko fiskal adalah kemungkinan penyimpangan dalam variabel-variabel fiskal dari apa yang diharapkan pada saat penyusunan anggaran maupun perkiraan lainnya. Sementara itu, dalam Nota Keuangan dan APBN, risiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah. Secara garis besar risiko fiskal dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu risiko sensitifitas APBN, risiko utang pemerintah pusat, risiko kewajiban kontinjensi, dan risiko desentralisasi fiskal.

a. Risiko Sensitivitas APBN

Dalam penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP), dan liftingminyak. Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan,

belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran-besaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBN juga akan berubah. Oleh karena itu, variasi-variasi ketidakpastian dari indikator ekonomi makro merupakan faktor risiko yang akan mempengaruhi APBN.

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi besaran APBN, baik pada sisi pendapatan maupun belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi antara lain memengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh dan PPN. Pada sisi belanja negara, pertumbuhan ekonomi antara lain mempengaruhi besaran nilai dana perimbangan dalam anggaran transfer ke daerah sebagai akibat perubahan pada penerimaan pajak.

Penurunan nilai tukar rupiah (khususnya terhadap dolar Amerika Serikat) memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Pada sisi pendapatan negara, depresiasi nilai tukar rupiah antara lain akan mempengaruhi penerimaan minyak dan gas bumi (migas) dalam denominasi dolar Amerika Serikat serta PPh migas dan PPN. Pada sisi belanja negara, yang akan terpengaruh antara lain: belanja dalam mata uang asing; pembayaran bunga utang luar negeri; subsidi BBM dan listrik; dan sebagainya. Sedangkan pada sisi pembiayaan, yang akan terkena dampaknya adalah: pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek; pembayaran cicilan pokok utang luar negeri; dan privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan yang dilakukan dalam mata uang asing.

Perubahan tingkat suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan hanya akan berdampak pada sisi belanja. Dalam hal ini, peningkatan tingkat suku bunga SBI 3 bulan akan berakibat pada peningkatan pembayaran bunga utang domestik. Sementara itu, Harga minyak mentah Indonesia (ICP) mempengaruhi APBN pada sisi pendapatan dan belanja negara dan penurunan lifting minyak domestik juga akan memengaruhi APBN pada sisi pendapatan dan belanja negara. Pada sisi pendapatan, penurunan lifting

minyak domestik akan menurunkan PPh migas dan PNB migas. Sementara pada sisi belanja negara penurunan *lifting* minyak domestik akan menurunkan dana bagi hasil ke daerah.

b. Risiko Utang Pemerintah

Risiko utang Pemerintah merupakan salah satu bentuk risiko fiskal yang sangat penting dan memerlukan pengelolaan yang baik, sebab sangat mempengaruhi kesinambungan fiskal Pemerintah pada tahun berjalan dan masa yang akan datang. Secara umum, risiko utang Pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*), dan risiko nilai tukar (*exchange rate risk*).

Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*) adalah potensi tambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang meningkatkan biaya pemenuhan kewajiban utang Pemerintah. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*) adalah potensi peningkatan beban kewajiban Pemerintah dalam memenuhi kewajiban utang akibat peningkatan kurs nilai tukar valuta asing terhadap mata uang rupiah. Pada akhir tahun 2015 ini nilai rupiah terdepresiasi cukup signifikan. Bila hal ini terus terjadi maka Pemerintahan yang baru akan mengalami kesulitan dalam mengelola anggarannya. Risiko *refinancing* adalah potensi naiknya tingkat biaya utang pada saat melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*), atau bahkan tidak dapat dilakukan *refinancing* sama sekali yang akan meningkatkan beban Pemerintah dan/atau mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan Pemerintah.

c. Risiko Kewajiban Kontijensi

Risiko fiskal yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur, seperti yang berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap I dan II, proyek pembangunan jalan tol, percepatan penyediaan air minum (PDAM) dan proyek

model Kerja sama Pemerintah-Swasta (KPS) Independent Power Producer (IPP) PLTU Jawa Tengah. Pemberian jaminan ini membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjen Pemerintah. Ketika risiko-risiko yang dijamin Pemerintah tersebut terjadi dan Pemerintah harus menyelesaikan kewajiban kontinjen dimaksud, maka kondisi ini kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN.

2. Risiko Desentralisasi Fiskal

Dalam rangka mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan pembangunan daerah diharapkan harus benar-benar sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas daerah. Oleh karena itu Pemerintah mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah daerah, sebagai tingkatan Pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan. Namun demikian, dalam implementasinya terdapat beberapa kebijakan yang berpotensi menjadi sumber risiko fiskal seperti kebijakan pemekaran daerah, pinjaman daerah, dan pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.

Risiko fiskal yang berasal dari kebijakan pemekaran daerah ditransmisikan melalui beberapa hal, yaitu pengurangan alokasi DAU, peningkatan penyediaan DAK bidang prasarana Pemerintahan, dan peningkatan alokasi dana untuk pembangunan instansi vertikal. Risiko fiskal yang berasal dari penerusan pinjaman dan RPD terutama berasal dari tunggakan Pemerintah daerah atas pembayaran kembali pinjaman, dan dampak risiko fiskal atas pengalihan pajak adalah terjadinya penurunan penerimaan pajak pusat dengan adanya pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah.

Menghadapi berbagai kemungkinan dan risiko terkait dengan kebijakan fiskal yang diambil, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan, yakni dengan melakukan pengungkapan risiko fiskal pada nota keuangan dan pembentukan pusat pengelolaan risiko fiskal (PPRF). Pengungkapan risiko fiskal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh stakeholder dalam pengelolaan kebijakan fiskal, meningkatkan keterbukaan fiskal,

meningkatkan tanggung jawab fiskal, dan menciptakan kelangsungan fiskal. Pengungkapan risiko fiskal ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Keuangan dan RAPBN pada setiap tahun anggaran.

a. Pengelolaan risiko kurs

Sepanjang tahun anggaran 2015, nilai tukar rupiah terus melemah. Hingga akhir Oktober nilai tukar rupiah berkisar di atas Rp.14.000 per dolar AS. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut tentunya akan meningkatkan subsidi BBN yang dapat menggerusi APBN. Untuk itu Pemerintah berupaya mengendalikan fluktuasi nilai tukar rupiah dengan cara memotong subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi (premium dan solar) sebesar Rp.2.000 per liter. Selain itu pemerintah juga terus menekan tingkat inflasi serendah mungkin, menjaga stabilitas ekonomi, tingkat suku bunga, politik, dan keamanan nasional dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

b. Pengelolaan risiko inflasi

Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup masyarakat juga menurun yang pada akhirnya menjadikan masyarakat miskin bertambah miskin. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah harus mengalokasikan anggaran lain-lain sebagai bentuk mitigasi atas resiko ini. Alokasi anggaran ini salah satunya adalah untuk stabilisasi harga kebutuhan pangan. Alternatif , yang dapat dilakukan antara lain dengan kegiatan dengan operasi pasar yang dapat dilakukan dengan melibatkan

BUMN-BUMN (yang profitable) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

c. Pengelolaan risiko suku bunga

Tingkat Suku Bunga merupakan salah satu instrumen dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar yang berimplikasi pada tingkat inflasi. Pada negara dengan tingkat kapasitas produksi barang dan jasa yang masih berkembang pesat, tentunya memiliki tantangan tersendiri. Bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter harus menetapkan tingkat suku bunga yang tepat agar laju pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan tingkat inflasi yang terkendali. Melihat tren setelah krisis dunia, khususnya di Amerika, suku bunga akan masih ada pada level yang rendah, oleh karena itu laju pertumbuhan ekonomi sebesar sekitar 5% di tahun 2014 ini diharapkan bisa dicapai.

d. Pengelolaan risiko harga dan lifting minyak

Kenaikan harga minyak dunia menimbulkan imbas pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor migas, akan tetapi juga sekaligus mengakibatkan membengkaknya belanja negara untuk subsidi BBM. Pada 2015 ini, walaupun harga minyak dunia menurun, namun tidak akan berpengaruh besar terhadap beban nilai impornya maupun subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM). Sebab, depresiasi rupiah juga anjlok cukup dalam, sehingga meningkatkan subsidi BBM tersebut. Mitigasi yang dilakukan Pemerintah terkait dengan risiko fiskal dari minyak adalah meningkatkan lifting sektor minyak bumi dan gas, mengefisienkan cost recovery, dan efisiensi dari impor minyak, mengurangi konsumsi BBM dan mengembangkan sumber energi alternatif seperti gas dan biodiesel.

e. Pengelolaan risiko pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan Nota Keuangan tahun 2016, kinerja perekonomian nasional diperkirakan relatif lebih baik dibanding tahun 2015. Perbaikan ekonomi nasional ditopang baik dari faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, perkiraan membaiknya kinerja ekonomi global diharapkan menjadi faktor yang kondusif mendorong penguatan ekonomi nasional.

Sementara dari sisi domestik, terjaganya laju inflasi serta berbagai kebijakan Pemerintah yang telah diluncurkan diharapkan dapat menjadi faktor positif yang dapat mendorong penguatan permintaan domestik.⁸⁹

Perbaikan kinerja ekonomi nasional dalam tahun 2016 diperkirakan didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat terkait dengan terjaganya inflasi dan kebijakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat. Sementara itu, peningkatan belanja infrastruktur dalam tahun 2015 yang akan berlanjut di tahun 2016 diharapkan dapat mendorong kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Penguatan kinerja PMTB juga diharapkan didukung oleh kebijakan-kebijakan perbaikan iklim investasi dan usaha, termasuk kebijakan insentif perpajakan. Selanjutnya, seiring dengan membaiknya lingkungan eksternal, kinerja ekspor juga diharapkan mengalami perbaikan. Penguatan kinerja di tahun 2016 juga diharapkan berasal dari sektor industri pengolahan seiring dengan membaiknya permintaan global dan sektor konstruksi sejalan dengan komitmen

Pemerintah mendorong peningkatan belanja infrastruktur secara signifikan. Peningkatan belanja infrastruktur ini juga diharapkan akan mendorong kinerja sektor transportasi dan perdagangan. Meskipun demikian, dalam tahun 2016, prospek kinerja ekonomi nasional juga diperkirakan akan menghadapi tantangan yang cukup berat khususnya terkait risiko ketidakpastian pasar keuangan dan prospek ekonomi global, terutama Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia. Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini perekonomian global dan nasional serta prospeknya ke depan, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,5 persen.⁹⁰

⁸⁹ Resiko-resiko fiskal ini merupakan bagian dari Nota Keuangan dan RAPBN 2016

⁹⁰ Bagian dari APBN ini sebahagian besarnya diambil dari Nota Keuangan dan RAPBN 2016

C. Variabel-Variabel Makro Ekonomi dalam APBN

1. Harga Minyak Dunia

Bahan bakar minyak merupakan salah satu kebutuhan terbesar masyarakat yang akan dikonsumsi. Harga minyak dunia pun ikut andil dalam penjualan minyak di pasaran. Kenaikan harga minyak dunia itu berpengaruh global terhadap kenaikan seluruh harga barang. Oleh karena itu, pemerintah harus cermat dalam memprediksi harga minyak dunia dimasa mendatang. Dengan prediksi perencanaan anggaran yang tepat, maka apabila harga minyak dunia melambung tinggi pemerintah telah siap mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Selain itu, pemerintah juga dapat mengalokasikan dana untuk mensubsidi bahan bakar minyak tersebut, sehingga dana APBN yang direncanakan tidak membengkak.

Fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional pada prinsipnya mengikuti aksioma yang berlaku umum dalam ekonomi pasar, dimana tingkat harga yang berlaku sangat ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran (*demand and supply mechanism*) sebagai faktor fundamental. Faktor-faktor lain dianggap sebagai faktor non-fundamental, terutama berkaitan dengan masalah infrastruktur, geopolitik dan spekulasi.

Dari sisi permintaan, perilaku harga minyak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dunia. Pengalaman menunjukkan bahwa peningkatan permintaan terhadap minyak yang kemudian mendorong naiknya harga minyak didahului oleh pertumbuhan ekonomi global yang cukup tinggi. Sebelum terjadinya krisis minyak (*oil shock*) pertama (tahun 1973) dan kedua (tahun 1978), laju pertumbuhan ekonomi global yang tinggi, lebih dari 4% per tahun, diikuti dengan permintaan minyak yang cukup kuat, masing-masing dengan pertumbuhan sekitar 8% dan 4%. Kenaikan permintaan minyak terjadi akibat dorongan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung dalam dekade 1960-an sampai tahun 1973, terutama berasal dari negara-negara maju yang tergabung dalam *the Organization for Economic Cooperation and*

Development (OECD). Setelah krisis harga minyak kedua, rata-rata tahunan konsumsi minyak tumbuh lebih dari 1 juta barel per hari, kecuali pada awal 1990an, dimana konsumsi global stagnan karena runtuhnya Uni Soviet. Namun, sejak tahun 2000, permintaan minyak yang tinggi didorong oleh pertumbuhan ekonomi di kawasan non-OECD, yaitu Asia, terutama Cina dan India

Dari sisi penawaran fluktuasi harga minyak mentah dunia sangat dipengaruhi oleh ketersediaan atau pasokan minyak oleh negara-negara produsen, baik negara-negara yang tergabung dalam *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) maupun negara produsen non-OPEC. Ketersediaan atau pasokan minyak sangat erat kaitannya dengan kapasitas produksi, kapasitas investasi dan infrastruktur kilang.

Sedikitnya ada 6 (enam) saluran yang dapat mentransmisikan dampak guncangan harga minyak (*oil price shocks*) terhadap aktivitas ekonomi. **Pertama**, efek sisi penawaran (*supplyside shock effect*). Kenaikan harga minyak menyebabkan penurunan output karena kenaikan harga memberikan sinyal berkurangnya ketersediaan *Input* dasar untuk produksi. Akibatnya, laju pertumbuhan dan produktivitas menurun. Guncangan harga minyak bisa menyebabkan naiknya biaya marjinal produksi industri sehingga mengurangi produksi dan meningkatkan pengangguran

Kedua, efek transfer kekayaan (*wealth transfer effect*), yang menekankan pada pergeseran daya beli (*purchasing power*) dari negara importer minyak ke negara eksportir minyak. Pergeseran daya beli menyebabkan berkurangnya permintaan konsumen terhadap minyak di negara pengimpor dan bertambahnya permintaan konsumen di negara pengekspor. Konsekuensinya, permintaan konsumen dunia terhadap barang-barang yang dihasilkan negara pengimpor minyak berkurang dan persediaan tabungan (*supply of savings*) dunia meningkat. Peningkatan pasokan tabungan menyebabkan turunnya suku bunga riil. Penurunan suku bunga dunia akan menstimulasi investasi, sebagai penyeimbang turunnya konsumsi, sehingga permintaan agregat tidak berubah di negara pengimpor. Apabila harga sulit turun, penurunan permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan negara pengimpor minyak lebih lanjut akan menurunkan pertumbuhan PDB.

Jika tingkat harga tidak bisa turun, belanja konsumsi akan turun lebih besar dari peningkatan investasi, sehingga menyebabkan penurunan permintaan agregat dan lebih lanjut memperlambat pertumbuhan ekonomi

Ketiga, efek saldo riil (*real balance effect*). Kenaikan harga minyak akan mendorong kenaikan permintaan uang. Apabila otoritas moneter gagal meningkatkan jumlah uang beredar untuk memenuhi pertumbuhan permintaan uang, maka saldo riil akan turun, suku bunga akan naik dan laju pertumbuhan ekonomi melambat

Keempat, efek inflasi (*inflation effect*). Kenaikan harga minyak juga menyebabkan meningkatnya inflasi. Harga minyak mentah yang lebih tinggi akan segera diikuti oleh naiknya harga produk-produk minyak, seperti bensin dan minyak bakar yang digunakan konsumen. Lebih lanjut, karena ada upaya mensubstitusi minyak dengan energi bentuk lain, harga sumber energi alternatif juga akan meningkat. Disamping efek langsung terhadap inflasi, terdapat efek tidak langsung berkaitan dengan respon perusahaan dan perilaku pekerja (*second round effects*). Perusahaan mengalihkan peningkatan biaya produksi dalam bentuk harga konsumen yang lebih tinggi untuk barang-barang atau jasa non-energi, sementara pekerja akan merespon peningkatan biaya hidup dengan menuntut upah yang lebih tinggi

Kelima, efek konsumsi, investasi dan harga saham. Kenaikan harga minyak memberikan efek negative terhadap konsumsi, investasi dan harga saham. Pengaruh terhadap konsumsi berkaitan dengan pendapatan disposibel yang berkurang karena kenaikan harga minyak, sedangkan investasi dipengaruhi melalui peningkatan biaya perusahaan

Keenam, efek penyesuaian sektoral (*sectoral adjustment effect*). Guncangan harga minyak akan mempengaruhi pasar tenaga kerja melalui perubahan biaya produksi relatif industri. Jika harga minyak naik secara berkelanjutan, maka struktur produksi akan berubah dan berdampak terhadap pengangguran. Guncangan harga minyak bisa menambah biaya produksi marjinal di banyak sector yang intensif menggunakan minyak (*oil intensive sectors*) dan bisa memotivasi perusahaan mengadopsi metode produksi baru yang kurang intensif

menggunakan minyak. Perubahan ini pada gilirannya menghasilkan realokasi modal dan tenaga kerja antar sector yang bisa mempengaruhi pengangguran dalam jangka panjang. Karena pekerja memiliki keahlian industri khusus dan pencarian kerja memerlukan waktu, proses penyerapan tenaga kerja yang cenderung membutuhkan waktu akan menambah jumlah pengangguran. Dengan kata lain, semakin tinggi penyebaran dari guncangan sektoral, tingkat pengangguran semakin tinggi karena jumlah realokasi tenaga kerja bertambah.⁹¹

2. Kurs Rupiah

Nilai tukar atau kurs (*exchange rate*) antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, diantaranya yaitu :

a. Tingkat inflasi

Dalam **pasar valuta asing**, perdagangan internasional baik dalam bentuk barang atau jasa menjadi dasar yang utama dalam pasar valuta asing, sehingga perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan **kurs valuta asing**. Contoh: jika Amerika sebagai mitra dagang Indonesia mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi maka harga barang Amerika juga menjadi lebih tinggi, sehingga otomatis permintaan terhadap produk relatif mengalami penurunan.

Rasio uang dalam daya beli (paritas daya beli) berfungsi sebagai titik nilai tukar yang mencerminkan hukum nilai. Itulah mengapa tingkat inflasi berdampak pada nilai tukar. Peningkatan inflasi di suatu negara mengarah pada penurunan mata uang nasional, dan sebaliknya. Penyusutan inflasi uang di dalam negeri akan mengurangi daya beli dan kecenderungan untuk

⁹¹ Muhammad Afdi Nizar. Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Perekonomian Indonesia. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.6 No.2, Desember 2012, h. 190-194

menjatuhkan nilai tukar mata uang mereka terhadap mata uang negara-negara di mana tingkat inflasi yang lebih rendah.

b. Aktifitas neraca pembayaran

Neraca pembayaran secara langsung mempengaruhi nilai tukar. Dengan demikian, neraca pembayaran aktif meningkatkan mata uang nasional dengan meningkatnya permintaan dari debitur asing. Saldo pembayaran yang pasif menyebabkan kecenderungan penurunan nilai tukar mata uang nasional sebagai seorang debitur dalam negeri mencoba untuk menjual semuanya menggunakan mata uang asing untuk membayar kembali kewajiban eksternal mereka. Ukuran dampak neraca pembayaran pada nilai tukar ditentukan oleh tingkat keterbukaan ekonomi. Contoh, efek dari perubahan tarif, pembatasan impor, kuota perdagangan, subsidi ekspor berdampak pada neraca perdagangan. Ketika keseimbangan positif dalam perdagangan ada di muka terdapat peningkatan permintaan untuk mata uang negara yang meningkatkan laju, dan dalam hal keseimbangan negatif proses sebaliknya terjadi. Pergerakan modal jangka pendek dan jangka panjang bergantung pada tingkat suku bunga domestik, pembatasan atau mendorong impor dan ekspor modal.

c. Perbedaan suku bunga di berbagai negara

Perubahan tingkat suku bunga di suatu negara akan mempengaruhi arus modal internasional. Pada prinsipnya, kenaikan suku bunga akan merangsang masuknya modal asing. Itulah sebabnya di negara dengan modal lebih tinggi tingkat suku bunga masuk, permintaan untuk meningkatkan mata uang, dan itu menjadi mahal. Pergerakan modal, terutama spekulatif "uang panas" meningkatkan ketidakstabilan neraca pembayaran. Suku bunga mempengaruhi operasi pasar valuta asing dan pasar uang. Ketika melakukan transaksi, bank akan mempertimbangkan perbedaan suku bunga di pasar modal nasional dan global dengan pandangan yang berasal dari laba. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan pinjaman lebih murah di pasar uang asing, dimana

tingkat lebih rendah, dan tempat mata uang asing di pasar kredit domestik, jika tingkat bunga yang lebih tinggi. Di sisi lain, kenaikan nominal suku bunga di suatu negara menurunkan permintaan untuk mata uang domestik sebagai tanda terima kredit yang mahal untuk bisnis. Dalam hal mengambil pinjaman, pengusaha meningkatkan biaya produk luar negeri yang, pada gilirannya, menyebabkan tingginya harga barang dalam negeri. Hal ini relatif mengurangi nilai mata uang nasional terhadap satu negara⁹²

d. Tingkat pendapatan relatif

Faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar mata uang asing adalah laju pertumbuhan pendapatan terhadap harga-harga luar negeri. Laju pertumbuhan pendapatan dalam negeri diperkirakan akan melemahkan kurs mata uang asing. Sedangkan pendapatan riil dalam negeri akan meningkatkan permintaan valuta asing relatif dibandingkan dengan supply yang tersedia.

e. Kontrol pemerintah

Kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi keseimbangan nilai tukar dalam berbagai hal termasuk:

- 1) Usaha untuk menghindari hambatan nilai tukar valuta asing.
- 2) Usaha untuk menghindari hambatan perdagangan luar negeri.
- 3) Melakukan intervensi di pasar uang yaitu dengan menjual dan membeli mata uang.

f. Ekspektasi

Faktor terakhir yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah ekspektasi nilai tukar di masa depan. Sama seperti pasar keuangan yang lain, pasar valas bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki dampak ke depan. Dan sebagai

⁹² Lihat Adek Laksmi Oktavia et.al, Sri Ulfa. Analisis *Kurs* Dan Money Supply di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, Januari 2013, Vol. I, No. 02., h. 152.

contoh, berita mengenai bakal melonjaknya inflasi di AS mungkin bisa menyebabkan pedagang valas menjual Dollar, karena memperkirakan nilai Dollar akan menurun di masa depan. Reaksi langsung akan menekan nilai tukar Dollar dalam pasar.

Nilai tukar rupiah wajib diketahui dalam penyusunan APBN karena terkait erat dengan beban belanja yang harus dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri maupun subsidi barang-barang impor seperti BBM yang sangat vital menunjang perekonomian nasional. Pengeluaran pembiayaan berupa valas harus diukur dalam nilai mata uang rupiah. Jika kurs dijaga pada nilai yang kuat, maka anggaran belanja bunga dan pengeluaran pembiayaan lebih hemat. Subsidi BBM yang minyaknya diimpor harus dibiayai dengan anggaran yang tidak sedikit, sehingga perhitungan kurs yang tepat akan memberikan besaran yang tepat pula dalam memprediksi kebutuhan belanja subsidi. Jika kurs yang ditetapkan dalam APBN terlalu tinggi, bisa terjadi surplus anggaran karena kebutuhan subsidi lebih kecil. Tetapi jika kurs dipatok terlalu rendah maka ketika nilai rupiah melemah, penutupan defisit anggaran dengan pembiayaan tak terelakan lagi. Selain itu, banyaknya barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri, sehingga diperlukan besaran yang akurat dalam menentukan besarnya kebutuhan dana dalam nilai rupiah. Kurs penting dalam perhitungan pendapatan bea masuk dan pajak warga negara asing yang tidak dibayarkan dalam mata uang rupiah, sehingga besaran pendapatan dapat diukur secara tepat dalam APBN.

3. Suku Bunga BI

Suku bunga BI penting diketahui karena dengan adanya tingkat bunga ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan terkait investasi. Bank juga dapat menentukan tingkat bunga yang dijual kepada masyarakat. Selain itu pemerintah juga bisa mengambil kebijakan terkait penjualan obligasi negara dengan berpedoman pada tingkat bunga BI. Sehingga penerimaan pembiayaan dapat ditentukan dalam APBN. Pengaruh suku bunga terhadap perekonomian dapat dilihat

melalui teori Keynes. Secara teoritis, suku bunga dengan investasi memiliki *slope* negative yang berarti semakin rendah tingkat suku bunga maka akan semakin besar investasi.⁹³ Walaupun secara normatif, suku bunga bukan instrumen yang digunakan dalam transaksi ekonomi syariah namun dalam aplikasinya pengaruh suku bunga terhadap perekonomian Indonesia masih sangat besar.

Suku bunga merupakan tolak ukur dari kegiatan perekonomian suatu negara yang berimbas pada kegiatan perputaran arus keuangan perbankan, inflasi, investasi dan pergerakan currency disuatu negara. Kenaikan interest rate akan direspon para pelaku pasar dan para penanam modal untuk memanfaatkan moment tersebut guna meningkatkan produksinya dan menanamkan investasinya. Seiring dengan itu, akan berdampak juga pada jumlah produksi yang bertambah dan tenaga kerja yang juga akan semakin bertambah. Akibatnya ekspor bertambah dan jumlah pengangguran menurun, sehingga devisa yang masuk ke negara tersebut semakin menguatkan dollar terhadap mata uang lain.

Demikian pula sebaliknya, bila suku bunga menurun, produksi industri akan berkurang karena produsen akan membatasi kerugian. Apabila jumlah produksi berkurang, maka akan melemahkan mata uang tersebut. Disisi lain kenaikan suku bunga justru sangat dikhawatirkan oleh para kreditur dan tingkat penjualan perumahan yang semakin menurun karena membuat pajak pinjaman modal dan kredit perumahan semakin meningkat, tanpa didukung dalam kelancaran produksi dan bisnis yang menunjang, akan berimbas pada kredit macet seperti halnya kasus sublime mortgage yang terjadi pada tahun 2007 yang menyebabkan krisis di Amerika Serikat.

⁹³ Iskandar Putong, Economics Pengantar Mikro dan Makro. Edisi ketiga. (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2009). Secara teoritis, pengusaha akan berinvestasi jika tingkat pengembalian modal yang diperoleh melebihi tingkat bunga. Dengan demikian besarnya investasi dalam suatu jangka waktu tertentu adalah sama dengan nilai dari seluruh investasi yang tingkat pengembalian modalnya lebih besar atau sama dengan tingkat bunga. Apabila tingkat bunga rendah, maka usaha akan mempunyai tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada tingkat suku bunga. Semakin rendah tingkat bunga yang harus dibayar para pengusaha, semakin banyak investasi yang dilakukan pengusaha.

4. Inflasi

Inflasi berkaitan erat dengan kesejahteraan dan pendapatan riil masyarakat. Apabila terjadi persentase inflasi yang lebih tinggi dari pada kenaikan pendapatan nominal, maka kesejahteraan masyarakat akan turun. Pemerintah perlu memperhatikan tingkat inflasi dalam penyusunan APBN. Ketika terjadi inflasi dan harga barang – barang secara umum naik, maka diperlukan lebih banyak anggaran dalam APBN. Dalam penentuan prakiraan maju, tingkat inflasi harus dimasukkan sehingga besaran kebutuhan dana untuk beberapa tahun kedepan dapat diperkirakan. Begitu juga ketika terjadi perubahan tingkat inflasi, perhitungan kebutuhan dana dalam prakiraan maju juga akan disesuaikan.

Inflasi yang relatif rendah dan stabil merupakan prasyarat utama bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Untuk mencapai kondisi tersebut di tengah kuatnya tekanan inflasi yang bersumber dari berbagai faktor eksternal dan faktor internal, diperlukan kebijakan yang tepat demi terjaganya stabilitas ekonomi makro ekonomi, dan pengendalian inflasi ke depan. Koordinasi yang baik dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan menjadikan sasaran inflasi lebih kredibel. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk menjamin tersedianya pasokan dan lancarnya distribusi barang dan jasa. Koordinasi yang komprehensif dan terpadu antara pusat dan daerah, serta antara Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut diharapkan dapat menjaga kestabilan harga domestik, yang pada akhirnya dapat mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Menurut Siddiqy, kebijakan fiskal memiliki peran untuk mengontrol inflasi. *Pertama*, berdasarkan tujuan dari ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam menurut Siddiqi harus memenuhi syarat keadilan dan kewajaran. Peran pemerintah harus lebih fokus pada penanganan kegagalan sektor swasta. Kebijakan untuk pengelolaan keuangan dalam pandangan Islam lebih fokus pada pelarangan bunga (interest), perjudian dan manipulasi (maysir dan gharar),

minimalisasi dari moral hazard dan ketidakpastian (uncertainty) dan membatasi intervensi pemerintah di pasar. Pengendalian inflasi juga dapat dilakukan dengan melakukan moderasi (penghematan) dalam konsumsi dan membenahi keberadaan uang publik, dimana uang publik harus memiliki nilai yang stabil. Moderasi dalam konsumsi dianggap sangat penting dan efektif mengendalikan inflasi, pada tataran ini terlihat Siddiqi meyakini kebijakan pada sisi demand merupakan hal penting untuk mengendalikan inflasi. Moderasi konsumsi akan memberikan dampak jangka panjang yang mapan bagi pembangunan ekonomi. Pada tataran ini ekonomi Islam yang dijelaskan Siddiqi memiliki perbedaan terbuka dengan pandangan ekonom-ekonom liberal, yang meyakini bahwa konsumsi yang tinggi akan menstimulus perekonomian melalui peningkatan output.

Kebijakan fiskal yang mengarahkan terjadinya moderasi konsumsi dapat dilakukan melalui pengenaan pajak yang tinggi pada barang-barang dan jasa tertentu. Siddiqi menyatakan kebijakan fiskal yang dirancang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yang akan mampu menuntaskan permasalahan inflasi. Hal ini didasarkan pada: *Pertama*, dalam sistem ekonomi Islam hutang keuangan, yang menjadi sumber utama dari inflasi dan ketidakstabilan dilaksanakan berdasarkan bagi hasil (lose and profit sharing) yang mengintegrasikan tabungan dan investasi sehingga mencegah terjadinya inflasi. *Kedua*, Membayar zakat, kewajiban membayar zakat sangat melekat dalam hukum Islam untuk melakukan redistribusi sumber daya. Zakat merupakan jawaban terhadap ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan sehingga akan memberikan dampak perubahan pada komposisi agregat demand dan mengurangi fluktuasi agregat demand. *Ketiga*, Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan konsumsi secara proporsional (*moderation consumption*), hal ini akan mengurangi fluktuasi agregat demand. *Keempat*, pemerintah Islam berusaha memperbaiki uang publik sebagai kepercayaan sehingga gejolak kurs dapat dikurangi., pinjaman publik harus dikurangi sehingga terhindar dari defisit anggaran. Pencetakan uang baru hanya akan memunculkan inefisiensi. Namun, Siddiqi tidak menafikan bahwa dalam sejarah perekonomian Islam tetap terjadi inflasi.

D. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian tentang hubungan antara variable makro ekonomi dengan APBN telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain W Rismawati pada tahun 2013 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel pajak dan variabel makro terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Variabel Pajak diantaranya adalah KPP dan wajib pajak, sedangkan variabel makro adalah pertumbuhan ekonomi dan suku bunga. Penelitian ini menggunakan data sekunder time series tahun 2001-2012 yang diambil dari Biro Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan beberapa jurnal serta literatur lain yang relevan berhubungan dengan penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel bebas nya adalah KPP, wajib pajak, pertumbuhan ekonomi dan suku bunga. Sedangkan variabel terikatnya adalah penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan time series 2001-2012 dipengaruhi secara positif oleh variabel KPP, wajib pajak, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan.⁹⁴

Kementerian keuangan dengan judul *Model Makro APBN: Dampak Kebijakan APBN terhadap Beberapa Indikator utama Pembangunan* Penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan subsidi energy berdampak positif bagi peningkatan output di sector pertanian dimana output meningkat sebesar 3.12%, peningkatan ini direnspon dengan peningkatan permintaan tenaga kerja dan peningkatan pendapata sektoral. Dari kebijakan peningkatan subsidi Energi sebesar 10 persen terlihat bahwa hampir diseluruh sektor output, pendapatan, dan permintaan tenaga kerja mengalami peningkatan. Kecuali di beberapa sektor tertentu seperti sektor perikanan, industri makanan, minuman, dan tembakau; industri kertas, barang dari kertas, dan industri minyak dan gas. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi biaya produksi untuk sektor tersebut relative kecil dibandingkan untuk pengeluaran

⁹⁴ Rismawati, Pengaruh Variabel Pajak Dan Variabel Makroekonomi Terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus: Tahun 2001-2012), 2013 dapat di download di portalgaruda.org.

biaya lain seperti pengeluaran tenaga kerja, biaya sewa dan biaya lain yang harus dikeluarkan dalam proses produksi.⁹⁵

Penelitian lain berjudul *Pengaruh Perubahan Asumsi Makro Terhadap Defisit APBN Tahun 2014*. Hasil penelitian menunjukkan asumsi makro memiliki pengaruh terhadap defisit APBN tahun 2014 baik pengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung. Dari hasil analisis data, asumsi makro pertumbuhan ekonomi dan SPN 3 bulan yang memiliki pengaruh langsung dengan defisit APBN, sedangkan inflasi, kurs, lifting minyak, lifting gas, dan ICP memiliki pengaruh tidak langsung terhadap APBN. Asumsi makro tersebut mempengaruhi defisit APBN melalui pertumbuhan ekonomi.⁹⁶

Dari penelitian-penelitian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan umum bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga secara ilmiah dapat dilaksanakan.

⁹⁵ Kementerian Keuangan. Model Makro APBN: Dampak Kebijakan APBN terhadap Beberapa Indikator utama Pembangunan, dapat diunduh di www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/.../makroAPBN-140311.pdf

⁹⁶ FAnonim, *Pengaruh Perubahan Asumsi Makro Terhadap Defisit APBN Tahun 2014*, dapat diunduh di www.dpr.go.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan dan dianggap relevan dengan studi yang sedang dilakukan. Metode penelitian yang dijabarkan dalam bagian ini mencakup lokasi/tempat penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, data penelitian data, analisis data serta definisi operasional variabel.

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan keilmuan melalui metode ilmiah yang didasarkan pada fakta empirik. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab-akibat dari suatu peristiwa/ fenomena, berdasarkan faktor-faktor yang dianggap menjadi penyebabnya melalui data tertentu. Menurut Kadir, penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel diukur dengan instrument penelitian yang menghasilkan data berbentuk angka-angka dan dianalisa dengan prosedur-prosedur statistik. Menggunakan asumsi-asumsi untuk menguji teori, mengontrol penjelasan-penjelasan alternative dan bertujuan untuk menentukan apakah generalisasi prediktif dari teori yang diteliti dapat

terbukti kebenarannya.⁹⁷ Adapun pola berfikir yang dipakai adalah dengan memakai metode deduktif. Artinya pola berpikir yang bersifat umum dan global dipakai untuk berfikir lokal khusus, kemudian baru diberlakukan kembali kepada yang bersifat global dan umum.

B. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan peneliti investigasi. Populasi juga dapat dipahami sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan, yaitu yang berkenaan dengan jumlah objek yang diteliti serta wilayah penelitian yang akan diteliti. Tujuan dilakukannya penelitian terhadap populasi adalah agar dapat ditentukan besarnya sampel penelitian dan membatasi daerah penelitian⁹⁸. Populasi penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Republik Indonesia, Tingkat Inflasi, Kurs, SBI, dan Harga Minyak Dunia. Sedangkan sampel sebagai bagian dari populasi digunakan untuk representasi dari populasi secara keseluruhan. Untuk besaran sampel sangat tergantung pada besaran kesalahan yang diinginkan oleh peneliti. Makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil sampel yang diperlukan, walaupun secara umum tingkat kesalahan penelitian social sebesar 0.05. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka sampel penelitian ini adalah harga minyak dunia, suku bunga Bank Indonesia, Inflasi, Kurs dan APBN dari tahun 1990-2015.

C. Data Penelitian

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk angka/numeric. Dari sisi cara memper-

⁹⁷ Kadir. Statistika Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian. (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 1

⁹⁸ Husain Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995) h. 181

olehnya, data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dan telah dipublikasi. Menurut Suryani, data sekunder ini sudah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.⁹⁹ Sedangkan dari sisi waktu penggunaannya, data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data times series tentang harga minyak dunia, suku bunga Bank Indonesia, Inflasi, Kurs dan APBN dari tahun 1990-2015. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu peristiwa selama periode spesifik yang diamati. Data yang dikumpulkan adalah data bulanan yang dapat diakses melalui **www.bi.go.id**, **www.idx.com**, **www.esdm.go.id** dan **www.bps.go.id**

D. Metode Analisis Data

Metode analisa yang dipergunakan adalah analisa kuantitatif yaitu dengan menggunakan model VAR/VECM. Model VAR yang dikembangkan oleh Sims yang mengasumsikan bahwa seluruh variabel dalam persamaan simultan adalah variabel endogen. Asumsi ini diterapkan karena seringkali penentuan variabel eksogen dalam persamaan simultan bersifat subyektif. Dalam VAR, semua variabel tak bebas dalam persamaan juga akan muncul sebagai variabel bebas dalam persamaan yang sama.

Pendekatan VAR merupakan permodelan setiap variabel endogen dalam sistem sebagai fungsi dari lag semua variabel endogen dalam sistem. Variasi bentuk VAR biasanya terjadi akibat perbedaan derajat integrasi data variabelnya, yaitu dikenal dengan nama *VAR in level* dan *VAR in difference*. *VAR level* digunakan ketika data penelitian memiliki bentuk stasioner dalam level. Jika data tidak stasioner dalam level namun tidak memiliki (secara teoritis tidak memerlukan keberadaan) hubungan kointegrasi, maka estimasi VAR dilakukan dalam bentuk *difference*.

⁹⁹ Suryani dan Hendryadi. Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam. (Jakarta: Kencana, 2015), h. 171

VECM merupakan bentuk VAR yang terestriksi karena keberadaan bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. VECM sering disebut sebagai desain VAR bagi series nonstasioner yang memiliki hubungan kointegrasi. Spesifikasi VECM merestriksi hubungan jangka panjang variabel-variabel endogen agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasinya, namun tetap membiarkan keberadaan dinamisasi jangka pendek.

Adapun model persamaan yang bisa diolah yakni satu model untuk masing-masing variabel yang diteliti. Berikut persamaan yang diperoleh dalam penelitian:

$$\begin{aligned} \text{APBN}_t &= \alpha + \beta_1 \text{Minyak}_{t-p} + \beta_2 \text{SBI}_{t-p} + \beta_3 \text{Inflasi}_{t-p} + \beta_4 \text{Kurs}_{t-p} + \varepsilon_T \\ \text{Minyak}_t &= \alpha + \beta_1 \text{APBN}_{t-p} + \beta_2 \text{SBI}_{t-p} + \beta_3 \text{Inflasi}_{t-p} + \beta_4 \text{Kurs}_{t-p} + \varepsilon_T \\ \text{SBI}_t &= \alpha + \beta_1 \text{APBN}_{t-p} + \beta_2 \text{Minyak}_{t-p} + \beta_3 \text{Inflasi}_{t-p} + \beta_4 \text{Kurs}_{t-p} + \varepsilon_T \\ \text{Inflasi}_t &= \alpha + \beta_1 \text{APBN}_{t-p} + \beta_2 \text{Minyak}_{t-p} + \beta_3 \text{SBI}_{t-p} + \beta_4 \text{Kurs}_{t-p} + \varepsilon_T \\ \text{Kurs}_t &= \alpha + \beta_1 \text{APBN}_{t-p} + \beta_2 \text{Minyak}_{t-p} + \beta_3 \text{SBI}_{t-p} + \beta_4 \text{Inflasi}_{t-p} + \varepsilon_T \end{aligned}$$

Analisis data secara kuantitatif dengan pendekatan model VAR, khususnya model VECM mencakup tiga alat analisis utama yaitu *Granger Causality Test*, *Impulse Response Function* dan *Variance Decomposition*. Sebelum sampai pada analisis VAR atau VECM ada beberapa prosedur estimasi yang akan digunakan dalam studi ini, yaitu terdiri dari: (1). Uji akar-akar unit (*unit root test*), (2). Penentuan Panjang Lag, dan (3). Uji Kointegrasi (*Johansen Cointegration Test*).

1. Uji Stasioner (*Unit Root Test*)

Pengujian akar unit ini sering juga disebut dengan *stationary stochastic process*, karena pada prinsipnya uji tersebut dimaksudkan untuk mengamati apakah koefisien tertentu dari model otogresif yang ditaksir mempunyai nilai satu atau tidak. Dalam analisis *time series*, informasi tentang stasioneritas suatu data *series* merupakan hal yang sangat penting karena mengikutsertakan variabel yang nonstasioner ke dalam persamaan estimasi koefisien regresi akan mengakibatkan *standard error* yang dihasilkan jadi bias. Adanya bias ini akan menyebabkan kriteria konvensional yang biasa digunakan untuk menjustifikasi kausalitas antara dua variabel menjadi tidak valid. Artinya, estimasi

regresi dengan menggunakan suatu variabel yang memiliki *unit root* (data nonstasioner) dapat menghasilkan kesimpulan (*forecasting*) yang tidak benar karena koefisien regresi penaksir tidak efisien.

Pada penelitian ini, uji stasioneritas dilakukan dengan menggunakan metode *Augmented Dickey-Fuller Test* (ADF). Uji stasioneritas ini didasarkan atas hipotesis nol variabel stokastik memiliki *unit root*. Dengan menggunakan model uji ADF test, hipotesis nol dan dasar pengambilan keputusan lainnya yang digunakan dalam uji ini didasarkan pada nilai kritis MacKinnon sebagai pengganti uji-t. Selanjutnya nisbah t tersebut dibandingkan dengan nilai kritis statistik pada t tabel ADF untuk mengetahui ada atau tidaknya akar-akar unit. Jika hipotesa diterima berarti variabel tersebut tidak stasioner, maka perlu dilakukan uji derajat integrasi. Uji derajat integrasi dimaksudkan untuk melihat pada derajat atau order diferensi ke berapa data yang diamati akan stasioner.

2. Penentuan Lag Optimum

Sebelum melakukan uji kointegrasi perlu dilakukan penentuan panjang lag. Karena uji kointegrasi sangat peka terhadap panjang lag, maka penentuan lag yang optimal menjadi salah satu prosedur penting yang harus dilakukan dalam pembentukan model (Enders, 2004). Secara umum terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan panjang lag yang optimal, antara lain AIC (*Akaike Information Criterion*), SIC (*Schwarz Information Criterion*) dan LR (*Likelihood Ratio*). Penentuan panjang lag yang optimal didapat dari persamaan VAR dengan nilai AIC, SC atau LR yang terkecil.

3. Uji Kausalitas Granger (*Granger's Causality Test*)

Uji kausalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhannya antar variabel. Jika ada dua variabel y dan z , maka apakah y menyebabkan z atau z menyebabkan y atau berlaku keduanya atau tidak ada hubungan keduanya. Variabel y menyebabkan variabel z artinya berapa banyak

nilai z pada periode sekarang dapat dijelaskan oleh nilai z pada periode sebelumnya dan nilai y pada periode sebelumnya.

Uji kausalitas dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya metode *Granger's Causality* dan *Error Correction Model Causality*. Pada penelitian ini, digunakan metode *Granger's Causality*. *Granger's Causality* digunakan untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara dua variabel. Kekuatan prediksi (*predictive power*) dari informasi sebelumnya dapat menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara y dan z dalam jangka waktu lama. Penggunaan jumlah lag (efek tunda) dianjurkan dalam waktu lebih lama, sesuai dengan dugaan terjadinya kausalitas.

4. Uji Kointegrasi (*Johansen's Cointegration Test*)

Kointegrasi merupakan kombinasi hubungan linear dari variabel-variabel yang nonstasioner dan semua variabel tersebut harus terintegrasi pada orde atau derajat yang sama. Variabel-variabel yang terintegrasi akan menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai *trend* stokhastik yang sama dan selanjutnya mempunyai arah pergerakan yang sama dalam jangka panjang. Uji kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji akar-akar unit dan uji derajat integrasi. Untuk melakukan uji kointegrasi, pertama-tama peneliti perlu mengamati perilaku data ekonomi runtun waktu yang akan digunakan. Ini berarti pengamat harus yakin terlebih dahulu apakah data yang akan digunakan stasioner atau tidak, yang antara lain dapat dilakukan dengan uji akar-akar unit dan uji integrasi. Apabila terjadi satu atau lebih variabel mempunyai derajat integrasi yang berbeda, maka variabel tersebut tidak dapat berkointegrasi (Engle dan Granger, 1987). Dalam penelitian ini, pengujian kointegrasi menggunakan metode *Johansen's Multivariate Cointegration Test*.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun 2000 merupakan era baru bagi perkembangan fiskal Indonesia terutama dalam hal jangka waktu berlakunya APBN. Pada tahun sebelumnya, jangka waktu APBN adalah 1 April hingga 31 Maret pada tahun berikutnya. Namun mulai tahun 2000, waktu berlakunya APBN adalah 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember pada tahun yang sama. Perubahan kedua adalah cara penyajian APBN yang mengikuti standar internasional, yaitu dengan menggunakan konsep Government Finance Statistics (GFS). Sedangkan perubahan ketiga adalah APBN disusun berdasarkan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 serta diliputi semangat otonomi daerah.

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

Tabel 2. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 1999-2003

Uraian	2000		2001		2002		2003	
	R	%	R	%	R	%	R	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah	205,3	20,8	301,1	20,8	298,6	18,5	341,4	19,1
I. Penerimaan Dalam Negeri	205,3	20,7	300,6	20,1	298,5	18,5	340,9	19,1
1. Penerimaan Perpajakan	115,9	11,8	185,5	12,4	210,1	13,0	242,0	13,5
a. Pajak dalam Negeri	108,9	11,0	176,0	11,8	199,5	12,4	230,9	12,9
b. Pajak Perdagangan Internasional	7,0	0,7	9,5	0,6	10,6	0,7	11,1	0,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	89,4	9,1	115,1	7,9	88,4	5,5	98,9	5,5
a. Penerimaan SDA	76,3	7,7	85,7	5,9	64,8	4,0	67,5	3,8
b. Penerimaan BUMN	4,0	0,4	8,8	0,6	9,8	0,6	12,6	0,7
c. PNBP Lainnya	9,1	0,9	20,6	1,4	13,9	0,9	18,8	1,0
II. Hibah	-	-	0,5	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0
B. Belanja Negara	221,4	22,5	341,6	23,6	322,2	20,0	376,5	21,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	188,3	19,1	260,5	18,0	224,0	13,9	256,2	14,3
II. Belanja ke Daerah	33,1	3,4	81,1	5,6	98,2	6,1	120,3	6,7
C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	-16,1	-1,6	-40,5	-2,8	-23,6	-1,5	-35,1	-2,0
D. Pembiayaan (I + II)	16,1	1,6	40,5	2,8	23,6	1,5	32,7	1,8
I. Pembiayaan Dalam Negeri	5,9	0,6	30,2	2,1	16,9	1,1	32,1	1,8
1. Perbankan Dalam Negeri	-13,0	-1,3	-1,2	-0,1	-8,2	-0,5	8,3	0,5
2. Non-Perbankan Dalam Negeri	18,9	1,9	31,4	2,2	25,2	1,6	23,9	1,3
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	10,2	1,0	10,3	0,7	6,6	0,4	0,5	0,0
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	17,8	1,8	26,2	1,8	18,9	1,2	20,4	1,1
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	-7,6	-0,8	-15,9	-1,1	-12,3	-0,8	-19,8	-1,1

Pada tahun 2003, di Indonesia berlaku Undang-undang Nomor 17 mengenai Keuangan Negara. Undang-undang ini menjadi dasar penyusunan APBN tahun 2005 dan tahun-tahun selanjutnya. Undang-undang ini menetapkan beberapa ketentuan dalam penyusunan APBN. Beberapa ketentuan tersebut antara lain

- Meniadakan pengelompokan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
- Penyesuaian penyusunan APBN pada masa peralihan kekuasaan pada tahun 2004 yang telah lalu. Ada beberapa kekhususan APBN tahun 2005. Kekhususan tersebut bertujuan untuk dapat tetap menjamin kesinambungan fiskal dan memberikan ruang bagi pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2004 untuk melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan prioritas kebijakan fiskal

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

Tabel 3. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 2004-2005				
Uraian	2004		2005	
	Realisasi	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah	407,9	17,7	495,0	18,1
I. Penerimaan Dalam Negeri	407,6	17,7	493,7	18,1
1. Penerimaan Perpajakan	280,9	12,2	346,8	12,7
a. Pajak dalam Negeri	268,2	11,6	331,6	12,1
b. Pajak Perdagangan Internasional	12,7	0,6	15,2	0,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	126,7	5,5	146,9	5,4
a. Penerimaan SDA	91,4	4,0	110,6	4,1
b. Penerimaan BUMN	9,8	0,4	12,8	0,5
c. PNBP Lainnya	25,5	1,1	23,5	0,9
II. Hibah	0,3	0,0	1,3	0,0
B. Belanja Negara	437,7	19,0	507,4	18,6
I. Belanja Pemerintah Pusat	308,1	13,4	356,9	13,1
II. Belanja ke Daerah	129,7	5,6	150,5	5,5
C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	-29,9	-1,3	-12,4	-0,5
D. Pembiayaan (I + II)	25,8	1,1	19,5	0,7
I. Pembiayaan Dalam Negeri	48,9	2,1	30,7	1,1
1. Perbankan Dalam Negeri	22,7	1,0	6,8	0,2
2. Non-Perbankan Dalam Negeri	26,1	1,1	23,9	0,9
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	-23,0	-1,0	-11,3	-0,4
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	23,5	1,0	25,9	0,9
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	-46,5	-2,0	-37,1	-1,4

Sebagai respon dalam menyelamatkan perekonomian nasional, dan sekaligus meminimalisasi dampak krisis ekonomi dan keuangan global, terutama terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dilakukan dengan menerapkan kebijakan anggaran deficit, pemerintah membeikan stimulus fiskal sebagaimana tercermin dalam APBN tahun 2008 dan 2010. Dibandingkan dengan dengan persentase defisit pada periode sebelum 2007, besarnya defisit APBN-P pada tahun 2008 dan 2009 tersebut relatif lebih tinggi, yaitu berada pada kisaran 2,1 persen dan 2,4 persen terhadap PDB. Namun demikian, peningkatan defisit yang digunakan untuk memberikan stimulus fiskal tidak sepenuhnya dapat terealisasi sebagaimana yang direncanakan. Hal ini ditunjukan melalui realisasi defisit tahun 2008 dan 2009 yang lebih rendah dari yang ditargetkan, yaitu hanya sebesar 0,1 persen.

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

TABEL
RINGKASAN APBN, 2005–2010 (dalam miliar rupiah)

	2005	2006	2007	2008	2009		2010
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	RAPBN-P	RAPBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	495.224,2	637.987,2	707.806,1	981.609,4	985.725,3	872.631,8	911.475,8
I. Penerimaan Dalam Negeri	493.919,4	636.153,1	6.108,3 70	979.305,4	984.786,5	871.640,2	910.054,3
Penerimaan Perpajakan .1	347.031,1	409.203,0	490.988,6	658.700,8	725.843,0	652.121,9	729.165,2
a. Pajak dalam Negeri	331.791,9	395.971,5	51,8 470.0	622.358,7	697.347,0	632.098,8	702.033,9
b.Pajak Perdagangan Internasional	15.239	13.231 2	20.936 5	36.342 8	28.496 1	20.023 0	27.131 1
Penerimaan Negara Bukan Pajak .2	146.888	226.950 3	215.119 1	320.604 7	258.943 6	219.518 6	180.889 3
II. Hibah	1.304	1.834 8	1.697 1	2.304 7	938 0	991 8	1.421 6
B. Belanja Negara	509.632	667.128 4	757.649 7	985.730 9	1.037.067 7	1.005.673 3	1.009.485 6
I. Belanja Pemerintah Pusat	361.155	440.032 2	504.623 0	693.355 3	716.376 9	696.101 4	699.688 4
K/L .1	120.823	216.094 0	225.014 7	262.003 2	322.317 3	316.989 4	327.556 0
Non K/L .2	240.332	223.937 2	279.609 3	431.352 1	394.059 7	379.112 0	372.131 4
II. Transfer Ke Daerah	150.463	226.179 9	253.263 9	292.433 2	320.691 5	309.572 0	309.797 3
Dana Perimbangan .1	143.221	222.130 3	243.967 6	278.714 2	296.952 7	285.317 4	292.979 2
Dana Otonomi Khusus &Penyesuaian .2	7.242	4.049 6	9.296 3	13.718 0	23.738 8	24.255 6	16.818 1
III. Suspen	(1.9867)	916,8	(236.5)	(58.7)	0.0	0 0	0 0
C. Keseimbangan Primer	50.791	49.941 4	29.962 1	84.308 6	8.50.315 5	(0 .22.991)	17.584
(D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B	(14.408.2)	(29.141.5	(8.49.843)	(3 .4.121)	(0 .51.342)	(8 .133.041)	98.009)
(E. Pembiayaan (E.I + E.II	11.121	29.415 2	42.456 6	84.071 5	51.342 7	133.041 0	98.009 8
I. Pembiayaan Dalam Negeri	21.393	55.982 2	69.032 1	102.477 3	60.790 6	144.820 3	107.891 9
(II. Pembiayaan Luar negeri (neto	.10.272)	.26.566)	(8 .26.575)	.18.405)	(2 .9.448)	(1 .11.779)	(9.881.5)
	(0	(5		(9			
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	(3.287,0)	274,1	(7.387,2)	79.950,4	0	0	0

Dengan adanya defisit anggaran, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membiayai defisit tersebut. Jenis pembiayaan yang dilakukan dapat dikategorikan menjadi pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri bersumber dari perbankan dalam negeri dan non perbankan dalam negeri. Adapun pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Perkembangan selama periode 2005-2010 menunjukkan bahwa pemerintah lebih memfokuskan pembiayaan anggaran kepada pembiayaan dalam negeri dan semakin mengurangi ketergantungan kepada utang luar negeri, meskipun pada tahun 2011 diperkirakan menurun.

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

TABEL
(RINGKASAN APBN, 2011–2014 (dalam miliar rupiah

	2011	2012	2013	2014
	LKPP	LKPP	APBNP	RAPBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.210,6	1.338,1	1.502,0	1.662,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.205,3	1.332,3	1.497,5	1.661,1
Penerimaan Perpajakan .1	873,9	980,5	1.148,4	1.310,2
Penerimaan Negara Bukan pajak .2	331,5	351,8	349,2	350,9
II. Hibah	5,3	5,8	4,5	1,4
B. Belanja Negara	1.295,0	1.491,4	1.726,2	1.816,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	883,7	1.010,6	1.196,8	1.230,3
K/L .1	417,6	489,4	622,0	612,7
Non K/L .2	466,1	521,1	574,8	617,7
II. Transfer Ke Daerah	411,3	480,6	529,4	586,4
Dana Perimbangan .1	347,2	411,3	445,5	481,8
Dana Otonomi Khusus &Penyesuaian .2	64,1	69,4	83,8	104,6
C. Keseimbangan Primer	8,9	(52,8)	(111,7)	(34,7)
(D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B	(84,4)	(153,3)	(224,2)	(154,2)
Defisit Terhadap PDB %	(1,14)	(1,86)	(2,38)	(1,49)
(E. Pembiayaan (E.I + E.II	130,9	175,2	224,2	154,2
I. Pembiayaan Dalam Negeri	148,7	198,6	241,1	173,2
(II. Pembiayaan Luar negeri (neto	(17,8)	(23,5)	(16,9)	(19,0)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	46,5	21,9	0	0

Fakta yang menarik dari perkembangan APBN adalah bahwa pada tahun 2011, jumlah pendapatan negara dari penerimaan dalam negeri akan melampaui Rp 1.000 triliun. Sumbangan terbesar tetap diberikan oleh penerimaan perpajakan, khususnya pajak dalam negeri. Adapun PNPB diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan. Dalam hal belanja negara, jumlah Rp 1.000 triliun telah terlampaui pada tahun 2010 atau setahun lebih awal dibandingkan pendapatan negara dan hibah. Belanja pemerintah pusat pada APBN Perubahan (APBN-P) 2010 maupun APBN 2011 tercatat masih lebih besar dibandingkan dengan transfer ke daerah. Meskipun demikian, di dalam komponen belanja

pemerintah pusat terdapat komponen dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang disalurkan kepada pemerintah daerah. Dengan komposisi pendapatan negara dan hibah serta belanja negara tersebut, keseimbangan primer diperkirakan positif kembali pada tahun 2011, setelah pada tahun 2010 bernilai negatif. Demikian pula dengan defisit anggaran yang ditargetkan menurun pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010. Untuk menutup defisit, diupayakan pembiayaan yang difokuskan pada sumber-sumber di dalam negeri.

Tahun 2000-2014, antara pendapatan dan belanja Negara, Negara mengalami defisit, yang berarti pendapatan Negara lebih kecil dari belanja negara.¹⁰⁰ Defisit merupakan permasalahan Negara yang menjadi topik serius untuk penyelesaiannya. Negara dalam hal ini pemerintah melakukan pembiayaan baik pembiayaan dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri untuk menutupi defisit Negara tersebut. Masalah ini merupakan masalah yang delimitis bagi pemerintah, karena roda pemerintahan harus tetap berjalan walaupun Negara mengalami defisit anggaran, oleh Karena itu pemerintah harus melakukan pembiayaan. Akan tetapi pemerintah harus berhati-hati terhadap pembiayaan karena pembiayaan juga bisa membawa dampak yang negative jika pemerintah tidak bisa membayarnya sehingga akan menimbulkan utang Negara.

2. Harga Minyak Dunia

Harga minyak dunia merupakan salah satu variabel ekonomi makroyang berpotensi besar mempengaruhi seluruh aspek ekonomi. Pengaruh kenaikan harga minyak terhadap perekonomian terjadi melalui dua saluran. Saluran pertama melalui efek *terms of trade* yakni pengalihan pendapatan dari negara pengimpor minyak ke negara pengeksport minyak. Sedangkan saluran kedua melalui efek inflasi yakni kenaikan harga sehingga mengakibatkan naiknya biaya input.¹⁰¹

¹⁰⁰ Data dan uraian lengkap APBN dapat dilihat di Nota Keuangan dan RAPBN di www.kemenkeu.go.id

¹⁰¹ Lutz Kilian. Oil Price Volatility: Origins and Effects. (World Trade Organization Report 2010 on "Trade in Natural Resources: Challenges in Global

Penelitian yang dilakukan Wang menunjukkan bahwa fluktuasi harga minyak berdampak besar bagi perekonomian dan pasar modal. Ketika harga minyak naik, perekonomian cenderung akan resesi dan memicu jatuhnya pasar modal.¹⁰²

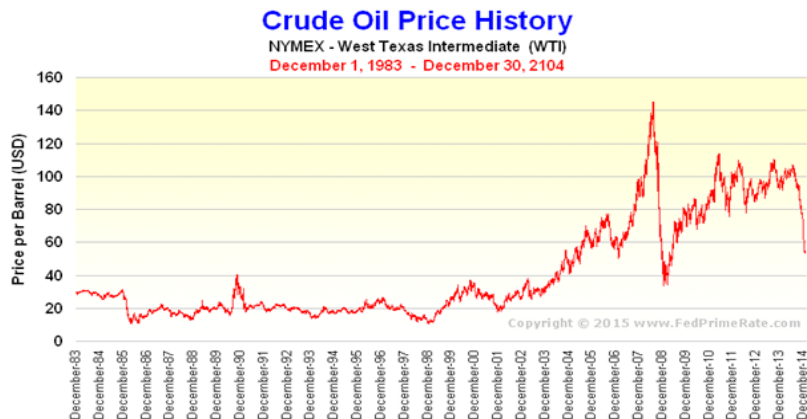
Mengingat komoditas minyak memiliki keterkaitan yang kuat terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat (utamanya masyarakat moderen), segala sesuatu yang terkait dengan minyak (utamanya pergerakan harga), menjadi perhatian masyarakat luas. Proyeksi atau outlook pergerakan harga minyak dunia, menjadi penting pada saat ini. Proyeksi tersebut tidak hanya penting bagi pemerintah untuk mengetahui sejauhmana resiko fiskal APBN, akan tetapi juga penting bagi pelaku ekonomi bisnis secara keseluruhan.

Perubahan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi global. Pada Juli 2008, harga minyak mentah dunia sempat mencapai 145 dolar AS per barel. Kenaikan ini menjadi pemicu meningkatnya harga komoditas-komoditas termasuk bahan makanan, dan pada akhirnya ikut memperparah inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Selain karena arus tarik menarik antara permintaan dan pasokan minyak dunia, fluktuasi harga minyak diperparah ketika melihat besarnya dampak krisis *Subprime Mortgage* yang dihadapi AS tahun 2008 lalu. Hal tersebut memicu adanya *flight to commodity* atau reorientasi para pelaku pasar modal yang mengalihkan investasi bursa keuangan ke bursa komoditas menjadi salah satu sebab kenaikan harga komoditas

Governance,” 2010).

¹⁰² Mu-lan Wang, Ching-Ping Wang dan Tzu-Ying Huang. 2010. “Relationship Among Oil Price, Gold Price, Exchange Rate And International Stock Market”. International Research Journal of Finance and economics ISSN 1450-2887 Issue 47.

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015



Berdasarkan data di atas, harga minyak dunia terutama pada tahun 2014 cenderung menurun. Penurunan harga minyak mentah dunia ini terutama dipengaruhi oleh tiga hal: proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah, pelemahan pertumbuhan permintaan (*oil demand*), dan peningkatan produksi yang tidak diharapkan dari Libya dan Arab Saudi yang merupakan indikasi bahwa upaya pengurangan produksi minyak mentah, khususnya dari OPEC, akan gagal. Seiring dengan penurunan harga minyak mentah dunia tersebut, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) juga mengalami penurunan. Penurunan harga minyak ini, tentunya membawa sejumlah konsekuensi. Rendahnya harga minyak tentunya akan menurunkan proyeksi penerimaan APBN dari sisi migas. Di sisi lain, penurunan harga minyak mentah juga memberikan efek positif bagi sisi pengeluaran (belanja) negara (APBN). Sebagai negara *net oil importer*, rendahnya harga minyak mentah seharusnya dapat menyebabkan tekanan terhadap belanja subsidi BBM menjadi berkurang.¹⁰³

3. Suku Bunga

Suku bunga yang dikendalikan oleh Bank Indonesia merupakan variabel makro ekonomi yang mempengaruhi perekonomian secara agregat. Perubahan suku bunga BI dapat memicu pergerakan di pasar

¹⁰³ Lihat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011 di www.esdm.go.id

saham Indonesia. Penurunan suku bunga BI secara otomatis akan memicu penurunan tingkat suku bunga kredit maupun deposito. Bagi para investor, penurunan tingkat suku bunga, akan mengurangi tingkat keuntungan yang diperoleh

bila dana diinvestasikan dalam bentuk deposito. Penurunan suku bunga juga akan memperkecil biaya modal, memudahkan perusahaan untuk memperoleh dana sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas akan mendorong peningkatan laba, hal ini menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di pasar modal.

Gambar: Perkembangan Suku Bunga BI Tahun 2006-2013



Pengaruh suku bunga terhadap pasar modal dapat dilihat melalui teori Keynes. Secara teoritis, suku bunga dengan investasi memiliki *slope* negative yang berarti semakin rendah tingkat suku bunga maka akan semakin besar investasi.¹⁰⁴ Walaupun secara normatif, suku

¹⁰⁴ Iskandar Putong, Economics Pengantar Mikro dan Makro. Edisi ketiga. (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2009). Secara teoritis, pengusaha akan berinvestasi jika tingkat pengembalian modal yang diperoleh melebihi tingkat bunga. Dengan demikian besarnya investasi dalam suatu jangka waktu tertentu adalah sama dengan nilai dari seluruh investasi yang tingkat pengembalian modalnya lebih

bunga bukan instrumen yang digunakan dalam transaksi ekonomi syariah namun dalam aplikasinya pengaruh suku bunga masih cukup besar. Beberapa penelitian seperti Albaity dan Wahyudi menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap kinerja saham syariah.¹⁰⁵

4. Inflasi

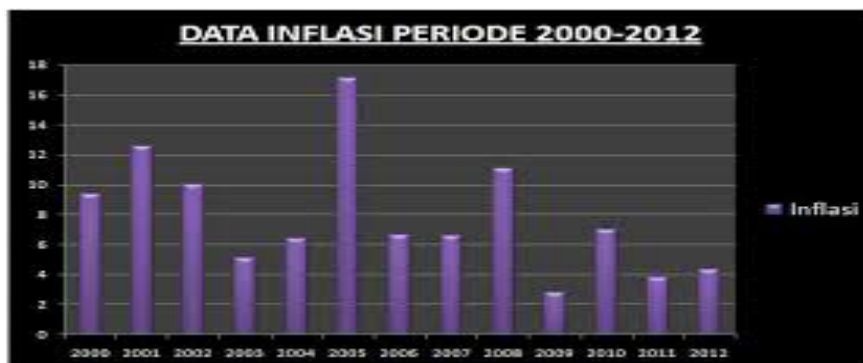
Inflasi merupakan salah satu variabel makro yang memiliki dampak besar terhadap kegiatan perekonomian, baik terhadap sektor riil terlebih terhadap sektor keuangan. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dari barang atau jasa selama suatu periode tertentu. Tingkat inflasi diukur dengan menggunakan perubahan tingkatan harga secara umum, yaitu indeks harga konsumen (*consumer price index*),¹⁰⁶ indeks harga produsen (*producer price index*) atau *implicit gross domestic product deflator* (GDP deflator) yang menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

besar atau sama dengan tingkat bunga. Apabila tingkat bunga rendah, maka usaha akan mempunyai tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada tingkat suku bunga. Semakin rendah tingkat bunga yang harus dibayar para pengusaha, semakin banyak investasi yang dilakukan pengusaha.

¹⁰⁵ Mohamed Shikh Albaity. Impact of the Monetary Policy Instruments on Islamic Stock Market Index Return. Economics Discussion Papers, No. 2011-26 | July 18, 2011. Kiel Institute for the World Economy. <http://www.economics-ejournal.org>. Lihat juga Imam Wahyudi dan Gandhi Anwar Sani Interdependence between Islamic capital market and money market: Evidence from Indonesia. Borsa Istanbul Review Volume 14, Issue 1, March 2014, Pages 32–47

¹⁰⁶ Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, penilaian dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran, yaitu : bahan makanan; makanan jadi, minuman, dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; pendidikan dan olah raga; serta transportasi dan komunikasi. <http://www.bi.go.id/id/moneter/>

Gambar 3: Grafik Inflasi Tahun 2013



Inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena mengakibatkan gangguan pada fungsi uang sebagai penyimpan nilai, menimbulkan sifat konsumtif dan mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif seperti tanah, bangunan, logam mulia dan lainnya. Sedangkan secara teoritis terdapat hubungan negatif antara inflasi dan kinerja harga saham. Inflasi akan menurunkan nilai riil dan deviden perusahaan, sehingga kenaikan inflasi akan mengakibatkan melemahnya harga saham. Sebaliknya jika tingkat inflasi menurun maka harga saham akan mengalami penguatan.¹⁰⁷

5. Nilai Tukar

Nilai tukar atau kurs merupakan perbandingan nilai tukar dua mata uang yang berbeda. Nilai tukar sesungguhnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat suku bunga dalam negeri, tingkat inflasi, dan intervensi bank sentral terhadap pasar uang. Kurs mempunyai peran penting dalam stabilitas moneter dan mendukung kegiatan ekonomi, sehingga nilai tukar sering diindikasikan sebagai salah satu indikator kestabilan ekonomi.

¹⁰⁷ Mohd Yahya Mohd Hussin. "Macroeconomic Variables and Malaysian Islamic Stock Market: A Time Series Analysis." *Journal of Business Studies Quarterly* 2012, Vol. 3, No. 4, pp. 1-13

Gambar : Fluktuasi Kurs Rupiah



Penelitian Luehrman menunjukkan bahwa depresiasi mata uang mempengaruhi daya saing perusahaan yang bergerak dalam kompetisi internasional.¹⁰⁸ Dominguez,¹⁰⁹ Di Iorio,¹¹⁰ Savasa¹¹¹ dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar tertentu sangat signifikan mempengaruhi perusahaan, meskipun perusahaan secara dinamis menyesuaikan bisnisnya untuk mengatasi risiko nilai tukar. Perubahan nilai tukar sangat mempengaruhi perusahaan terutama perusahaan yang tercatat di bursa.

¹⁰⁸ Luehrman, T.A. 1991. Exchange Rate Changes and The Distribution of Industry Value, *Journal of International Business Studies*, Volume 22, pp. 619-649.

¹⁰⁹ Kathryn Dominguez, M.E. dan L.Tesar, Linda. 2006. Exchange rate exposure, *Journal of International Economics*, Volume. 68, pp.188-218.

¹¹⁰ Di Iorio, Amalia dan Faff, Robert. 2001. Foreign Exchange Exposure and Pricing in the Australian Equities Market: A Fama and French Framework, *School of Economics and Finance*.

¹¹¹ Savasa, Bilal and Samiloglub, Famil. 2010. The Impact of Macroeconomic Variables on Stock Return in Turkey: an ARDL Bounds Testing Approach. *Afyon Kocatepe Üniversitesi IIBF Dergisi*, pp. 12-1.

B. Analisa Data

1. Uji Stasioner Data

Sesuai dengan teknis analisis data urutan waktu (*time series*), untuk data urutan waktu memerlukan pengujian kestasioneran terlebih dahulu. Data urutan waktu yang langsung dianalisis akan menimbulkan *spurious* (kelancungan) sehingga koefisien yang dihasilkan tidak efisien. Untuk itu, dilakukan *unit root test* dengan menggunakan pendekatan *Augmented Dickey-Fuller (ADF)* guna meyakinkan bahwa data yang dipergunakan bebas dari permasalahan *unit root* atau stasioner. Dalam menguji stasioner data dipergunakan software eviews 5. Adapun metode yang digunakan untuk melakukan *unit root test* dalam penelitian ini adalah *Augmented Dickey-Fuller Test (ADF Test)*.

Table 2: Hasil Uji Stasioner

Variabel	Unit Root	ADF Test Statistic	Critical Value 5%	Prob	Keterangan
APBN	Level	3.499692	-2.991878	1.0000	Tidak Stasioner
	First diff	-4.141455	-2.991878	0.0040	Stasioner
Inflasi	Level	-5.250008	-2.986225	0.0003	Stasioner
Kurs	Level	-1.460783	-2.986225	0.5364	Tidak Stasioner
	First diff	-6.171414	-2.991878	0.0000	Stasioner
Minyak	Level	-2.553009	-2.986225	0.1158	Tidak Stasioner
	First diff	-5.400000	-2.991878	0.0002	Stasioner
SBI	Level	-3.658709	-2.986225	0.0116	Stasioner

Standar untuk menentukan stasioner atau tidaknya sebuah data adalah nilai ADF. Jika nilai ADF lebih besar dari nilai kritis, maka H_0 diterima yang berarti terdapat akar unit dan tidak stasioner. Sebaliknya, jika nilai ADF lebih kecil dari nilai kritis 5%, maka H_0 ditolak yang berarti tidak ada akar unit dan data stasioner. Berdasarkan

table di atas diketahui nilai ADF untuk Inflasi stasioner pada tingkat level, sedangkan variable APBN, Kurs, Harga Minyak Dunia, dan SBI lebih kecil dari nilai kritis 5% pada tingkat level. sehingga dilakukan uji ADF pada tingkat first difference. Dari hasil uji tersebut didapat seluruh variabel sudah stationer sehingga tahap uji dapat dilanjutkan

2. Uji Lag Optimum

Pengujian lag optimum berguna untuk mengetahui lamanya periode kekerpengaruh terhadap satu variabel endogen dengan waktu lalu maupun terhadap variabel endogen lainnya. Penentuan lag optimum dilakukan dengan nilai melihat nilai terkecil di antara AIC (*Akaike Information Criterion*), SIC (*Schwarz Information Criterion*) dan LR (*Likelihood Ratio*).

Tabel 3: Hasil Uji Lag Optimum

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC
0	-627.8409	NA	5.46e+17	55.02964	55.27649
1	-520.8819	158.1134*	4.66e+14	47.90277	49.38385
2	-486.1945	36.19550	2.88e+14	47.06039	49.77570
3	-429.2518	34.66081	6.00e+13*	44.28276*	48.23231*
* indicates lag order selected by the criterion					
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)					
FPE: Final prediction error					
AIC: Akaike information criterion					
SC: Schwarz information criterion					
HQ: Hannan-Quinn information criterion					

Dari table di atas, nilai lag terkecil berdasarkan AIC (*Akaike Information Criterion*) panjang lag optimum berada pada lag 3. Adapun panjang lag optimum tersebut digunakan dalam penentuan model VAR

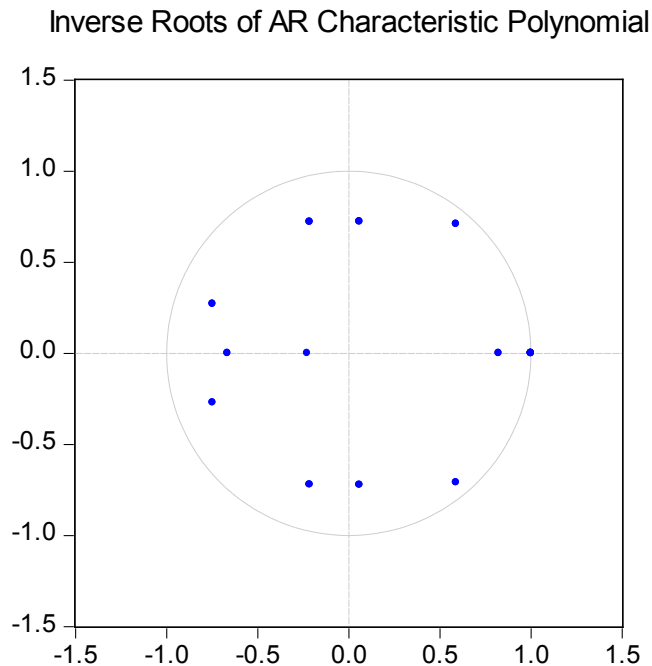
3. Uji Stabilitas VAR

Untuk menguji stabil atau tidaknya estimasi VAR yang telah ditentukan maka dilakukan VAR Condition Stability Check yakni berupa roots of characteristic polynomial. Suatu model VAR dikatakan stabil jika seluruh rootsnya memiliki modulus lebih kecil dari 1 (hamper mendekati satu) dan berada pada titik optimal. Berikut adalah hasil uji stabilitas VAR:

Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: APBN INFLASI KURS MINYAK SBI

Root	Modulus
0.032469i - 0.991391	0.991923
0.032469i + 0.991391	0.991923
0.488093i - 0.650437	0.813205
0.488093i + 0.650437	0.813205
0.600516i - 0.304631	0.673365
0.600516i + -0.304631	0.673365
0.647976i - 0.156914	0.666705
0.647976i + 0.156914	0.666705
0.178006i - 0.531547	0.560561
0.178006i + -0.531547	0.560561
.No root lies outside the unit circle	
.VAR satisfies the stability condition	

Dari table di atas dapat dilihat bahwa tidak ada nilai akar karakteristik dan modulus yang lebih dari 1. Sedangkan dari gambar titik invers roots of AR polynomial semuanya berada dalam lingkaran



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini stabil dan tidak memiliki roots of characteristic polynomial

4. Uji Kausalitas Granger

Uji Kausalitas Granger antar variabel penelitian dimaksudkan untuk mengetahui dan membuktikan arah hubungan jangka pendek antar variabel. Kausalitas menunjukkan hubungan dua arah. Oleh karena jika terdapat hubungan dua arah, maka dalam model tidak terdapat lagi variable independen, semua variabel merupakan variabel dependen.

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

Table 5: Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
INFLASI does not Granger Cause APBN	24	3.09515	0.0686
APBN does not Granger Cause INFLASI		0.93133	0.4113
KURS does not Granger Cause APBN	24	4.17973	0.0313
APBN does not Granger Cause KURS		0.61657	0.5502
MINYAK does not Granger Cause APBN	24	2.83591	0.0836
APBN does not Granger Cause MINYAK		1.33338	0.2872
SBI does not Granger Cause APBN	24	4.68047	0.0222
APBN does not Granger Cause SBI		1.90855	0.1757
KURS does not Granger Cause INFLASI	24	2.23419	0.1345
INFLASI does not Granger Cause KURS		4.06584	0.0339
MINYAK does not Granger Cause INFLASI	24	0.71252	0.5030
INFLASI does not Granger Cause MINYAK		2.21077	0.1370
SBI does not Granger Cause INFLASI	24	0.79600	0.4656
INFLASI does not Granger Cause SBI		1.60891	0.2262
MINYAK does not Granger Cause KURS	24	1.55102	0.2377
KURS does not Granger Cause MINYAK		0.30563	0.7402
SBI does not Granger Cause KURS	24	7.98635	0.0030
KURS does not Granger Cause SBI		6.73590	0.0061
SBI does not Granger Cause MINYAK	24	2.38148	0.1194
MINYAK does not Granger Cause SBI		1.65680	0.2171

Dalam pengujian kausalitas ini dilakukan dengan menggunakan model multivariat VAR yang dilakukan secara bersamaan. Setiap persamaan dalam VAR diuji dalam distribusi Wald *Chi-Squares* atau biasa dinotasikan χ^2 – Wald. Setiap variabel dipertukarkan dari variabel endogen menjadi variabel eksogen untuk diuji hubungan kausalitas. Hasil perhitungan statistik χ^2 – Wald menunjukkan signifikansi gabungan (*joint significance*) dari variabel endogen dalam persamaan VAR. Dari hasil Granger Causality di atas, variabel APBN secara statistik signifikan mempengaruhi inflasi, dan kurs, namun variabel Inflasi dan kurs secara statistik tidak signifikan mempengaruhi APBN sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi kausalitas antara APBN dan Inflasi. Variabel APBN secara statistik tidak mempengaruhi harga minyak dan suku bunga Bank Indonesia, demikian juga sebaliknya.

5. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang, yaitu terdapat kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan diantara variabel-variabel di dalam penelitian ini atau tidak. Dalam penelitian ini, uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode *Johansen's Cointegration Test*. Berikut ini disajikan tabel hasil uji kointegrasi dengan metode *Johansen's Cointegration Test*.

Tabel: Johansen's Cointegration Test.

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)				
Hypothesized		Trace	0.05	
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None *	0.922957	154.0478	69.81889	0.0000
At most 1 *	0.898351	95.08983	47.85613	0.0000
At most 2 *	0.694530	42.50665	29.79707	0.0010
At most 3	0.430754	15.23089	15.49471	0.0548
At most 4	0.094050	2.271727	3.841466	0.1318

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized		Max-Eigen	0.05	
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None *	0.922957	58.95801	33.87687	0.0000
At most 1 *	0.898351	52.58318	27.58434	0.0000
At most 2 *	0.694530	27.27576	21.13162	0.0060
At most 3	0.430754	12.95917	14.26460	0.0795
At most 4	0.094050	2.271727	3.841466	0.1318

Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b*S11*b=I):

APBN	INFLASI	KURS	MINYAK	SBI
0.003795	-0.927342	0.000787	0.012256	1.762014
-0.004194	-0.361018	-0.000175	0.051119	0.149160
-0.006852	0.227473	0.000309	0.008741	-1.377437
0.003153	-0.263656	-0.000147	0.047890	0.370827
0.008908	0.152338	-0.000206	-0.124362	0.390926

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):

D(APBN)	5.054207	-41.53196	2.410491	15.51031
D(INFLASI)	3.500803	2.986210	2.608265	-0.111932
D(KURS)	88.14005	-0.074909	-130.9980	-19.33184
D(MINYAK)	9.579862	-2.706014	2.015637	-3.155974
D(SBI)	0.247493	0.434304	1.360770	-0.070180

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -476.7967

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

APBN	INFLASI	KURS	MINYAK	SBI
1.000000	-244.3377	0.207384	3.229287	464.2584
	(23.8516)	(0.02062)	(2.54125)	(39.0920)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(APBN)	0.019182 (0.05715)
D(INFLASI)	0.013287 (0.01073)
D(KURS)	0.334521 (1.17309)
D(MINYAK)	0.036359 (0.01677)
D(SBI)	0.000939 (0.00415)

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

2 Cointegrating Equation(s):		Log likelihood -450.5051		
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)				
APBN	INFLASI	KURS	MINYAK	SBI
1.000000	0.000000	0.084876 (0.01296)	-8.172383 (1.48633)	94.65179 (10.3524)
0.000000	1.000000	-0.000501 (6.9E-05)	-0.046664 (0.00795)	-1.512688 (0.05540)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)				
D(APBN)	0.193357 (0.04731)	10.30679 (8.32429)		
D(INFLASI)	0.000763 (0.01516)	-4.324517 (2.66736)		
D(KURS)	0.334835 (1.74824)	-81.70895 (307.584)		
D(MINYAK)	0.047707 (0.02456)	-7.906892 (4.32127)		
D(SBI)	-0.000882 (0.00614)	-0.386302 (1.07994)		

3 Cointegrating Equation(s):		Log likelihood -436.8672		
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)				
APBN	INFLASI	KURS	MINYAK	SBI
1.000000	0.000000	0.000000	-5.077922 (1.29223)	127.1546 (10.4176)
0.000000	1.000000	0.000000	-0.064944 (0.01120)	-1.704692 (0.09027)
0.000000	0.000000	1.000000	-36.45866 (15.6675)	-382.9450 (126.307)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)				
D(APBN)	0.176842 (0.07404)	10.85511 (8.50670)	0.011989 (0.00720)	
D(INFLASI)	-0.017107 (0.02277)	-3.731207 (2.61574)	0.003040 (0.00221)	
D(KURS)	1.232375 (2.72360)	-111.5075 (312.930)	0.028865 (0.26474)	
D(MINYAK)	0.033897 (0.03820)	-7.448389 (4.38910)	0.008637 (0.00371)	
D(SBI)	-0.010205 (0.00893)	-0.076763 (1.02558)	0.000540 (0.00087)	

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

4 Cointegrating Equation(s):		Log likelihood	-430.3876	
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)				
APBN	INFLASI	KURS	MINYAK	SBI
1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	61.42302 (24.0333)
0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	-2.545359 (0.34257)
0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	-854.8871 (242.069)
0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	-12.94458 (4.78258)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)				
D(APBN)	0.225746 (0.06503)	6.765722 (7.27198)	0.009704 (0.00604)	-1.297287 (0.49418)
D(INFLASI)	-0.017460 (0.02416)	-3.701695 (2.70135)	0.003056 (0.00224)	0.212998 (0.18357)
D(KURS)	1.171421 (2.88950)	-106.4105 (323.141)	0.031713 (0.26852)	-0.994386 (21.9595)
D(MINYAK)	0.023946 (0.03953)	-6.616297 (4.42073)	0.009102 (0.00367)	-0.154438 (0.30042)
D(SBI)	-0.010427 (0.00947)	-0.058260 (1.05900)	0.000550 (0.00088)	0.033768 (0.07197)

Berdasarkan uji kointegrasi Johansen's terhadap seluruh variabel pada system persamaan dapat diketahui jumlah hubungan yang mungkin. Dari table di atas dapat dilihat bahwa:

1. Pada Trace Test mengidentifikasi terdapat 3 persamaan kointegrasi pada level 5%
2. Pada Max Eigenvalue test mengidentifikasi terdapat 3 persamaan kointegrasi pada level 5%

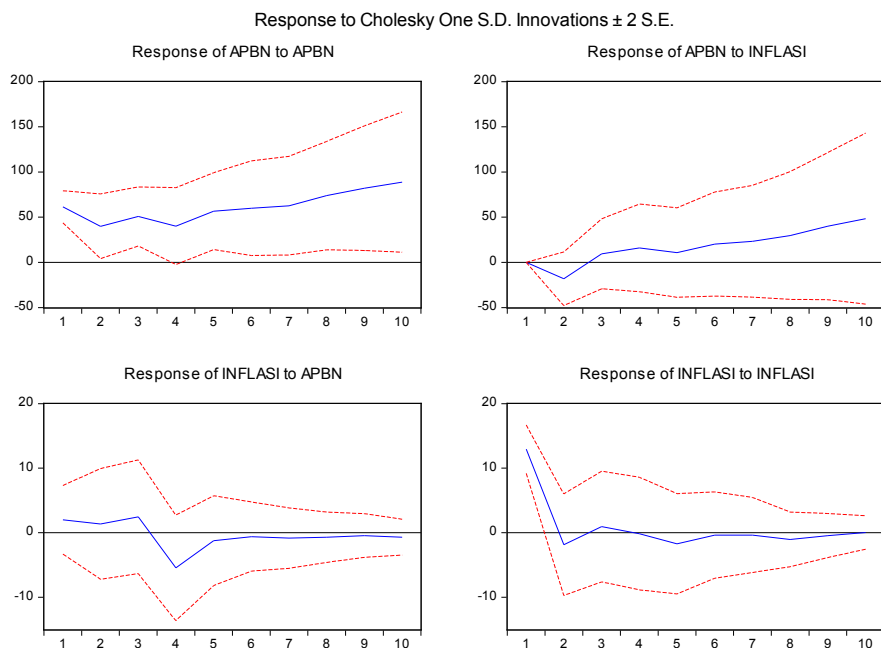
Dengan demikian antara variabel APBN, Harga Minyak, Suku bunga, Inflasi, dan Kurs terdapat hubungan stabilitas keseimbangan jangka panjang dan pergerakan dalam jangka panjang. Sementara dalam jangka pendek seluruh variabel saling menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan jangka panjang

6. Model Empiris VECM

a. Analisis Impulse Respon

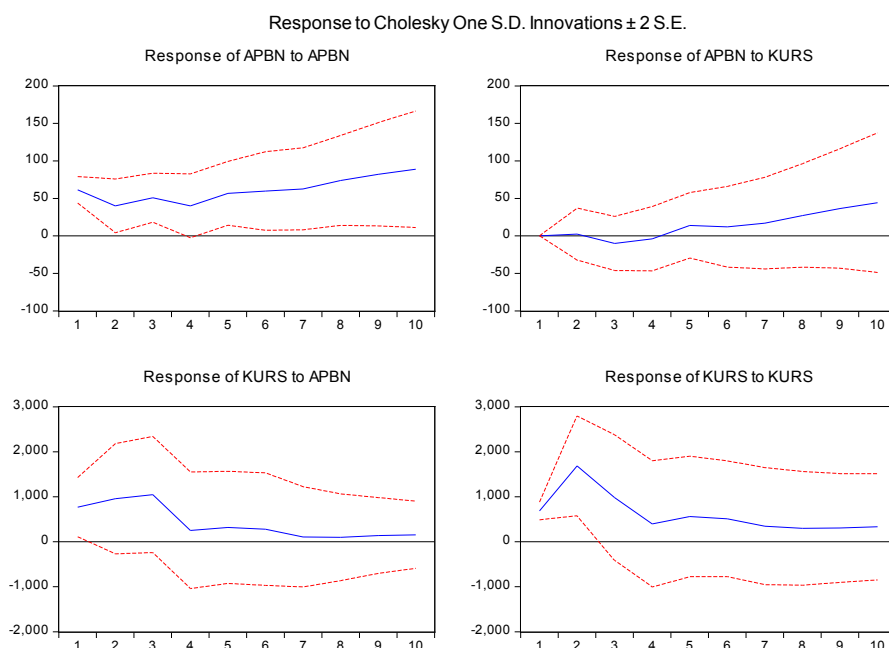
Perilaku dinamis dari model VECM dapat dilihat melalui respon dari setiap variabel terhadap kejutan dari variabel tersebut maupun terhadap variabel endogen lainnya. Dalam model ini *response* dari perubahan masing-masing variabel dengan adanya informasi baru diukur dengan 1-standar deviasi. Sumbu horizontal merupakan waktu dalam periode hari ke depan setelah terjadinya *shock*, sedangkan sumber vertikal adalah nilai respon. Secara mendasar dalam analisis ini akan diketahui respon positif atau negatif dari suatu variabel terhadap variabel lainnya.

Dalam *impulse response*, respon variabel dalam jangka pendek biasanya cukup signifikan dan cenderung berubah. Dalam jangka panjang respon cenderung konsisten dan terus mengecil. *Impulse Response Function* memberikan gambaran bagaimana respon dari suatu variabel di masa mendatang jika terjadi gangguan pada satu variabel lainnya.



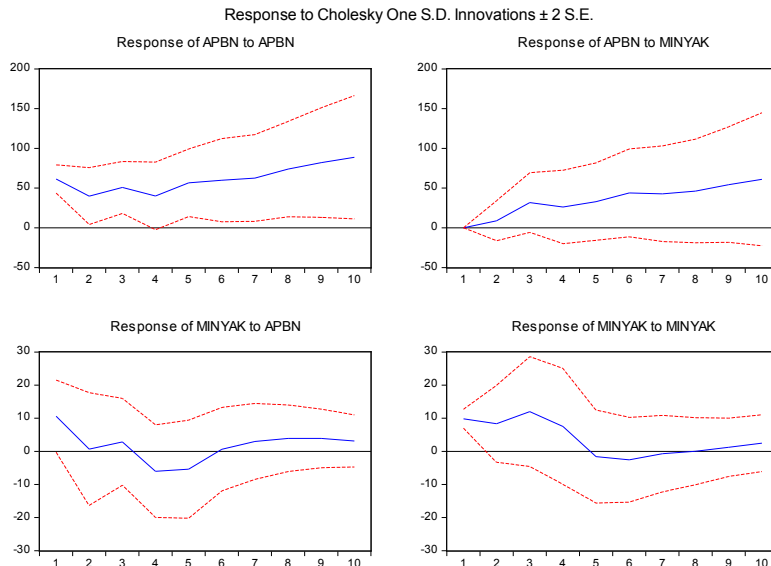
ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

Secara empiris, perubahan APBN awalnya direspon secara negatif oleh inflasi sampai dengan periode ke-2, kemudian direspon positif mulai dengan periode ke-3 sampai dengan akhir periode. Sementara inflasi direspon positif oleh APBN pada periode awal sampai ke 3, kemudian direspon negative pada periode selanjutnya dan mencapai puncaknya pada periode ke-4. Hal ini beralasan, karena pada periode awal, untuk menetapkan APBN, pemerintah merujuk kepada tingkat inflasi yang berlaku, namun setelah APBN disahkan maka tidak secara otomatis kenaikan atau penurunan inflasi akan mempengaruhi APBN.

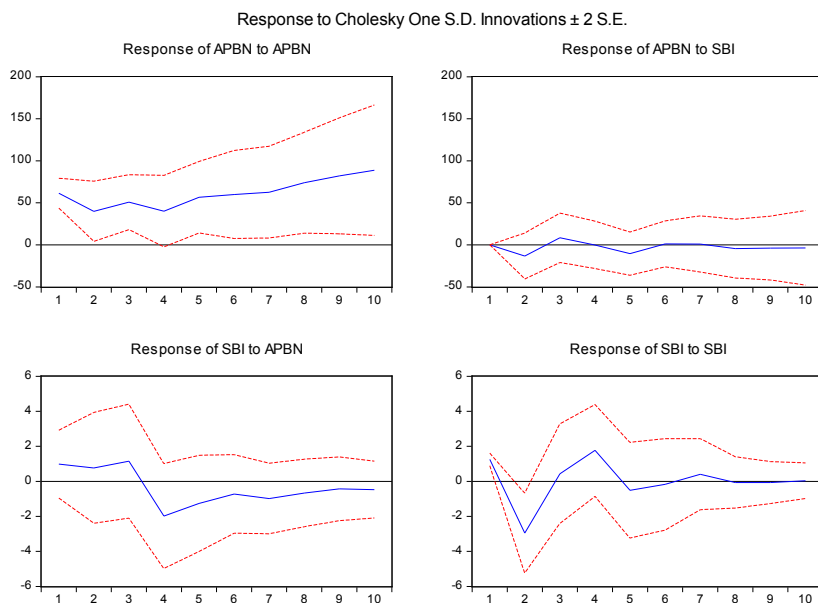


Secara empiris, perubahan APBN awalnya direspon secara negative oleh kurs sampai dengan periode ke-4, namun kemudian direspon positif mulai dengan periode ke-5 sampai dengan akhir periode. Sementara kurs direspon positif oleh APBN pada periode awal sampai dan mencapai puncaknya pada periode ke-3. Secara empiris dapat dijelaskan, respon positif ini berkaitan dengan transaksi pembayaran luar negeri yang sangat terpengaruh oleh tingkat kurs yang berlaku

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015



Secara empiris, perubahan APBN direspon secara positif oleh harga minyak dunia mulai dari periode ke-1 sampai dengan akhir periode. Sementara harga minyak dunia direspon positif oleh APBN pada periode awal sampai dan mencapai puncaknya pada periode ke-3, lalu direspon negative pada periode ke-4-5, dan direspon positif kembali mulai periode ke-6 dan seterusnya.



ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

Perubahan APBN awalnya direspon secara negative oleh suku bunga Bank Indonesia sampai dengan periode ke-2, namun kemudian direspon positif pada periode ke-3-4, lalu kemudian direspon negative sampai periode ke-6, konvergensi pada periode ke-7 dan kembali direspon negative pada periode ke-8 dan seterusnya. Sementara suku bunga Bank Indonesia awalnya direspon positif oleh APBN pada periode awal sampai pada periode ke-3, lalu direspon negative dan mencapai puncaknya pada periode ke-4.

b. Analisis Variance Decomposition

Setelah menganalisis perilaku dinamis melalui *impulse response*, selanjutnya akan dilihat karakteristik model melalui *variance decomposition*. Pada bagian ini dianalisis bagaimana varian dari suatu variabel ditentukan oleh peran dari variabel lainnya maupun peran dari dirinya sendiri. *Variance decomposition* digunakan untuk menyusun *forecast error variance* suatu variabel, yaitu seberapa besar perbedaan antara *variance* sebelum dan sesudah *shock*, baik *shock* yang berasal dari diri sendiri maupun *shock* dari variabel lain untuk melihat pengaruh relatif variabel-variabel penelitian terhadap variabel lainnya. Prosedur *variance decomposition* yaitu dengan mengukur persentase kejutan-kejutan atas masing-masing variabel. Berikut ini disajikan *variance decomposition* untuk waktu sepuluh periode ke depan atas masing-masing variabel.

Variance Decomposition of APBN:						
Period	S.E.	APBN	INFLASI	KURS	MINYAK	SBI
1	61.37220	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	77.13253	90.07550	5.546350	0.093560	1.315740	2.968853
3	98.98804	80.96968	4.265897	1.111944	11.12183	2.530649
4	111.1638	77.19485	5.447770	1.003528	14.34706	2.006792
5	130.6546	74.69398	4.619869	1.874930	16.71479	2.096427
6	152.0741	70.62520	5.168292	2.012657	20.64030	1.553548
7	172.3859	68.17351	5.848483	2.536160	22.22939	1.212461
8	197.3569	66.02571	6.721944	3.830296	22.44491	0.977138

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

9	227.1282	62.89575	8.185933	5.471457	22.68072	0.766135
10	259.8400	59.73522	9.724791	7.080655	22.85433	0.605004

Variance Decomposition of INFLASI:

Period	S.E.	APBN	INFLASI	KURS	MINYAK	SBI
1	13.10509	2.333489	97.66651	0.000000	0.000000	0.000000
2	18.05952	1.798773	52.48220	31.40583	0.063730	14.24947
3	19.35151	3.195159	45.95264	27.50753	8.304847	15.03982
4	20.95193	9.471107	39.20567	27.95331	7.101655	16.26826
5	21.27800	9.522032	38.67160	27.31290	7.987856	16.50561
6	21.30491	9.578383	38.60580	27.25572	7.995773	16.56432
7	21.34490	9.698629	38.49070	27.16532	8.030209	16.61515
8	21.42095	9.738715	38.45624	26.98697	8.318353	16.49972
9	21.44699	9.758467	38.40594	26.93201	8.442768	16.46082
10	21.46950	9.840330	38.32565	26.88631	8.520978	16.42673

Variance Decomposition of KURS:

Period	S.E.	APBN	INFLASI	KURS	MINYAK	SBI
1	1701.560	20.36801	63.38887	16.24312	0.000000	0.000000
2	2738.936	20.01575	28.09149	44.11146	0.070812	7.710487
3	3317.872	23.61517	25.16530	38.78615	7.117780	5.315601
4	3548.649	21.15159	28.40376	35.15519	9.773436	5.516029
5	3687.093	20.33752	28.98687	34.89097	10.47344	5.311201
6	3821.543	19.46002	29.26630	34.25480	12.05397	4.964917
7	3893.798	18.82129	29.47702	33.78147	13.05431	4.865906
8	3924.432	18.59010	29.46598	33.82769	13.32124	4.794987
9	3953.046	18.44428	29.48295	33.93611	13.41062	4.726038
10	3985.791	18.29276	29.60541	34.07585	13.37716	4.648813

Variance Decomposition of MINYAK:

Period	S.E.	APBN	INFLASI	KURS	MINYAK	SBI
1	27.70649	14.67126	71.64141	1.081199	12.60613	0.000000
2	34.91420	9.275440	62.15565	11.20147	13.62613	3.741313
3	37.60747	8.573057	53.75649	12.47657	21.91855	3.275332
4	40.25131	9.727574	46.95493	14.10578	22.61223	6.599492
5	41.22196	10.99467	45.63194	15.14797	21.71091	6.514505

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

6	41.40205	10.92341	45.41828	15.02828	21.90379	6.726240
7	41.68025	11.29028	44.87600	15.52773	21.64134	6.664661
8	42.11367	11.92478	44.20323	16.13833	21.19818	6.535465
9	42.60665	12.48340	43.67473	16.64582	20.79107	6.404983
10	43.11199	12.71423	43.51772	16.87775	20.63127	6.259034

Variance Decomposition of SBI:						
Period	S.E.	APBN	INFLASI	KURS	MINYAK	SBI
1	4.799218	4.175719	88.72138	0.169661	0.160902	6.772338
2	6.698135	3.455132	45.54737	26.13307	1.956563	22.90786
3	7.206173	5.525087	39.99668	23.58876	10.73738	20.15210
4	7.940188	10.77474	33.53079	24.37589	9.764877	21.55371
5	8.180078	12.53059	32.95306	23.70032	10.12116	20.69487
6	8.254855	13.06832	32.90935	23.63090	10.02464	20.36679
7	8.381087	14.04771	32.35415	23.51590	10.08874	19.99350
8	8.513372	14.22743	32.34818	23.03591	11.00560	19.38288
9	8.579734	14.26103	32.27715	22.79252	11.57774	19.09156
10	8.622788	14.42021	32.04522	22.66315	11.96867	18.90275
Cholesky Ordering: APBN INFLASI KURS MINYAK SBI						

Ada beberapa hal yang dapat diamati dari table di atas. Pertama, analisis variance decomposition menunjukkan bahwa *forecast error variance* dari APBN pada periode pertama ditentukan oleh APBN sendiri sebesar 100%. Selanjutnya pada periode 2 dan seterusnya pengaruh differen APBN sudah mulai menurun walaupun masih tetap dominan sebesar 59% sampai periode akhir, sedangkan kontribusi variabel inflasi 9.7%, kurs 7%, harga minyak dunia 22.8%, dan suku bunga 0.6%. Dengan demikian, melalui analisa variance decomposition, harga minyak dunia merupakan variable yang sangat mempengaruhi APBN Indonesia

Forecast error variance dari Inflasi pada periode pertama sebesar 97.66%. Pada periode selanjutnya mulai menurun dan pada periode akhir sebesar 38.32%, sedangkan kontribusi variabel lain terhadap inflasi dari APBN sebesar 9.8%, kurs 26.88%, harga minyak dunia 8.5%, dan suku bunga 16.42%. Hal ini berarti kenaikan kurs rupiah akan

mempengaruhi inflasi secara signifikan, begitu juga dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Analisis variance decompositon menunjukkan bahwa *forecast error* dari kurs pada periode pertama sebesar 16.24%. Pada periode selanjutnya mulai meningkat dan berfluktuasi, dan pada periode akhir sebesar 34.07%, sedangkan kontribusi variabel lain terhadap kurs dari APBN sebesar 18.29%, inflasi 29.60%, harga minyak dunia 13.37%, dan suku bunga 4.642%. Hal ini berarti kenaikan kurs rupiah utamanya dipengaruhi oleh tingkat inflasi, dan APBN secara signifikan

Analisis variance decompositon menunjukkan bahwa *forecast error* dari harga minyak pada periode pertama hanya sebesar 12.60%, namun pada periode selanjutnya meningkat dan berfluktuasi, dan pada periode akhir sebesar 20.63%, sedangkan kontribusi variabel lain terhadap harga minyak dunia dari APBN sebesar 12.71%, inflasi 43.51%, suku bunga 6.25%. Hal ini berarti kenaikan harga minyak dunia tidak dipengaruhi oleh APBN maupun suku bunga, namun lebih disebabkan adanya inflasi dari negara-negara pengeksport minyak (termasuk Indonesia)

Analisis variance decompositon menunjukkan bahwa *forecast error* dari suku bunga Bank Indonesia pada periode pertama hanya sebesar 6.7%, namun pada periode selanjutnya meningkat dan berfluktuasi, dan pada periode akhir sebesar 18.90%, sedangkan kontribusi variabel lain terhadap suku bunga Bank Indonesia dari APBN sebesar 14.42%, inflasi 32.04%, kurs rupiah 22.66%, dan harga minyak dunia sebesar 11.96%. Hal ini berarti kenaikan suku bunga sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa harga minyak dunia merupakan variabel yang sangat mempengaruhi APBN Indonesia, kurs rupiah dipengaruhi oleh inflasi dan suku bunga Bank Indonesia, kurs rupiah dipengaruhi oleh tingkat inflasi, dan APBN secara signifikan, harga minyak dunia tidak dipengaruhi oleh APBN maupun suku bunga, namun lebih disebabkan adanya inflasi dari negara-negara pengeksport minyak (termasuk Indonesia), dan kenaikan suku bunga sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan kurs rupiah terhadap dollar

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

Amerika. Dengan demikian antara APBN dan variable-variabel makro ekonomi terdapat hubungan kausalitas yang saling mempengaruhi

c. Analisa Estimasi VECM

Setelah didapati hubungan kointegrasi diantara variabel penelitian, maka tahap selanjutnya adalah membentuk model VECM. Menurut Enders, jika terdapat hubungan kointegrasi diantara variabel penelitian, maka estimasi dilakukan dengan VECM, sedangkan jika tidak ada kointegrasi diantara ketiga variabel di atas maka estimasi dilakukan dengan VAR.

Tabel: Vector Error Correction Estimates

Cointegrating Eq:	CointEq1				
INFLASI(-1)	-244.3377				
	(23.8516)				
	[-10.2441]				
KURS(-1)	0.207384				
	(0.02062)				
	[10.0586]				
MINYAK(-1)	3.229287				
	(2.54125)				
	[1.27075]				
SBI(-1)	464.2584				
	(39.0920)				
	[11.8760]				
C	-4942.670				

Error Correction:	D(APBN)	D(INFLASI)	D(KURS)	D(MINYAK)	D(SBI)
CointEq1	0.019182	0.013287	0.334521	0.036359	0.000939
	(0.05715)	(0.01073)	(1.17309)	(0.01677)	(0.00415)
	[0.33562]	[1.23809]	[0.28516]	[2.16819]	[0.22641]
D(APBN(-1))	0.064773	-0.051587	-6.370812	-0.174972	-0.000690
	(0.30581)	(0.05742)	(6.27659)	(0.08972)	(0.02220)
	[0.21181]	[-0.89842]	[-1.01501]	[-1.95012]	[-0.03106]

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

D(APBN(-2))	0.351098 (0.41396) [0.84814]	-0.071092 (0.07773) [-0.91464]	-0.943176 (8.49648) [-0.11101]	-0.156991 (0.12146) [-1.29257]	-0.016547 (0.03005) [-0.55067]
D(INFLASI(-1))	2.372127 (11.1764) [0.21224]	3.388449 (2.09852) [1.61468]	108.2507 (229.393) [0.47190]	9.175250 (3.27915) [2.79805]	0.893502 (0.81125) [1.10138]
D(INFLASI(-2))	-0.401667 (5.27582) [-0.07613]	2.775661 (0.99060) [2.80199]	147.7520 (108.284) [1.36448]	4.893544 (1.54792) [3.16137]	0.838180 (0.38295) [2.18874]
D(KURS(-1))	-0.003245 (0.02799) [-0.11594]	0.011684 (0.00526) [2.22298]	1.812347 (0.57453) [3.15446]	0.005317 (0.00821) [0.64736]	0.004970 (0.00203) [2.44603]
D(KURS(-2))	-0.036771 (0.03792) [-0.96977]	-0.027285 (0.00712) [-3.83254]	-2.448847 (0.77823) [-3.14667]	-0.051537 (0.01112) [-4.63258]	-0.008472 (0.00275) [-3.07821]
D(MINYAK(-1))	0.209079 (1.81931) [0.11492]	-0.922147 (0.34160) [-2.69950]	-59.64502 (37.3407) [-1.59732]	-1.656203 (0.53378) [-3.10276]	-0.340493 (0.13206) [-2.57839]
D(MINYAK(-2))	1.679223 (1.33651) [1.25643]	0.376114 (0.25095) [1.49878]	34.18438 (27.4313) [1.24618]	0.861622 (0.39213) [2.19729]	0.116300 (0.09701) [1.19882]
D(SBI(-1))	-8.226836 (15.5113) [-0.53038]	-8.307547 (2.91245) [-2.85242]	-556.1814 (318.365) [-1.74699]	-13.64506 (4.55100) [-2.99825]	-2.692802 (1.12591) [-2.39168]
D(SBI(-2))	3.347432 (8.86880) [0.37744]	0.430155 (1.66523) [0.25832]	137.6545 (182.029) [0.75622]	2.847602 (2.60209) [1.09435]	0.130647 (0.64375) [0.20295]
C	59.02301 (47.9817) [1.23011]	13.97922 (9.00919) [1.55166]	1087.222 (984.809) [1.10399]	43.70309 (14.0778) [3.10440]	2.070248 (3.48280) [0.59442]
R-squared	0.623548	0.811488	0.745445	0.768455	0.787308
Adj. R-squared	0.247097	0.622976	0.490890	0.536909	0.574616
Sum sq. resids	57375.88	2022.783	24170268	4939.075	302.2981

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

S.E. equation	72.22181	13.56058	1482.328	21.18978	5.242294
F-statistic	1.656385	4.304699	2.928427	3.318808	3.701635
Log likelihood	-122.5873	-84.11804	-192.0847	-94.38414	-62.25866
Akaike AIC	11.70324	8.358091	17.74649	9.250795	6.457275
Schwarz SC	12.29567	8.950522	18.33893	9.843226	7.049707
Mean dependent	74.54313	0.002609	443.1304	1.391304	-0.260870
S.D. dependent	83.23363	22.08481	2077.489	31.13820	8.037683
Determinant resid covariance (dof adj.)			2.79E+13		
Determinant resid covariance			6.98E+11		
Log likelihood			-476.7967		
Akaike information criterion			47.11275		
Schwarz criterion			50.32176		

Dari hasil variance decomposition di atas dapat dilihat bahwa kontribusi yang paling besar terhadap APBN adalah.

Tabel 7: Hasil Estimasi VECM

Error Correction:	Koefisien	t-statistik	Keterangan
JANGKA PENDEK			
D(APBN(-1))	0.064773	[0.21181]	Tidak signifikan
D(APBN(-2))	0.351098	[0.84814]	Tidak signifikan
D(INFLASI(-1))	2.372127	[0.21224]	Tidak signifikan
D(INFLASI(-2))	-0.401667	[-0.07613]	Tidak signifikan
D(KURS(-1))	-0.003245	[-0.11594]	Tidak signifikan
D(KURS(-2))	-0.036771	[-0.96977]	Tidak signifikan
D(MINYAK(-1))	0.209079	[0.11492]	Tidak signifikan
D(MINYAK(-2))	1.679223	[1.25643]	Tidak signifikan
D(SBI(-1))	-8.226836	[-0.53038]	Tidak signifikan
D(SBI(-2))	3.347432	[0.37744]	Tidak signifikan
JANGKA PANJANG			
INFLASI(-1)	-244.3377	[-10.2441]	Signifikan
KURS(-1)	0.207384	[10.0586]	Signifikan
MINYAK(-1)	3.229287	[1.27075]	Tidak Signifikan
SBI(-1)	464.2584	[11.8760]	signifikan

Keputusan yang diambil dalam model VECM didasarkan pada tingkat signifikansi pada kesalahan yang dapat ditolerir 5% yaitu dengan membandingkan nilai *t* statistic dengan *t* table sebesar 1.706. jika *t* statistic lebih besar dari *t* table maka dinyatakan berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan hasil estimasi VECM di atas, hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara APBN dengan Inflasi, Kurs, Harga Minyak dan SBI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan Jangka Pendek antara APBN, Inflasi, Kurs, Harga Minyak dan SBI

Berdasarkan uji VECM, Inflasi, Kurs, Harga Minyak, dan SBI dalam jangka pendek tidak mempengaruhi APBN, begitu juga sebaliknya. Kurs (*exchange rate*) adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan pemerintah untuk menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama. Pentingnya peranan kurs mata uang bagi negara mendorong dilakukannya berbagai upaya untuk menjaga posisi kurs mata uang suatu negara berada dalam keadaan yang relatif stabil. Stabilitas kurs mata uang juga dipengaruhi oleh sistem kurs yang dianut oleh suatu negara.

Dampak lemahnya nilai tukar rupiah sangat berpengaruh terhadap asumsi nilai tukar rupiah dalam anggaran di APBN. Jika nilai tukar rupiah jauh melampaui asumsi APBN dampaknya akan merembet ke semua sisi APBN. Baik pendapatan belanja maupun pembiayaan. Memang pendapatan negara akan meningkat terutama dari penerimaan minyak dan gas (migas), Pajak Penghasilan (PPh) migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta bea masuk dan bea keluar. Namun pemasukan itu tidak mampu menutup pembengkakan pengeluaran pemerintah akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

Jika kurs mengalami depresiasi, dalam jangka pendek bisa jadi tidak mempengaruhi APBN, namun dalam jangka panjang belanja pemerintah pasti akan melonjak, dan beberapa pos belanja negara yang akan naik antara lain: belanja dalam mata uang asing, pembayaran bunga utang luar negeri, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik,

dan transfer ke daerah berbentuk dana hasil migas. Melemahnya kurs juga berdampak terhadap pembiayaan. Dalam pembiayaan juga ada beberapa pos yang akan terpengaruh antara lain: pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun proyek, pembayaran cicilan utang luar negeri, dan privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan yang dilakukan dalam mata uang asing.

2. Hubungan Jangka Panjang antara APBN, Inflasi, Kurs, Harga Minyak dan SBI

Inflasi, kurs dan suku bunga Bank Indonesia dalam jangka panjang mempengaruhi APBN, sedangkan harga minyak dunia dalam jangka panjang tidak signifikan mempengaruhi APBN. Nilai tukar rupiah saling terkait dengan indikator makro lainnya, seperti harga minyak mentah dunia, kurs dan inflasi. Saat ini, persoalan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi dan harga minyak dunia yang anjlok menjadi tantangan berat. Menurunnya harga minyak dunia secara signifikan masih belum bisa membantu penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), karena pembelian minyak tersebut berdasarkan kepada kurs, sehingga pengaruhnya ke harga beli minyak yang lebih murah. Kebijakan baru soal BBM tidak akan memberi pengaruh pada nilai tukar rupiah, terlebih ketika dolar mengalami penguatan pada semua mata uang dunia. Selain itu, secara makro, fluktuasi nilai nilai tukar juga berdampak pada kacaunya ekspektasi publik terhadap inflasi yang berujung pada ketidakpastian investasi.

Variabel kurs Dollar Amerika Serikat memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap inflasi di Indonesia. Melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing yang disebabkan oleh hutang luar negeri pemerintah maupun sektor swasta yang membengkak, berakibat pada menurunnya harga barang-barang ekspor di luar negeri, sehingga barang ekspor Indonesia menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang dari negara lain. Berarti setiap terjadi depresiasi rupiah maka akan meningkatkan permintaan uang di Indonesia, demikian juga sebaliknya. Hal ini disebabkan ketika nilai rupiah terdepresiasi maka

harga barang-barang impor menjadi lebih mahal sehingga diperlukan rupiah yang lebih banyak guna untuk membeli barang impor¹¹²

Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Perubahan harga minyak yang signifikan akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Bila harga minyak dunia meningkat, maka selain pendapatan negara meningkat, subsidi juga akan ikut meningkat. Demikian pula sebaliknya bila harga minyak menurun, pendapatan negara ikut turun, tetapi subsidi juga akan berkurang. Berdasarkan hasil VECM, harga minyak dunia tidak berpengaruh terhadap APBN dalam jangka panjang. Hal ini bisa jadi disebabkan tren penurunan harga minyak dunia. Secara netto penurunan harga minyak dunia akan membantu meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) untuk mengimpor BBM, karena dengan turunnya harga minyak internasional maka subsidi untuk Bahan Bakar Minyak akan ikut turun sehingga meringankan APBN.

¹¹² Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN SETJEN DPR-RI. *Keterkaitan Nilai Tukar dengan Indikator Ekonomi Makro Lainnya* dalam www.dpr.go.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Melalui uji kointegrasi dengan *Johansen's Cointegration Test* menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian yaitu APBN, Harga Minyak Dunia, Suku Bunga, Inflasi, dan kurs dalam setiap periode jangka pendek cenderung saling menyesuaikan untuk mencapai ekuilibrium jangka panjangnya.
2. Hasil pengujian hubungan kausalitas Granger dalam kerangka *multivariate* VECM menunjukkan bahwa terdapat pola hubungan kausalitas atas semua variabel dan memiliki hubungan timbal balik atau memiliki hubungan dua arah signifikan pada 5%
3. Berdasarkan analisis impulse response function menunjukkan bahwa:
 - a. Perubahan APBN awalnya direspon secara negatif oleh inflasi sampai dengan periode ke-2, kemudian direspon positif mulai dengan periode ke-3 sampai dengan akhir periode. Sementara inflasi direspon positif oleh APBN pada periode awal sampai ke 3, kemudian direspon negative pada periode selanjutnya dan mencapai puncaknya pada periode ke-4.

- b. Perubahan APBN awalnya direspon secara negative oleh kurs sampai dengan periode ke-4, namun kemudian direspon positif mulai dengan periode ke-5 sampai dengan akhir periode. Sementara kurs direspon positif oleh APBN pada periode awal sampai dan mencapai puncaknya pada periode ke-3. Secara empiris dapat dijelaskan, respon positif ini berkaitan dengan transaksi pembayaran luar negeri yang sangat terpengaruh oleh tingkat kurs yang berlaku
 - c. Perubahan APBN direspon secara positif oleh harga minyak dunia mulai dari periode ke-1 sampai dengan akhir periode. Sementara harga minyak dunia direspon positif oleh APBN pada periode awal sampai dan mencapai puncaknya pada periode ke-3, lalu direspon negative pada periode ke-4-5, dan direspon positif kembali mulai periode ke-6 dan seterusnya.
 - d. Perubahan APBN awalnya direspon secara negative oleh suku bunga Bank Indonesia sampai dengan periode ke-2, namun kemudian direspon positif pada periode ke-3-4, lalu kemudian direspon negative sampai periode ke-6, konvergensi pada periode ke-7 dan kembali direspon negative pada periode ke-8 dan seterusnya. Sementara suku bunga Bank Indonesia awalnya direspon positif oleh APBN pada periode awal sampai pada periode ke-3, lalu direspon negative dan mencapai puncaknya pada periode ke-4.
4. Hasil uji variance decomposition menunjukkan hubungan kausalitas variable sebagai berikut: harga minyak dunia merupakan variable yang sangat mempengaruhi APBN Indonesia, kurs rupiah dipengaruhi oleh inflasi dan suku bunga Bank Indonesia, kurs rupiah dipengaruhi oleh tingkat inflasi, dan APBN secara signifikan, harga minyak dunia tidak dipengaruhi oleh APBN maupun suku bunga, namun lebih disebabkan adanya inflasi dari negara-negara pengekspor minyak (termasuk Indonesia), dan kenaikan suku bunga sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Dengan demikian antara APBN dan variable-variable makro ekonomi terdapat hubungan kausalitas yang saling mempengaruhi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan agar pemerintah dalam penetapan APBN tidak hanya mengandalkan variable-variabel ekonomi makro seperti inflasi, harga minyak, kurs dan tingkat suku bunga sebagai pertimbangan, namun perlu mempertimbangkan unsure keadilan dan distribusi pendapatan di masyarakat

Sumber penerimaan APBN juga harus diupayakan dengan tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak, karena Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan berbagai sumber daya alam, yang jika dikelola dengan baik oleh Indonesia akan menjadi sumber penerimaan negara yang sangat besar dan dapat menggantikan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azim Islahi, *Provision of Public Goods: Role of Voluntary Sector (Waqf) in Islamic History*, makalah disampaikan pada *The 3rd International Conference on Islamic Economics* 26–30 January 1992 di Kualalumpur.
- Abdul Azis Dahlan (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999)
- Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim, *Kitāb al-Kharāj* (Raudah: Matba'ah as-Salafiyah, t.t), h. 69.
- Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharāj*, (Raudah: Matba'ah as-Salafiyah, t.t)
- Adwin Surya Atmadja. *Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. ISSN: 1411-0288 (Print) Publisher: Universitas Kristen Petra
- Anonim, *Pengaruh Perubahan Asumsi Makro Terhadap Defisit APBN Tahun 2014*, dapat diunduh di www.dpr.go.id
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN SETJEN DPR-RI. *Keterkaitan Nilai Tukar dengan Indikator Ekonomi Makro Lainnya* dalam www.dpr.go.id
- Cristiana Tudor. *Understanding the Roots of the US Subprime Crisis and its Subsequent Effects*. The Romanian Economic Journal. 2009;XII(31)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992)

- Di Iorio, Amalia dan Faff, Robert. 2001. Foreign Exchange Exposure and Pricing in the Australian Equities Market: A Fama and French Framework, *School of Economics and Finance*.
- Ettah B. Essien. *The Current Global Economic Crisis: Gleaning from History*. Current Research Journal of Economic Theory ISSN: 2042-4841 (Print); 2042-485X (Online) Publisher: Maxwell Science Publication
- Floriana Ferro. *Responsibility and Capitalism. A Phenomenological Way to Approach the Economic Crisis* Nordicum-Mediterraneum ISSN: 1670-6242 (Online) Publisher by University of Akureyri.
- Hasanuzzaman, *Economic Functions of an Islamic State, The Early Experience*. (Leicester: The Islamic Foundation, 1981
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2301983/ri-kini-tengah-dilanda-4-krisis-lebih-parah-dari-1998>
- <http://bisnis.tempo.co/read/news>
- <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2690/1/ancaman.krisis.ekonomi>
- <http://www.bi.go.id/id/moneter/>
- Husain Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995)
- Ibn Abidin, *Hāsyiyah Radd al-Mukhtār* (Kairo: Al-Halabi, 1966)
- Ibn Hakam, *Sīrah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz ‘alā mā Rawāh al-Imām Mālik bin Anas wa Ashābih*. (Mesir: Maktabah Rabi’, t.t)
- Ibn Qudamah, *Al-Mugni* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968),
- Imam Wahyudi dan Gandhi Anwar Sani *Interdependence between Islamic capital market and money market: Evidence from Indonesia*. Borsa Istanbul Review Volume 14, Issue 1, March 2014,
- Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013)

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

- Iskandar Putong. *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013)
- Joseph Stiglitz. *Phony Capitalism* dalam Harpers Magazine dapat diunduh di <http://harpers.org/> diterbitkan pada September 2014 dan didownload pada tanggal 3 Agustus 2015
- K. Ali, *A Study Of Islamic History*, (India: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1980)
- Kadir. *Statistika Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*. (Jakarta: Rajawali Press, 2015)
- Kathryn Dominguez, M.E. dan L.Tesar, Linda. 2006. Exchange rate exposure, *Journal of International Economics*, Volume. 68,
- Kementerian Keuangan. *Model Makro APBN: Dampak Kebijakan APBN terhadap Beberapa Indikator utama Pembangunan*, dapat diunduh di www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/.../makroAPBN-140311.pdf
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011 di www.esdm.go.id
- Lihat Adek Laksmi Oktavia et.al, Sri Ulfa. *Analisis Kurs Dan Money Supply di Indonesia*. *Jurnal Kajian Ekonomi*, Januari 2013, Vol. I, No. 02
- Luehrman, T.A. 1991. *Exchange Rate Changes and The Distribution of Industry Value*, *Journal of International Business Studies*, Volume 22
- Lutz Kilian. *Oil Price Volatility: Origins and Effects*. (World Trade Organization Report 2010 on “Trade in Natural Resources: Challenges in Global Governance,” 2010).
- M. A. Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice A Comparative Study* (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I, 1980).
- M. A. Sabzwari, “Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Pemerintahan Rasulullah saw,” dalam Adiwarmarman Karim (ed), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: IIIT, 2002)

- M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam* (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995)
- Mohamed Shikh Albaity. *Impact of the Monetary Policy Instruments on Islamic Stock Market Index Return*. Economics Discussion Papers, No. 2011-26 | July 18, 2011. Kiel Institute for the World Economy. <http://www.economics-ejournal.org>.
- Mohd Yahya Mohd Hussin. "Macroeconomic Variables and Malaysian Islamic Stock Market: A Time Series Analysis." *Journal of Business Studies Quarterly* 2012, Vol. 3, No. 4,
- Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnun Husein, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Muhammad Afdi Nizar. *Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Perekonomian Indonesia*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.6 No.2, Desember 2012
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988)
- Muhammad Wasitho Abu Fawaz. *Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam* dalam <https://abufawaz.wordpress.com>
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)
- Mu-lan Wang, Ching-Ping Wang dan Tzu-Ying Huang. 2010. "Relationship Among Oil Price, Gold Price, Exchange Rate And International Stock Market". *International Research Journal of Finance and economics* ISSN 1450-2887 Issue 47.
- Mustafa Edwin Nasution. et.al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Prenada, 2006)
- Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1999), h. 65
- Nota Keuangan RAPBN 2016 di <http://www.kemenkeu.go.id>

ANALISIS KAUSALITAS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA PERIODE 1990-2015

- Nur Arianto. *Siapkah Membangun Negeri ini Tanpa Pajak?* dalam <http://www.pajak.go.id/content/article/siapkah-membangun-negeri-ini-tanpa-pajak>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Qutb Ibrahim Muhammad, *As-Siyāsah al-Māliyah Li ‘Umar bin Khattab*, terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000)
- Rismawati, *Pengaruh Variabel Pajak Dan Variabel Makroekonomi Terhadap penerimaan Pajak Penghasilan* (Studi Kasus: Tahun 2001-2012), 2013 dapat di download di portalgaruda.org.
- Samuel Huntington, *The Clash of Civilization*, Foreign Affairs; Summer 1993; 72, 3; ABI/INFORM Global
- Savasa, Bilal and Samiloglub, Famil. 2010. *The Impact of Macroeconomic Variables on Stock Return in Turkey: an ARDL Bounds Testing Approach*. Afyon Kocatepe Üniversitesi IIBF Dergisi,
- Suminto, *Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara*. Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen Anggaran, Depkeu) dapat diakses di www.iei.or.id
- Surtahman Kastin Hasan,. *Ekonomi Islam*. (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1990)
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2015)
- Syamsuddin as-Sarkhasi, *Al-Mabsut* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t), Juz 12
- Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nizām al-Iqtisād fi al-Islām*, terj. Mohd. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999)
- Tara Ninta Ikrima, Harjum Muharam Co-Integration Dan Contagion Effect Antara Pasar Saham Syariah Di Indonesia, Malaysia, Eropa, Dan Amerika Saat Terjadinya Krisis Yunani dalam Jurnal Dinamika Manajemen. 2015

- Ulia Monica Oehler-Sincai. Financial contagion reloaded: the case of Cyprus. Global Economic Observer. 2013
- UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989)
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.all. Jilid 10 (Jakarta: Darul Fikir 201)
- Widyawati. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Arsad Press, 2011)
- Wiyoso Hadi. *Apakah Agama Mengharamkan Pajak* dalam <http://www.pajak.go.id/content/article/apakah-agama-mengharamkan-pajak>